



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

TAHUN 2023 - 2026



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N
L E M B A T A**

**PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 44 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023-2026**



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 00045);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata untuk periode 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 4 (empat) tahun.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
PENYUSUNAN RPD TAHUN 2023-2026
Pasal 2

- (1) Dalam Penyusunan RPD Tahun 2023-2026, agar memperhatikan sebagai berikut:
- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022;
 - d. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional; dan
 - g. regulasi yang berlaku.
- (2) Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam RPD Tahun 2023-2026, agar memperhatikan sebagai berikut:
- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra-PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
 - c. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - d. kebijakan nasional;
 - e. regulasi yang berlaku; dan
 - f. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPD TAHUN 2023-2026
Pasal 3

RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang kinerja keuangan daerah 2023-2026, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat tentang tinjauan kebijakan dan analisis isu-isu strategis.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang program prioritas dalam pencapaian seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra-PD serta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IX PENUTUP

Memuat tentang indikator kinerja daerah tahun 2023-2026.

**BAB IV
ISI DAN URAIAN
Pasal 4**

Isi dan uraian RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *Ar J*

BAB V
SISTEMATIKA
Pasal 5

RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama 4 (empat) tahun dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Maret 2022



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		vii
Daftar Grafik		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	4
1.4	Maksud dan Tujuan	5
1.5	Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN UMUM	1
2.1	Gambaran Umum	1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	1
2.1.1.1.	Aspek Geografi.....	1
2.1.1.2.	Aspek Demografi.....	16
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	18
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	18
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	22
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	24
2.1.3.1.	Fokus Urusan Layanan Wajib.....	39
2.1.3.2.	Fokus Urusan Wajib Non Dasar.....	49
2.1.3.3.	Urusan Layanan Pilihan.....	57
2.1.3.4.	Pendukung Urusan Pemerintah lainnya.....	62
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	65
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH	1
3.1	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	1
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	2
3.1.1.2	Belanja Daerah	6
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	9
3.1.2	Neraca Daerah	11
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	15
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	15
3.2.2	Analisis Pembiayaan	18
3.3	Kerangka Pendanaan	22
3.3.1	Analisis Pengelolaan Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	22
3.3.2	Proyeksi Keuangan Daerah	27
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	33
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	1
4.1	Identifikasi Masalah	1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	1
4.1.2	Permasalahan Berdasarkan Urusan.....	11
4.2	Telaah terhadap Dokumen Perencanaan.....	14
4.2.1	Telaah RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025	14
4.2.2	Telaah RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031	15



4.2.3	Telaah RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018	20
4.2.4	Telaah RPJMN Tahun 2020-2024.....	23
4.2.5	Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).....	26
4.3	Isu Strategis.....	30
4.4	Isu Strategis Daerah.....	36
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	1
6.1	Strategi	1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	3
6.3	Program Prioritas	13
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1
BAB IX	PENUTUP.....	1



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. II.1	Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Kabupaten Lembata	1
Tabel. II.2	Tipe Morfologi Kabupaten Lembata	2
Tabel. II.3	Formasi Geologi Kabupaten Lembata	3
Tabel. II.4	Sebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Lembata.....	4
Tabel. II.5	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata	5
Tabel. II.6	Curah Hujan per tahun dan Curah Hujan per bulan di Kabupaten Lembata Tahun 2021	6
Tabel. II.7	Jenis Tanah Kabupaten Lembata.....	7
Tabel. II.8	Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata	8
Tabel. II.9	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Lembata	9
Tabel. II.10	Indeks Ancaman Gempa Bumi Kabupaten Lembata.....	12
Tabel. II.11	Potensi Longsor di Kabupaten Lembata	15
Tabel. II.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata	16
Tabel. II.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lembata	17
Tabel. II.14	Jumlah Penduduk berdasarkan umur muda, umur produktif, umur tua dan Jenis Kelamin Tahun 2021	17
Tabel. II.15	Jumlah Penduduk Usia 7 – 24 tahun menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Lembata Tahun 2021.....	17
Tabel. II.16	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional.....	18
Tabel. II.17	PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Miliar Rupiah).....	19
Tabel. II.18	Kontribusi Per Sektor pada PDRB Kabupaten Lembata menurut Lapangan Usaha 2017-2020 (%)	20
Tabel. II.19	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata)	20
Tabel. II.20	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata	21
Tabel. II.21	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Lembata.....	22
Tabel. II.22	Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata.....	22
Tabel. II.23	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lembata.....	22
Tabel. II.24	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lembata.....	23
Tabel. II.25	Angka Harapan Hidup Bayi Kabupaten Lembata	23
Tabel. II.26	Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata.....	23
Tabel. II.27	Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata	23
Tabel. II.28	Angka Balita Pendek (Stunting) Kabupaten Lembata	24
Tabel. II.29	Capaian SPM Kabupaten Lembata.....	25
Tabel. II.30	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lembata.....	39
Tabel. II.31	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lembata.....	39
Tabel. II.32	Persentase Pendidikan Yang ditamatkan.....	39
Tabel. II.33	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lembata.....	40
Tabel. II.34	Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lembata.....	40
Tabel. II.35	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Lembata.....	41
Tabel. II.36	Fasilitasi Pendidikan Jenjang Pendidikan.....	41
Tabel. II.37	Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lembata.....	42
Tabel. II.38	Angka Kelangsungan Hidup Bayi.....	43
Tabel. II.39	Angka Harapan Hidup.....	43
Tabel. II.40	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata.....	44
Tabel. II.41	Angka Balita Stunting Kabupaten Lembata.....	44



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Tabel. II.42	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan	46
Tabel. II.43	Kondisi Perumahan Kabupaten Lembata.....	46
Tabel. II.44	Persebaran Rumah Layak Huni Kabupaten Lembata.....	47
Tabel. II.45	Kenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	47
Tabel. II.46	Jenis PMKS Kabupaten Lembata.....	48
Tabel. II.47	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata.....	49
Tabel. II.48	Data Partisipasi Perempuan Kabupaten Lembata.....	50
Tabel. II.49	Kondisi Produktivitas Tanaman Pangan.....	50
Tabel. II.50	Kinerja Pertanahan Kabupaten Lembata.....	51
Tabel. II.51	Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lembata	51
Tabel. II.52	Kondisi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata	52
Tabel. II.53	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata	52
Tabel. II.54	Data Pembangunan Keluarga Berencana	53
Tabel. II.55	Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2017-2021.....	53
Tabel. II.56	Kondisi Pembangunan Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021	53
Tabel. II.57	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2010	54
Tabel. II.58	Jumlah Investor dan Nilai Investasi Tahun 2017-2021	54
Tabel. II.59	Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata 2017 – 2021	55
Tabel. II.60	Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata	56
Tabel. II.61	Kondisi Kepustakaan Daerah di Kabupaten Lembata	56
Tabel. II.62	Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata	56
Tabel. II.63	Jumlah Nelayan dan Sarana Prasarana yang dimiliki	58
Tabel. II.64	Jumlah Hotel di Kabupaten Lembata.....	59
Tabel. II.65	Data Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2017 - 2021	59
Tabel. II.66	Data Produksi Sayuran di Kabupaten Lembata	59
Tabel. II.67	Data Produksi Buah-buahan di Kabupaten Lembata	60
Tabel. II.68	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lembata	60
Tabel. II.69	Data Populasi Ternak di Kabupaten Lembata	60
Tabel. II.70	Data Kelompok Ternak di Kabupaten Lembata	61
Tabel. II.71	Data Produksi Daging di Kabupaten Lembata	61
Tabel. II.72	Data Produksi Telur di Kabupaten Lembata	62
Tabel. II.73	Jumlah Pasar dan Kelompok Kerajinan serta UMKM Tahun 2020	62
Tabel. II.74	Nilai, Predikat dan Status AKIP	62
Tabel. II.75	Nilai EKPP	63
Tabel. II.76	Gambaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63
Tabel. II.77	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	64
Tabel. II.78	Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	64
Tabel. II.79	Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lembata 2017 – 2021	65
Tabel. II.80	Rata – Rata Pengeluaran Dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Lembata	66
Tabel. II.81	Persentase Pengeluaran Rata – Rata Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran Sebulan Kabupaten Lembata Tahun 2017	66
Tabel. II.82	Nilai Tukar Petani Kabupaten Lembata Tahun 2018	67
Tabel. II.83	Jenis Bank per Kecamatan di Kabupaten Lembata	67
Tabel. II.84	Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata	67



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Tabel. II.85	Lama Proses Perijinan di Kabupaten Lembata	68
Tabel. II.86	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2021	68
Tabel. II.87	Rasio Ketergantungan	68
Tabel. III.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021	3
Tabel. III.2	Kinerja Belanja Daerah Kab. Lembata Tahun 2017-2021 ...	7
Tabel. III.3	Kinerja Pembiayaan Daerah Kab. Lembata Tahun 2017-2021.....	10
Tabel. III.4	Perkembangan Neraca Kab. Lembat Tahun 2017-2021	12
Tabel. III.5	Analisis Rasio Keuangan Kab. Lembata Tahun 2017-202...	14
Tabel. III.6	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran	16
Tabel. III.7	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2021	17
Tabel. III.8	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Tahun 2017-2021	17
Tabel. III.9	Surplus/Defisit Kab. Lembata Tahun 2017-2021.....	19
Tabel. III.10	Defist Rill Anggaran Kab. Lembata Tahun 2017-2021	20
Tabel. III.11	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Lembata Tahun 2017-2021	24
Tabel. III.12	Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Lembata Tahun 2023-2026	26
Tabel. III.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Lembata Tahun 2023-2026	28
Tabel. III.14	Proyeksi Belanja Daerah Kab. Lembata Tahun 2023-2026..	30
Tabel. III.15	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. Lembata Tahun 2023-2026	32
Tabel. III.16	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Lembata Tahun 2023-2026	34
Tabel. IV.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten dan Misi RPJMD Provinsi.....	21
Tabel. IV.2	Telaah Misi RPJPD Kabupaten Lembata terhadap SDG's..	27
Tabel V.1	Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Lembata.....	5
Tabel VI.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	1
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	4
Tabel VI.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan Perencanaan Tahunan.....	9
Tabel VI.4	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata	14
Tabel VI.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.....	22
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.....	2
Tabel VII.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	7
Tabel VIII.1	Indikator Makro Kabupaten Lembata	1
Tabel VIII.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lembata.....	3



Tabel VIII.3	Indikator Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.....	5
--------------	--	---



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar. I.1	Hubungan Antar RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran.....	5
Gambar. II.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lembata	2
Gambar. II.2	Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Lembata	3
Gambar. II.3	Peta Geologi Kabupaten Lembata	4
Gambar. II.4	Peta Formasi Hidrologi Akuifer Kabupaten Lembata	5
Gambar. II.5	Peta Sebaran Daerah Aliran Sungai Ka. Lembata	6
Gambar. II.6	Satuan Peta Tanah Kabupaten Lembata	8
Gambar. II.7	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kab. Lembata	9
Gambar. II.8	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata	10
Gambar. II.9	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lembata	10
Gambar. II.10	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan	11
Gambar. II.11	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata	11
Gambar. II.12	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Permukiman	12
Gambar. II.13	Peta Potensi Rawan Gempa di Kabupaten Lembata	13
Gambar. II.14	Peta Potensi Rawan Tsunami di Kabupaten Lembata	13
Gambar. II.15	Peta Potensi Rawan Gunung Berapi di Kabupaten Lembata.....	14
Gambar. II.16	Peta Potensi Rawan Kekeringan di Kabupaten Lembata....	14
Gambar. II.17	Peta Potensi Rawan Longsor di Kabupaten Lembata.....	15
Gambar. II.18	Peta Potensi Rawan Banjir di Kabupaten Lembata	16
Gambar. IV.1	Keterkaitan Misi RPJPD dan Misi RPJMD Provinsi NTT.....	21
Gambar. IV.2	Keterkaitan Misi RPJPD dan Misi RPJMN	25
Gambar. IV.3	Keterkaitan Misi RPJPD dan Agenda Pembangunan Nasional	26
Gambar. IV.4	Telaah Misi RPJPD Kab. Lembata Terhadap SDG's	27
Gambar. V.1	Hubungan Misi RPJPD Kabupaten dan Tujuan RPD Kabupaten.....	4



DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM

		Halaman
Grafik. II.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2016-2021.....	18
Grafik. II.2	Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2016-2021.....	21
Grafik. II.3	Kondisi Jalan Kab. Lembata Tahun 2021	44
Grafik. II.4	Kondisi Irigasi Kabupaten Lembata.....	45
Grafik. II.5	Konsumsi Ikan Laut di Kabupaten Lembata.....	57
Grafik. II.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Lembata	58
Grafik. III.1	Komposisi Kinerja Pendapatan Daerah Kab. Lembata Tahun 2017-2021	5
Grafik. III.2	Komposisi Kinerja Belanja Daerah Kab. Lembata Tahun 2017-2021	8
Diagram. II.1	Angka Putus Sekolah Kab. Lembata	40
Diagram. II.2	Fasilitas Kesehatan Kab. Lembata Tahun 2021	42
Diagram. II.3	Data Produksi Ikan Kabupaten Lembata.....	57
Diagram. III.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kab. Lembata Tahun 2017-2021	2



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 maka daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.



Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 sehingga wajib menyusun RPD Tahun 2023-2026. Penyusunan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2020-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan provinsi, serta regulasi yang berlaku.

Penyusunan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan



- Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 00045);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21).

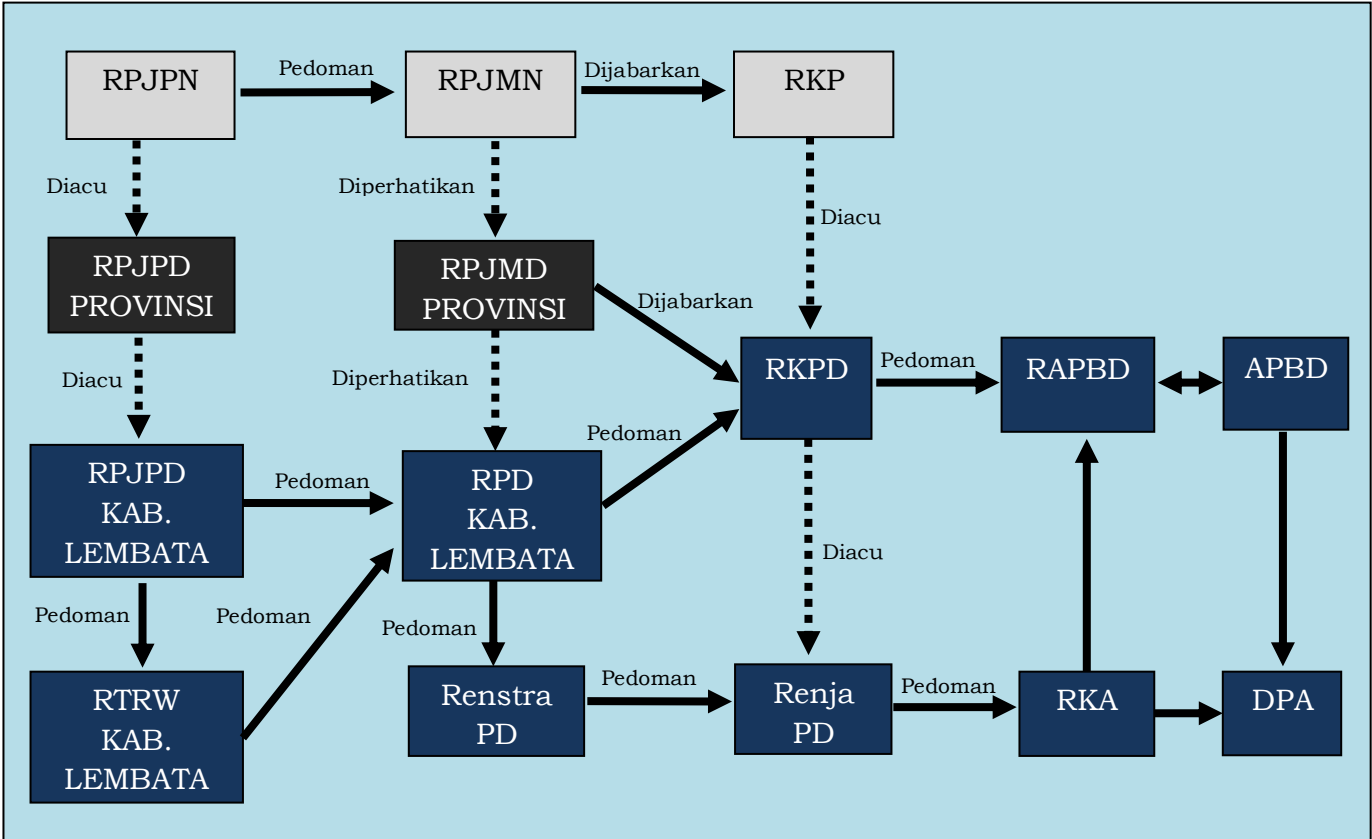
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024. yang memuat gambaran umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.



RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 dan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun hubungan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar I.1
Hubungan antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU SPPN dan UU Keuangan Negara (Hasil Analisis)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026, menjaga keseimbangan pembangunan daerah serta menyelaraskan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

h



1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Tahun 2023-2026.
2. Sebagai acuan dan pedoman resmi penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD, RPJMDes.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi pembangunan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini memuat dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu Tahun 2017-2021, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Tahun 2017-2021 dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini memuat uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah terhadap dokumen perencanaan dan isu strategis.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2023-2026 serta indikator kinerja sasaran.



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini memuat strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

1. Batas dan Luas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak pada : 8°10'12” - 8°35'24” LS dan 123°12'1” - 123°55'48” BT. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Merica Kabupaten Alor dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera Kabupaten Flores Timur.

Luas administrasi daratan Kabupaten Lembata adalah sebesar 1.266,39 km² terdiri dari 9 kecamatan, 144 desa dan 7 kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah
Kabupaten Lembata

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan dan desa	Luas Wilayah	
			(Km ²)	(%)
1	Nagawutung	18	185,70	14,66
2	Wulandoni	15	121,44	9,59
3	Atadei	15	150,42	11,88
4	Ile Ape	17	96,86	7,65
5	Ileape Timur	9	38,26	3,02
6	Lebatukan	17	241,90	19,10
7	Nubatukan	11 desa/ 7 kelurahan	165,64	13,08
8	Omesuri	22	161,91	12,79
9	Buyasuri	20	104,26	8,23
Jumlah		144 desa/ 7 kelurahan	1.266,39	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lebatukan seluas 241,90 km² atau 19,10%. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ile Ape Timur seluas 38,26 km² atau 3,02% dari total wilayah Kabupaten Lembata. hal ini mengindikasikan bahwa sebaran wilayah antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak merata karena topografi wilayah kecamatan. Peta administrasi wilayah sebagaimana gambar berikut.

[illegible]

Berdasarkan Peta Kabupaten Lembata tersebut, tampak bahwa sebaran desa pada 9 kecamatan di Kabupaten Lembata sebagian besar desa merupakan desa yang terletak di pesisir laut yang jumlahnya mencapai 82 desa. Sedangkan desa yang berada di daerah bukan pesisir sebanyak 62 desa. Di sisi lain umumnya sebaran desa terutama berada pada dataran tinggi dan gunung termasuk gunung berapi.

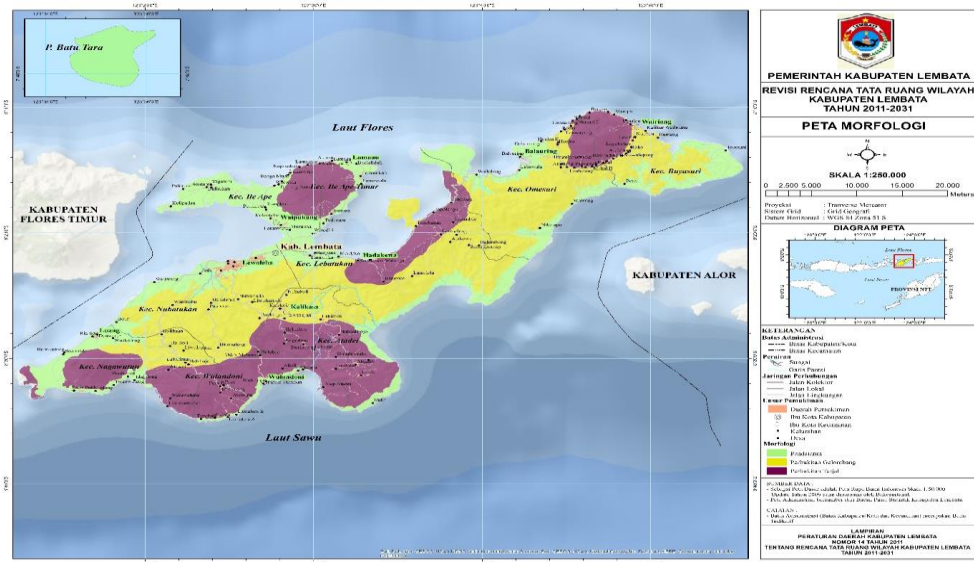
Tabel II.2
Tipe Morfologi Kabupaten Lembata

Tipe Morfologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Pedataran	33.238,96	26,32
Perbukitan gelombang	52.469,92	41,56
Perbukitan terjal	40.557,12	32,12
Luas Total	126.266,00	100%

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata bertopografi perbukitan gelombang dengan luasan 52.469,92 ha atau sebesar 41,56% dari total 126.266,00 ha dan luasan topografi pedataran paling sedikit yaitu 33.238,96 atau 26,32%.

Lahan perbukitan dan bergelombang ini, selain sebagai kawasan permukiman penduduk, juga berfungsi budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan seperti Hutan Produksi Tetap, Hutan Tanaman Industri, Hutan Rakyat, Perkebunan (tanaman keras), dan tanaman buah-buahan. Selain itu tanah bergelombang, drainase tanah lebih baik sehingga pengaruh iklim (curah hujan, suhu) lebih jelas dan pelapukan serta pencucian berjalan lebih cepat.

Gambar II.2
Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Lembata



Sumber : RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

3. Kondisi Geologi

Tabel II.3
Formasi Geologi Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	Geology Formation	Simbol Formasi Geologi	Luas (ha)
Aluvial dan Endapan Koastal	Alluvial and Coastal Deposits	Qal	2.635,22
Batuan Gunung api Tua	Old Volcanic Rocks	QTV3	35.036,24
Batuan Gamping Korai	Corraline Limestone	Ql	16.485,88
Formasi Kiro	Kiro Formation	Tmk1	44.458,08
Formasi Laka	Laka Formation	Tmpl	158,11
Formasi Nangapanda	Nangapanda Formation	Tmn3	16.034,62
Formasi Waihekang	Waihekang Formation	Tmpw1	3.235,73
Produk vulkanik muda	Younger Volcanic Product	Qhv3	8.222,12
Luas Total			126.266,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Batuan beku vulkanik merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang meletus dari gunung berapi juga mencakup batuan subvulkanik dan batuan metamorf. Sedangkan batuan tektonik merupakan pergerakan lempengan-lempengan tektonik yang penyebarannya mengikuti pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti pola-pola pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menyusun kerak bumi.

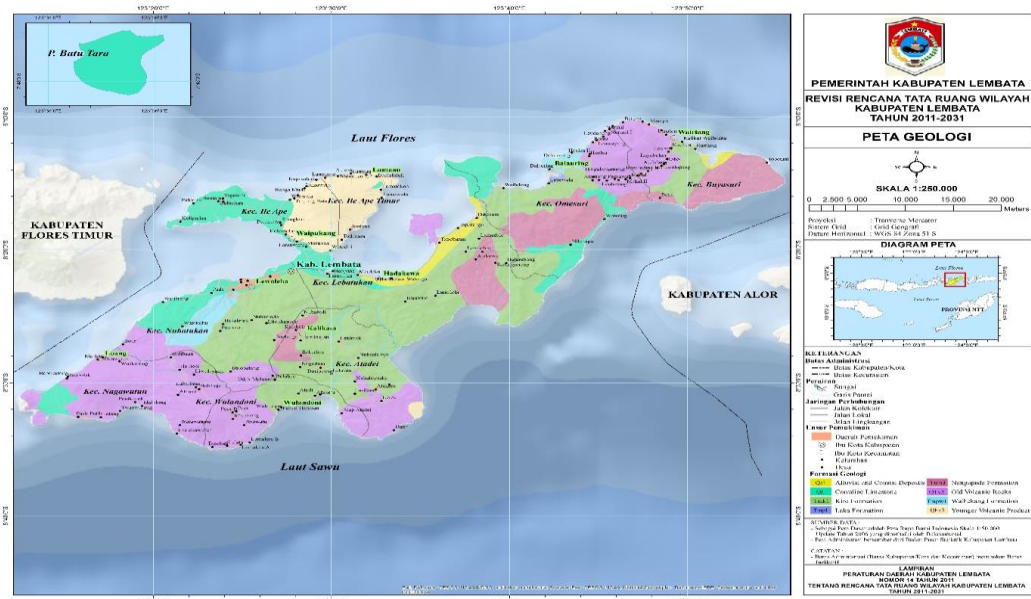
Jenis batuan baik vulkanik maupun tektonik, tersebar pada semua kecamatan di Kabupaten Lembata dengan total luasan sebanyak 126.266,00 ha. Jenis formasi geologi yang cukup luas adalah *Formasi Kiro* dengan luasan



sebanyak 44.458,08 ha dan jenis formasi geologi yang paling sedikit adalah *Formasi Laka* dengan luasan sebanyak 158,11 ha. Jenis batuan vulkanik yang ada di Kabupaten Lembata berasal dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma seperti gunung Ile Lewotolok, Uyelewun dan Ile Werung.

Stratigrafi umum di wilayah ini secara berurutan dari umur tua ke muda, terdiri dari formasi kiro, nangapanda, waihekan batuan gunung api tua dan undak pantai, sebagaimana peta geologi regional pada Gambar II.3.

Gambar II.3
Peta Geologi Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

4. Kondisi Hidrologi

a. Kondisi Litologi Akuifer Cekungan Air Tanah (CAT)

Tabel II.4
Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata

No.	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	CAT ILIWATULOLO	54.982	43,54
2.	CAT LEWOLEBA	53.060	42,03
3.	CAT WAIRIANG	5.799	4,59
4.	CAT WAPOE	9.737	7,71
5.	CAT BALAURIK	2.688	2,13
Jumlah		126.266	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lembata, menunjukan bahwa CAT terbesar adalah CAT Iliwatulolo dan terkecil adalah CAT Balaurik.



b. Kondisi Hidrologi Akuifer

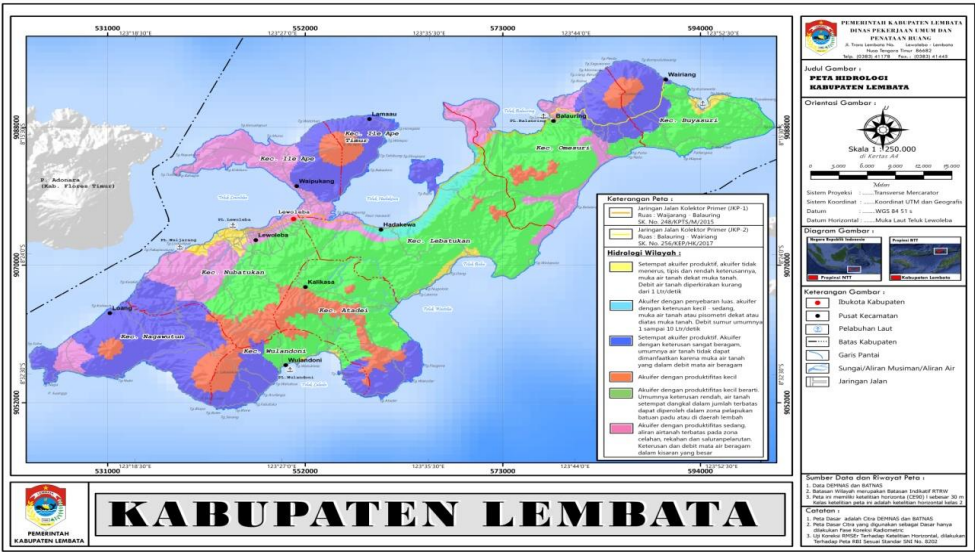
Ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas karena rendahnya curah hujan. Potensi simpanan air tanah seluas 13.757,75 ha pada Tabel II.4 dan Gambar II.4 berikut.

Tabel II.4
Formasi hidrologi Akuifer wilayah Kabupaten Lembata

No.	Akuifer	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Penyebaran Luas	2.558	2,03
2.	Produktifitas Kecil	13.758	10,90
3.	Produktifitas Kecil Berarti	53.135	42,08
4.	Produktifitas Sedang	19.459	15,41
5.	Produktifitas Tidak Menerus	2.636	2,09
6.	Produktifitas Kelurusan Beragam	34.720	27,49
Jumlah		126.266	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Gambar II.4
Peta Hidrologi Akuifer Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

c. Kondisi Daerah Aliran Sungai

Tabel II.5
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
DAS Waikomo-Waipukang	14.884
DAS Teba (Waiteba)	7.476
DAS Maa-Waibajar-Waijarang	7.512
DAS Kima	6.347
DAS Keratauwur	5.411
DAS Kimakamak-Waibelen	5.256
DAS Mea Belalarang	5,06
DAS Wailolong	4.908
DAS Atawuwur	3.562

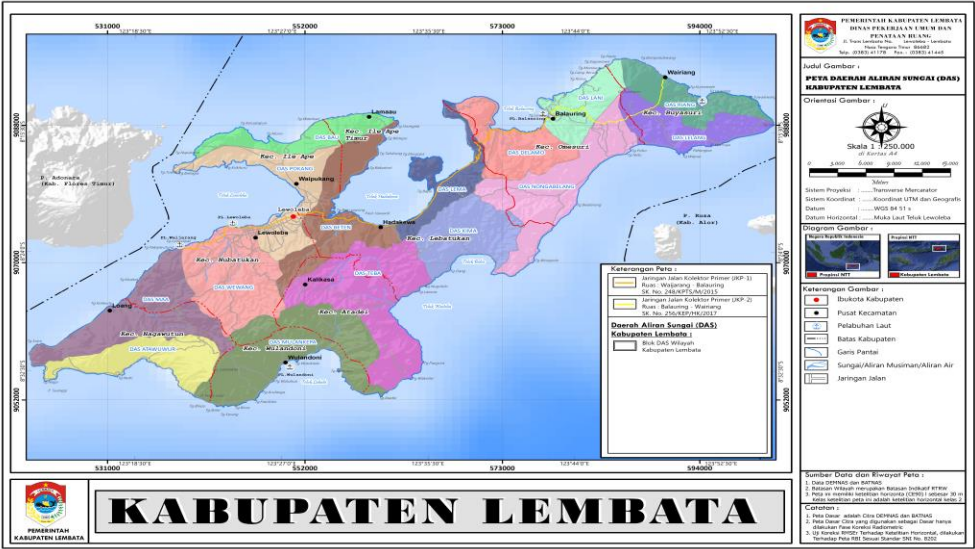


Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
DAS Kodohorang Teolor	3.113
DAS Wutun	2.450
DAS Suarlaleng	2.298
DAS Tapobaran-Nuhanera	1.974
DAS Loang-Belate	1.865
DAS Woilema	1.824
DAS Baobolak	1.521
DAS Riang	1.491
DAS Tebukloyo-Lewotukan	1.457
DAS Wutuq	1.256
DAS Wolomua	762
Luas Total	73.507,06

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Lembata sebanyak 20 daerah aliran sungai, dengan total luasan 73.507,06 ha. Aliran sungai yang terluas terdapat pada DAS Wailolong dan terkecil adalah DAS Mea Belalarang. Adapun peta sebaran DAS di Kabupaten Lembata dapat terlihat pada peta berikut.

Gambar II.5
Peta sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

5. Kondisi Klimatologi

a. Curah Hujan

Kondisi Iklim di wilayah Kabupaten Lembata tergolong curah hujan menengah (100-300) mm. Berdasarkan data curah hujan tahun 2021 maka jumlah curah hujan dalam setahun sebesar 331,20 mm dan rata-rata curah hujan perbulannya sebesar 166,1 mm. Data curah hujan selengkapnya tersaji pada Tabel II.6. di bawah ini.



Tabel II.6
Curah Hujan per Bulan Kabupaten Lembata Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	331,20	21
Februari	214,00	19
Maret	132,50	13
April	78,40	7
Mei	148,90	10
Juni	0,00	0
Juli	1,00	1
Agustus	0,00	0
September	0,00	0
Oktober	10,80	4
November	30,60	4
Desember	313,20	23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Pada tabel di atas, tampak bahwa curah hujan di Kabupaten Lembata sangat sedikit dengan intensitas sedang. Curah hujan tertinggi pada Bulan Januari dengan jumlah 331,20 mm dengan jumlah hari hujan 21 hari, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juni, Agustus dan September dengan jumlah 0,00 mm dengan jumlah hari hujan 0 hari.

b. Jenis Tanah

Tabel II.7
Jenis Tanah Kabupaten Lembata

Jenis Tanah	Luasan (ha)
Haplusolls dan Ustorthensts	156,93
Haplustepts	168,06
Haplustepts dan Usthorthents	55,16
Usthorthens	641,18
Ustipsammments	240,93
Luas Total	1.262,26

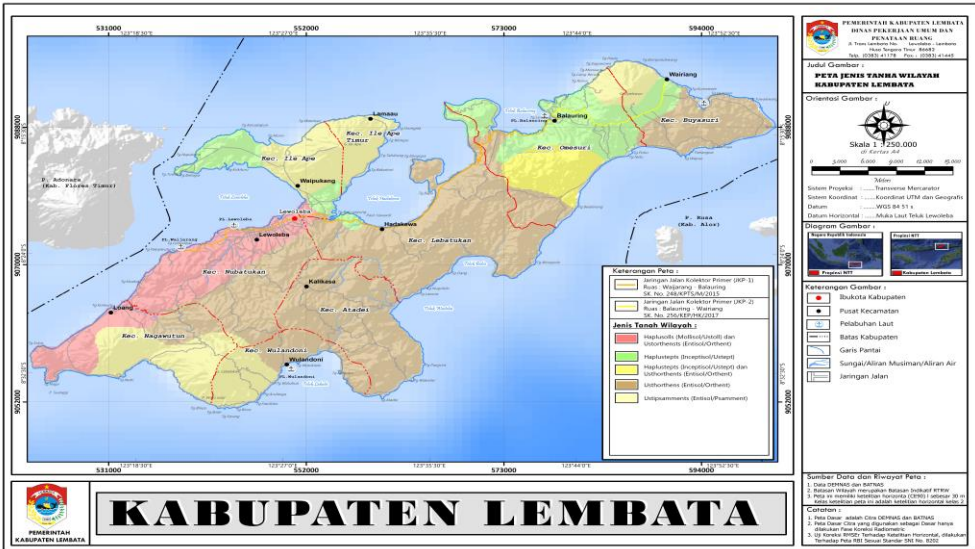
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Berdasarkan data jenis tanah di atas, klasifikasi tanah di Kabupaten Lembata didominasi oleh SPT 168 (*Usthorthens*) yang didominasi wilayah berbahan induk vulkanik pada sub landform pebukitan volkan dengan relief bergunung. Tipe dan jenis Tanah *Usthorthens* adalah tanah yang tergolong masih muda, dengan P_h sangat masam sampai netral dengan penampang tanah dangkal dan berbatu terutama di pegunungan atau perbukitan berlereng curam meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata.

Tekstur tanah pada umumnya sedang hingga agak kasar dengan kedalaman efektif sangat dangkal (30-50) cm dan dangkal (50-60) cm berbatu dengan erosi ringan dari total 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Lembata. Sedangkan satuan peta tanah di Kabupaten Lembata terlihat pada gambar II.6. di bawah ini.



Gambar II.6
Satuan Peta Tanah (SPT) Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

6. Penggunaan Lahan

a. Kawasan budidaya

Penggunaan lahan didominasi semak dan padang rumput. Lahan tempat bercocok tanam dengan luas yang sangat sedikit yaitu tegalan, kebun dan sawah. Luas penggunaan lahan tersaji pada Tabel II.8 dan Gambar II.7. berikut.

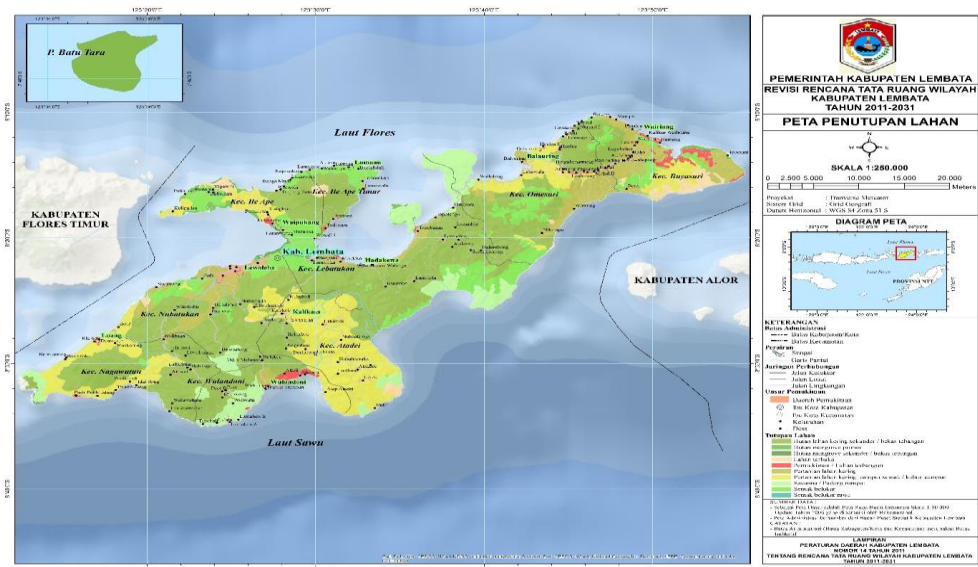
Tabel II.8
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata

Tipe Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
Bakau	1.413,44	1,08
Danau	5,51	0,004
Hutan	2.095,84	1,61
Kebun	5.575,63	4,28
Pasir	2.417,79	1,85
Pemukiman	1.869,6	1,43
Rawa	178,56	0,14
Rumput	15.524,35	11,91
Sawah	95,97	0,07
Semak	93.119,23	71,43
Sungai	562,08	0,43
Tegalan	7.507,83	5,76
Luas total	130.365,83	100

Sumber : RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031



Gambar II.7
Peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

b. Kawasan Hutan

Kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung terbesar adalah KH Hadakewa Labalekang sedangkan terkecil adalah KH Ilemahino. Hutan produksi terbesar adalah KH Hadakewa Labalekang sedangkan terkecil adalah KH Ilemahino dengan luasan hutan lindung terbesar terdapat pada Kecamatan Lebatukan dan terkecil didominasi semak dan padang rumput. Lahan tempat bercocok tanam dengan luas yang sangat sedikit yaitu tegalan, kebun dan sawah. Luas kawasan hutan tersaji pada Tabel II.9 dan Gambar II.8 berikut.

Tabel II.9
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata (Sesuai RTRW)

No	Kecamatan/ RPH	Kelompok Hutan/fungsi	RTK	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Buyasari	1. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.913,35	0,15
		2. Hutan Produksi Ile Kedang	91	74.286,00	5,70
		3. Hutan Produksi Ile Papar	92	1.165,12	0,09
2	Omesuri	4. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.890,04	0,14
		5. Hutan Lindung KH hadakewa Labalekang	130	3.745,46	0,29
		6. Hutan Produksi Ile Kedang	91	397.889,00	30,52
		7. Hutan Produksi KH Natu	116	144.158,00	11,06
3	Lebatukan	8. Hutan Lindung hadakewa Labalekang	130	173.432,99	13,30
4	Ile Ape	9. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	2.229,35	0,17
5	Ile Ape Timur	10. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	422.292,00	32,39
6	Nubatukan	11. Hutan Lindung hadakewa Labalekang	130	5.603,83	0,43
7	Atadei	12. Hutan Lindung KH hadakewa Labalekang	130	52.385,60	4,02
		13. Hutan Lindung KH	135	14.688,20	1,13

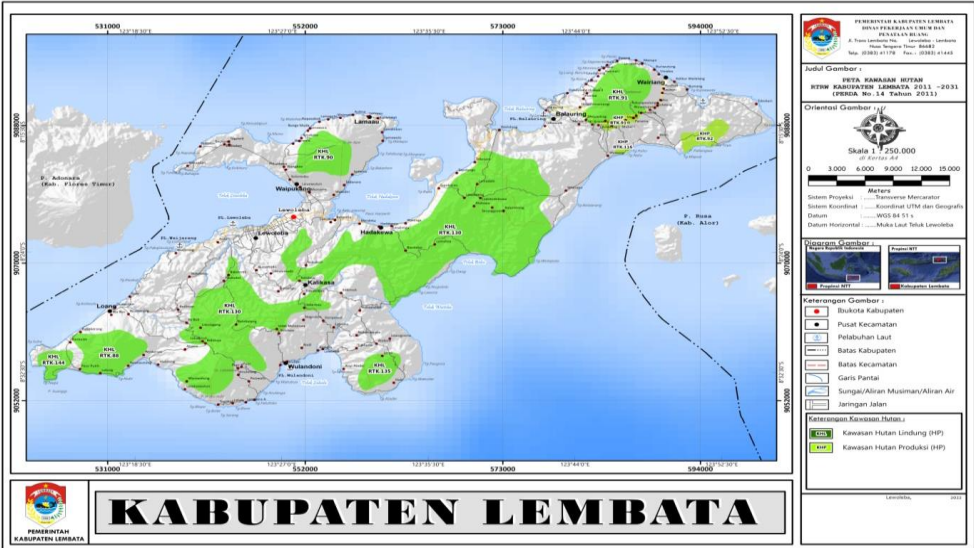


		Ile Peugora				
8	Nagawutung	14.	Hutan Lindung KH hadekewa Labalekang	130	3.572,61	0,27
		15.	Hutan Lindung KH Ilemahino	144	1.023,56	0,08
		16.	Hutan Lindung KH Minggar	88	3.360,45	0,26
JUMLAH					1.303.635,56	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Sebaran kawasan hutan di Kabupaten Lembata, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.8
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

7. Potensi Pengembangan Wilayah

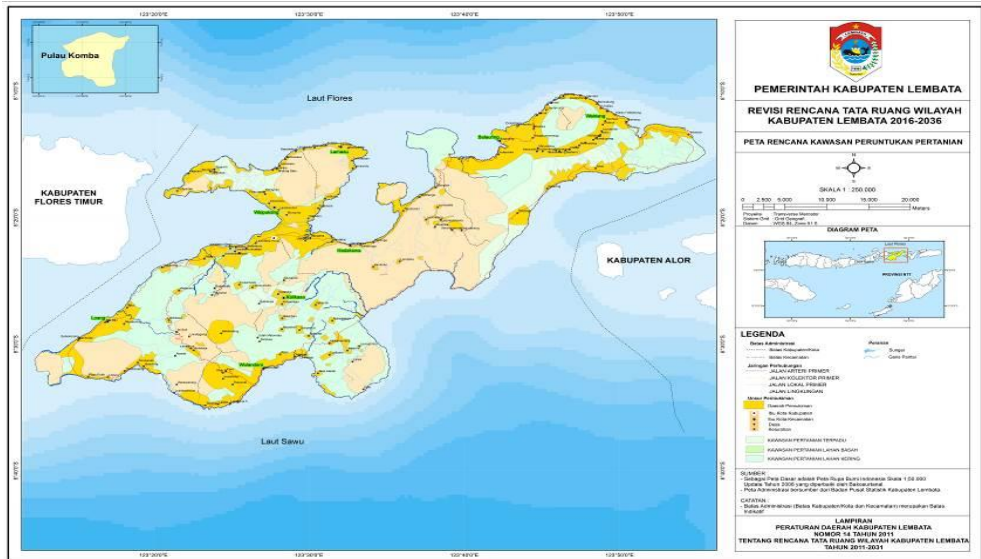
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 distribusi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya digambarkan sebagai berikut:

Handwritten signature



a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Gambar II.9
Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lembata



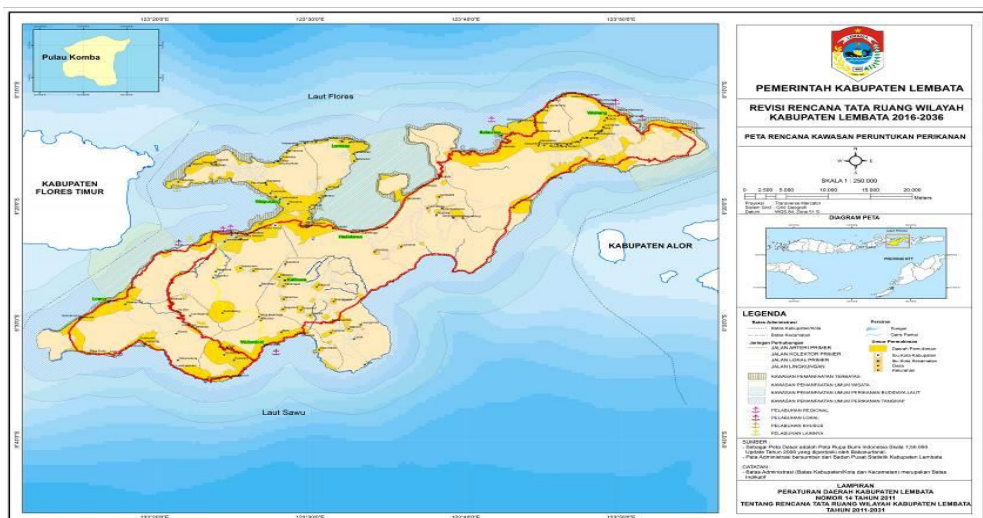
Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

Berdasarkan peta tersebut kawasan pertanian di Kabupaten Lembata berpotensi untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang tersebar di 9 Kecamatan.

b. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Adapun rencana kawasan perikanan sebagaimana gambar II.10.

Gambar II.10
Peta Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan



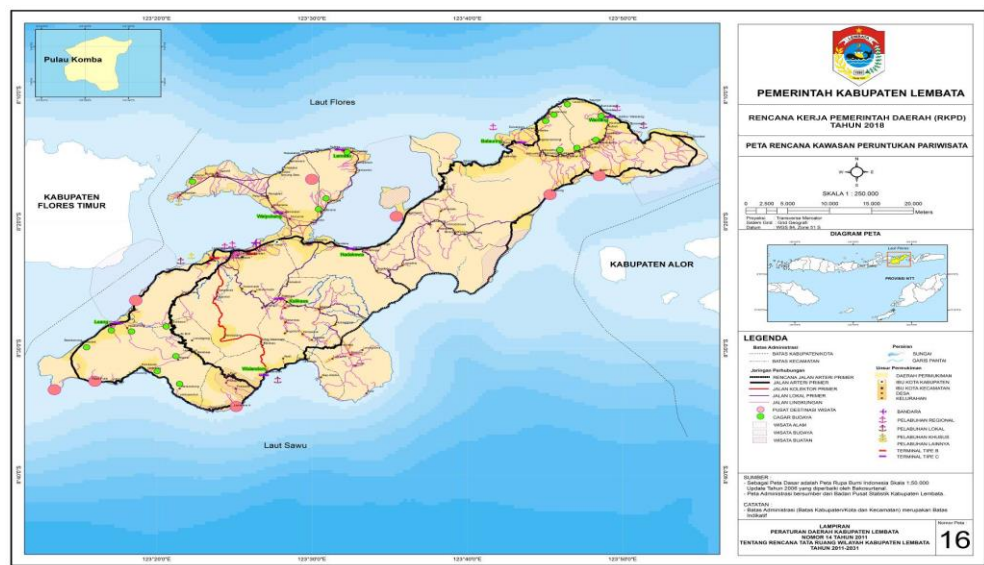
Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031



c. Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam, budaya, dan pariwisata buatan yang tersebar di 9 Kecamatan.

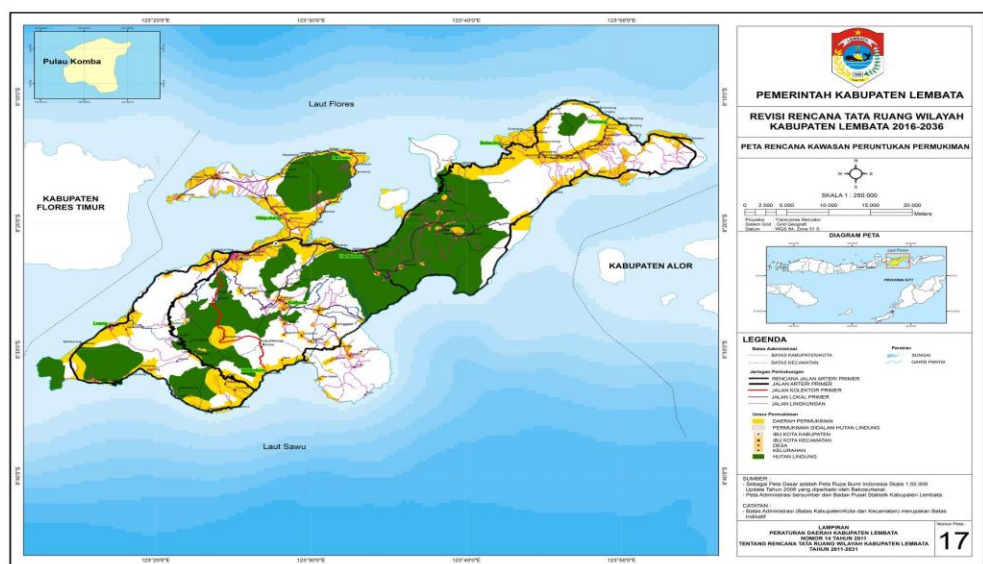
Gambar II.11
Peta rencana kawasan peruntukan pariwisata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

d. Kawasan Peruntukan Permukiman

Gambar II.12
Peta rencana kawasan peruntukan permukiman



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

8. Wilayah Rawan Bencana

Pulau Lembata merupakan bagian dari Sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif. Beberapa potensi bencana antara lain gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kekeringan dan kebakaran hutan.

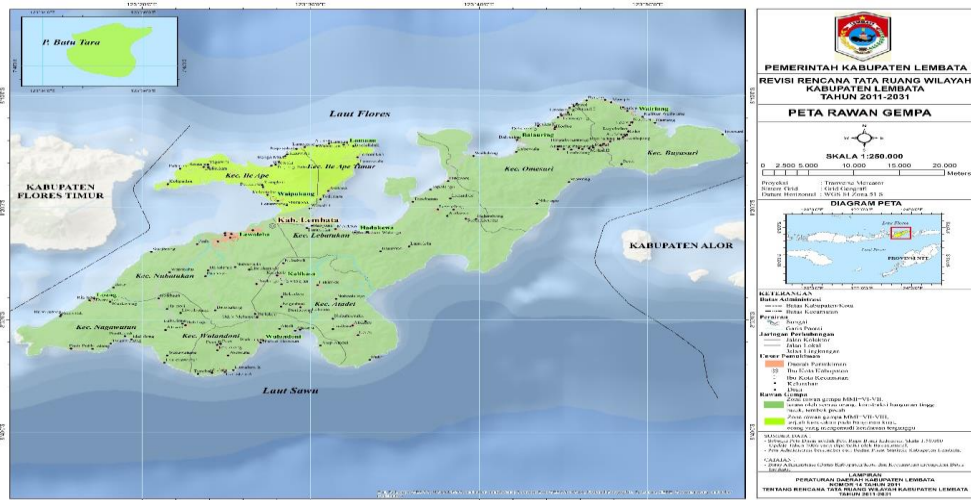
[Handwritten signature]



a. Gempa Bumi

Secara umum seluruh kawasan di Kabupaten Lembata merupakan daerah potensi pusat-pusat gempa tektonik, didukung oleh sejumlah sesar-sesar yang kemungkinan masih aktif. Sebagian besar wilayah Lembata bagian selatan berpotensi gempa cukup besar, yaitu IV – VII MMI (Modified Mercalli Indeks) atau 5,00-5,90 skala Richter, sedangkan sedikit di bagian utara intensitas gempa cenderung lebih besar yaitu VII – VIII MMI atau 6,00-6,90 SR, sebagaimana gambar II.13 di bawah ini.

Gambar II.13
Peta potensi rawan gempa di Kabupaten Lembata

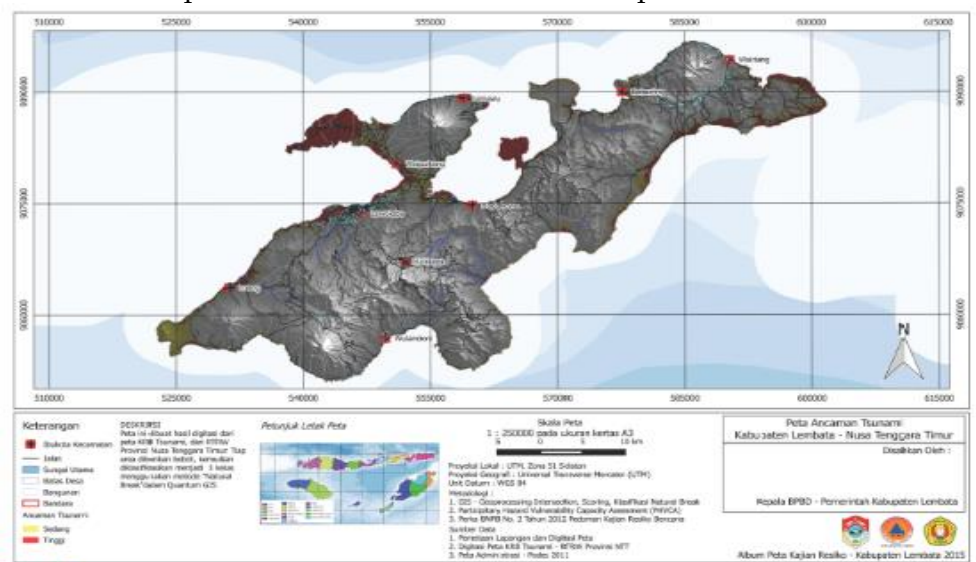


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2022

Berdasarkan peta tersebut di atas, intensitas ancaman gempa bumi cenderung lebih besar terdapat di Kecamatan Nubatukan dan sebagian Kecamatan Ile Ape dan Buyasuri. Sedangkan kecamatan lainnya dan sebagian Ile Ape Timur potensi gempa sedang.

b. Tsunami

Gambar II.14
Peta potensi rawan tsunami di Kabupaten Lembata



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2022

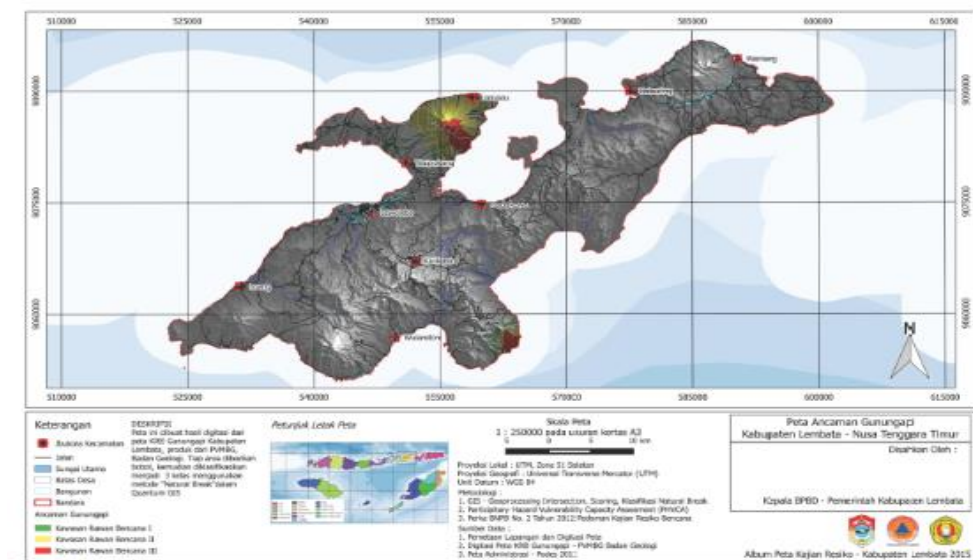


Peta ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Lembata apabila terjadi guncangan gempa bumi, sangat berpeluang untuk terjadi tsunami baik tsunamai berdampak sedang maupun yang berdampak tinggi.

c. Gunung Berapi

Kabupaten Lembata memiliki tiga gunung api tipe A yang masih aktif yaitu Gunung Api Ile Batutara, Gunung Api Ile Lewotolok dan Gunung Api Ile Werung.

Gambar II.15
Potensi Rawan Gunung Berapi di Kabupaten Lembata



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lembata, Tahun 2022

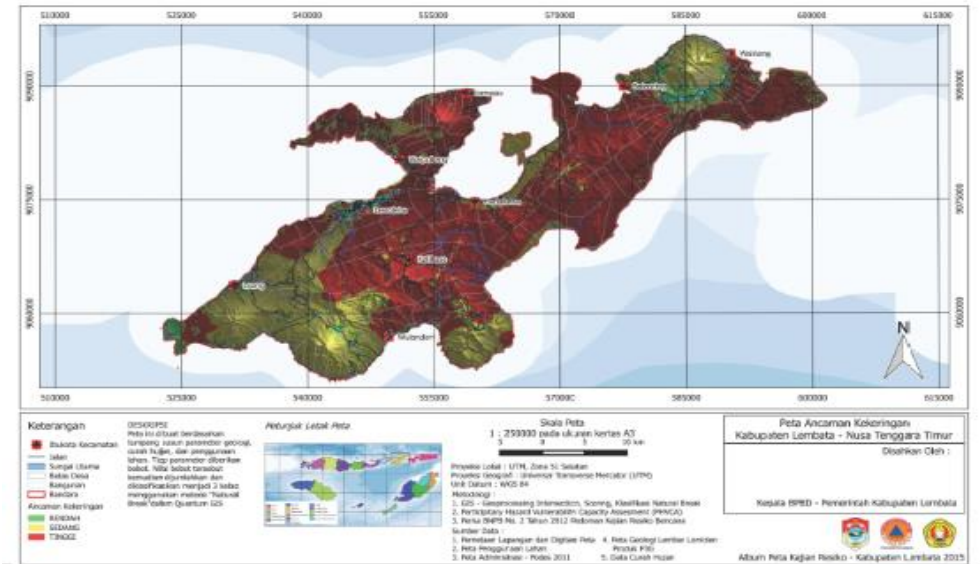
d. Kekeringan

Secara geografis letak Kabupaten Lembata berada pada belahan bumi dengan iklim monsoon tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim El-Nino Southern Oscillation (ENSO).

Faktor penyebab terjadinya kekeringan di Kabupaten Lembata adalah:
1) Adanya penyimpangan iklim; 2) Adanya gangguan keseimbangan hidrologis; dan 3) Kekeringan agronomis.



Gambar II.16
Potensi Rawan Kekeringan di Kabupaten Lembata



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lembata, Tahun 2022

e. Longsor

Potensi longsor di Kabupaten Lembata didominasi pada tingkat gerakan tanah rendah. Hal ini disebabkan karena topografi Kabupaten Lembata didominasi oleh dataran perbukitan yang landai. Berikut ini luas dan sebaran potensi longsor di Kabupaten Lembata, tersaji pada Tabel II.11 dan Gambar II.17.

Tabel II.11
Potensi Longsor di Kabupaten Lembata

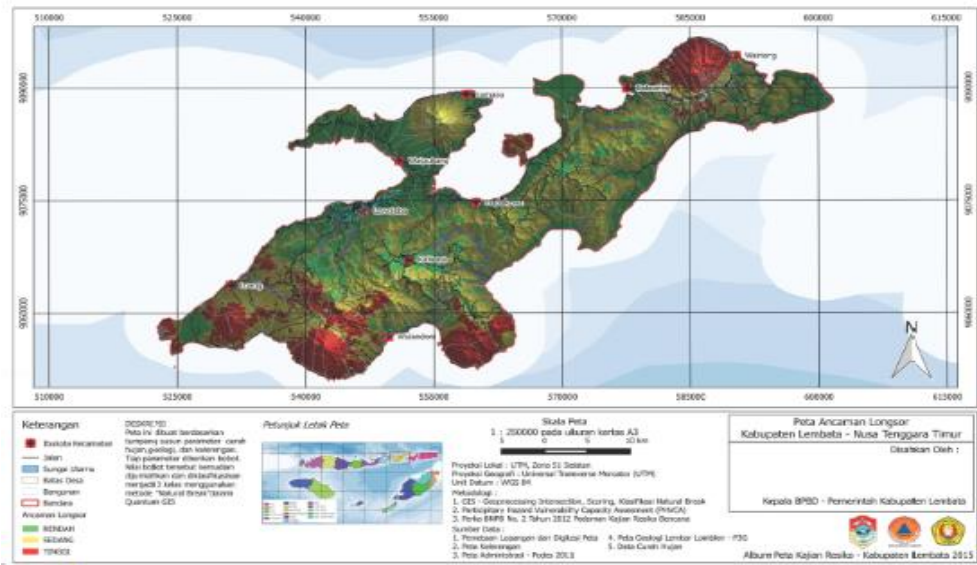
Tingkat Potensi Gerakan Tanah	Luas (ha)
Potensi Gerakan Tanah Rendah	110.034,40
Potensi Gerakan Tanah sedang	14.398,77
Potensi Gerakan Tanah Tinggi	2.229,83
Luas Total	126.663,01

Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

[Handwritten signature]



Gambar II.17
Peta Potensi Rawan Longsor di Kabupaten Lembata



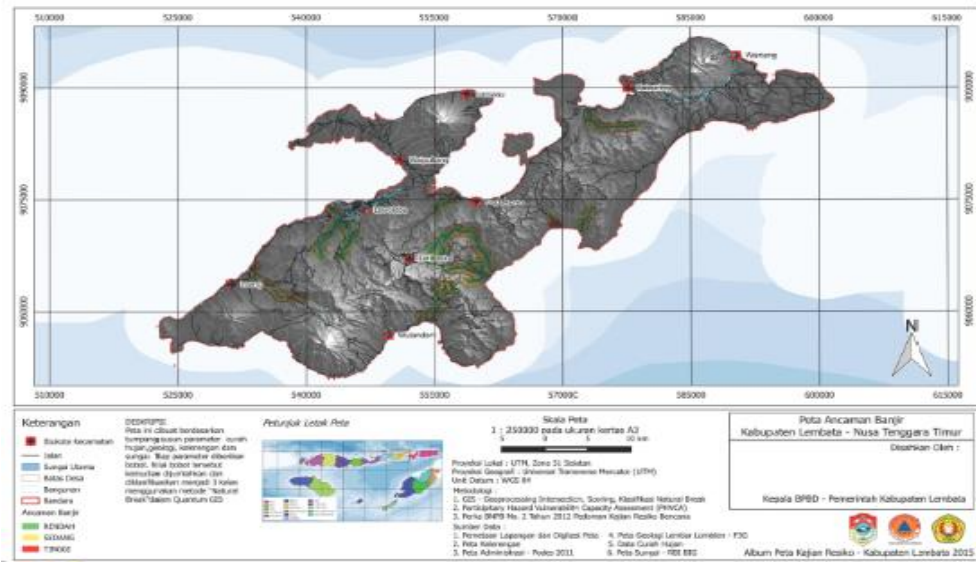
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lembata, Tahun 2022

f. Banjir

Daerah rawan banjir di Kabupaten Lembata dengan resiko tinggi terdapat pada 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan, Nubatukan dan Omesuri.

Pada tahun 2021 terjadi badai siklon tropis Seroja yang melanda 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, Kecamatan Buyasuri, dan Kecamatan Atadei yang mengakibatkan korban jiwa, kehilangan harta benda, kerusakan prasarana dan sarana serta lahan pertanian. Berikut sebaran potensi banjir di Kabupaten Lembata, tersaji pada Gambar II.18.

Gambar II.18
Peta Potensi Banjir di Kabupaten Lembata



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Handwritten signature



2.1.1.2. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Persebaran

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata sampai dengan tahun 2021 mencapai 135.930 jiwa terdiri dari laki-laki 65.508 jiwa dan perempuan 70.422 jiwa. Secara lebih jelas jumlah sebaran penduduk Kabupaten Lembata menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.12
Jumlah penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2021

Kecamatan Subdistrict		Total	Persentase	Kepadatan Penduduk per KM
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Nagawutung	10.120	7,07	54,47
2	Wulandoni	9.020	6,30	74,29
3	Atadei	7.700	5,38	51,18
4	Ile Ape	13.150	9,19	135,71
5	Ile Ape Timur	5.880	4,11	153,66
6	Lebatukan	9.770	6,83	40,37
7	Nubatukan	40.200	28,10	242,72
8	Omesuri	18.830	13,16	116,31
9	Buyasuri	21.270	14,87	204,00
Lembata		135.930	100,00	107,34

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2010-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lembata

Kecamatan		Jumlah Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2010	2021	
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Nagawutung	8.774	10.120	15,34
2	Wulandoni	8.404	9.020	7,33
3	Atadei	7.558	7.700	1,88
4	Ile Ape	11.547	13.150	13,88
5	Ile Ape Timur	5.116	5.880	14,93
6	Lebatukan	8.583	9.770	13,83
7	Nubatukan	33.512	40.200	19,96
8	Omesuri	15.968	18.830	17,92
9	Buyasuri	18.944	21.270	12,28
Lembata		118.406	135.930	14,81

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

fu



c. Struktur Penduduk

1) Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.14
Jumlah Penduduk berdasarkan umur Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pnduduk
1	Umur Muda (0-14 Tahun)	22.669	21.237	43.906
2	Umur Produktif (15-59)	36.483	39.693	76.176
3	Umur Tua (60 Tahun ke atas)	6.356	9.492	15.848
TOTAL		65.508	70.422	135.930

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

2) Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah

Struktur penduduk menurut kelompok usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.15
Jumlah Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Lembata Tahun 2021

Kelompok Usia Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7 – 12	1.824	15.095	3.146
13 – 15	8.337	5.867	2.470
16 – 18	2.309	2.104	205
19 – 24	-	-	-
Total	12.470	23.066	5.821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dicerminkan oleh fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing fokus dari aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :



2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

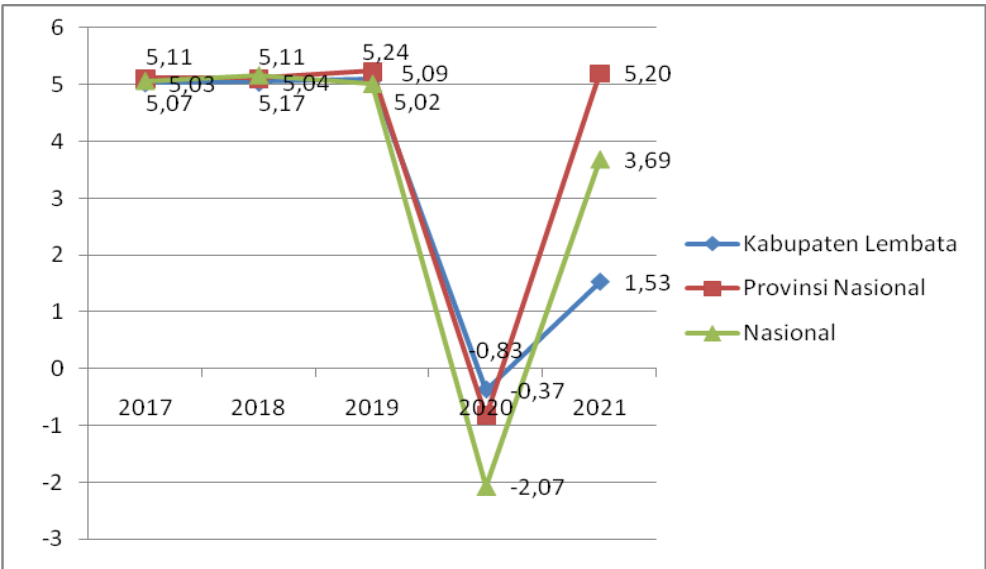
a. Pertumbuhan PDRB

Tabel II.16
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata, 5 Tahun terakhir sbb:

No	Tahun	Lembata (%)	NTT	NASIONAL
1	2	3	4	5
1	2017	5,03	5,11	5,07
2	2018	5,04	5,11	5,17
3	2019	5,09	5,24	5,02
4	2020	-0,37	-0,83	-2,07
5	2021	1,53	5,20	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Grafik II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Tabel II.18 dan laju pertumbuhan ekonomi pada Grafik II.1 tersebut di atas, maka perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata mengikuti angka pertumbuhan ekonomi NTT dan nasional.

PDRB Kabupaten Lembata menurut lapangan usaha Tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel II.17 berikut ini.

Handwritten signature



Tabel II. 17
PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017–2020 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku				Harga Konstan			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	549,93	596,14	633,48	638,65	352,29	365,89	380,65	381,13
B	Pertambangan dan Penggalian	7,55	7,97	8,32	8,50	5,26	5,48	5,66	5,75
C	Industri Pengolahan	3,39	3,66	4,02	3,80	2,27	2,38	2,55	2,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,38	1,61	1,63	1,90	0,99	1,11	1,12	1,31
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	0,55	0,58	0,60	0,61	0,40	0,42	0,44	0,45
F	Konstruksi	115,25	129,94	143,85	126,79	72,48	78,66	82,95	73,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114,05	126,95	139,69	130,23	71,26	76,40	81,88	73,78
H	Transportasi dan Pergudangan	42,43	45,51	48,27	43,33	31,58	33,46	34,94	31,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	4,45	4,83	3,62	2,59	2,88	3,10	2,33
J	Informasi dan Komunikasi	104,85	111,18	117,88	124,50	89,82	93,92	98,97	105,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,46	6,91	7,31	7,93	4,32	4,43	4,58	5,01
L	Real Estate	26,53	28,41	28,67	27,10	17,29	18,22	18,32	17,43
M	Jasa Perusahaan	1,12	1,18	1,22	0,71	0,72	0,73	0,75	0,42
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	452,05	495,99	537,04	554,96	304,98	322,48	341,39	354,83
O	Jasa Pendidikan	115,03	120,55	131,41	134,48	72,94	74,53	78,40	78,49
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,09	26,27	28,55	30,60	16,15	16,95	17,88	18,31
Q	Jasa Lainnya	17,55	18,75	20,05	16,83	11,93	12,60	13,39	11,02
Produk Domestik Regional Bruto		1.586,16	1.726,06	1.856,81	1854,54	1.057,25	1.110,55	1.166,98	1.162,63

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Perkiraan pertumbuhan ekonomi sesuai proyeksi Provinsi yaitu 4,5%-5% maka PDRB Kabupaten Lembata berdasarkan lapangan usaha akan meningkat.

Jika dilihat dari kontribusi per sektor lapangan usaha baik itu pembentuk PDRB ADHB maupun ADHK, tahun 2020 masih didominasi oleh sektor-sektor primer dan basis yang menjadi andalan setiap tahunnya yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan lapangan usaha informasi dan komunikasi. Untuk gambaran kontribusi per sektor PDRB menurut Lapangan Usaha selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Handwritten signature



Tabel II. 18
Kontribusi per Sektor pada PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017–2020

		Harga Berlaku (%)				Harga Konstan (%)			
LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,67z	34,54	34,12	34,44	33,32	32,95	32,62	32,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,46	0,45	0,46	0,50	0,49	0,49	0,49
C	Industri Pengolahan	0,21	0,21	0,22	0,20	0,21	0,21	0,22	0,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,27	7,53	7,75	6,84	6,86	7,08	7,11	6,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,19	7,35	7,52	7,02	6,74	6,88	7,02	6,35
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,64	2,60	2,34	2,99	3,01	2,99	2,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,26	0,26	0,20	0,24	0,26	0,27	0,20
J	Informasi dan Komunikasi	6,61	6,44	6,35	6,71	8,50	8,46	8,48	9,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,40	0,39	0,43	0,41	0,40	0,39	0,43
L	Real Estate	1,67	1,65	1,54	1,46	1,64	1,64	1,57	1,50
M	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,04	0,07	0,07	0,06	0,04
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	28,50	28,74	28,92	29,92	28,85	29,04	29,25	30,52
O	Jasa Pendidikan	7,25	6,98	7,08	7,25	6,90	6,71	6,72	6,75
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,52	1,54	1,65	1,53	1,53	1,53	1,57
Q	Jasa Lainnya	1,11	1,09	1,08	0,91	1,13	1,13	1,15	0,95
Produk Domestik Regional Bruto		1.586,16	1.726,06	1.856,81	1854,54	1.057,25	1.110,55	1.166,98	1.162,63

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2021

b. PDRB per Kapita

Tabel II. 19
PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	2	3
1	2017	11,54
2	2018	12,79
3	2019	13,36
4	2020	13,64
5	2021	14,43

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita digunakan untuk mengukur produktivitas masyarakat. Kekayaan/pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lembata pada Tahun 2020, didapat melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 dibagi dengan jumlah penduduk

Handwritten signature

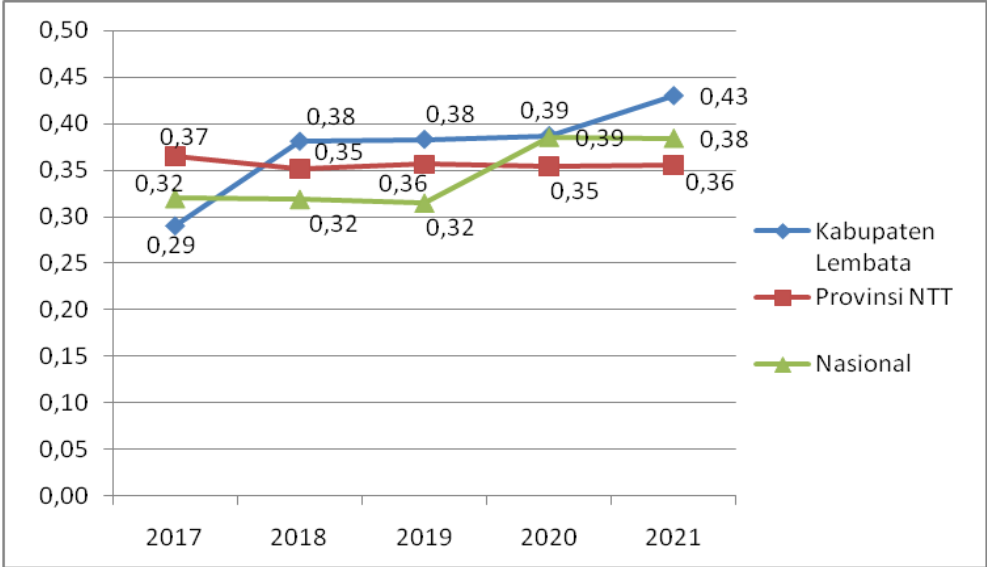


pertengahan tahun 2021. Pada tahun 2021 PDRB perkapita adalah sebesar Rp.14,43 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp.13,64 juta rupiah.

c. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien Gini antara 0-1. Jika Indeks Gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan maksimal, jika 0 maka ketimpangan tidak terjadi. Dengan demikian semakin kecil Indeks Gini, semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik II. 2
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2021

d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata mengalami kenaikan sejak Tahun 2016 hingga mencapai angka 38.800 pada Tahun 2021, walaupun secara persentase mengalami penurunan sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II. 20
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2016	309.992	35.180	26,26
2017	335.693	36.260	26,48
2018	353 957	36.950	26,45
2019	359 792	37.460	26,30
2020	388.577	37.920	26,14
2021	-	38.800	26,21

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Handwritten signature



e. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Lembata selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel II. 21 sebagai berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Lembata
Tahun 2017-2021

Tahun	Inflasi
2017	-
2018	-
2019	0,57
2020	-0,29
2021	0,16

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

1) Angka Melek Huruf

Tabel II. 22
Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Melek Huruf (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian angka melek huruf penduduk Kabupaten Lembata pada tahun 2017-2021 menunjukkan prosentase terbaik, yaitu 100.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel II. 23
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lembata

No	Tahun	Jumlah
1	2017	7,56
2	2018	7,95
3	2019	7,93
4	2020	7,95
5	2021	8,01

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Handwritten signature



b. Kesehatan

Capaian indikator kesehatan ditunjukkan oleh indikator angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, presentase balita gizi buruk dan data stunting kabupaten Lembata Lembata adalah sebagai berikut.

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel II. 24
Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	985.45	994,30	987	988	989,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun mengalami trend fluktuatif dengan rata rata angka kematian sebanyak 12 bayi/1000 kelahiran.

2) Angka Harapan Hidup

Tabel II. 25
Tabel Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	66	66,6	66,0	64,1	67,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Angka harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Lembata memiliki harapan hidup menurun terutama pada tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel II. 26
Perbandingan IPM Lembata, NTT dan Indonesia Tahun 2021

Wilayah/Daerah	IPM
Indonesia	72,29
NTT	65,23
Lembata	64,75

Sumber : Data Proyeksi, Tahun 2022

4) Persentase Balita Gizi Buruk

Tabel II. 27
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Balita Gizi Buruk	1.15	1,14	1,80	1,84	1,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Handwritten signature



Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan yang berarti status gizi balita di Lembata masih rendah.

5) Angka Balita Pendek (Stunting)

Angka Balita Pendek (*Stunting*) berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Lembata tahun 2021 dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 28
Data Stunting Kabupaten Lembata

Nama Puskesmas	Pendek (bulan)				Sangat Pendek (bulan)			
	0-23		24-59		0-23		24-59	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Wairiang	11	10	19	13	24	25	47	36
Balauring	18	7	18	13	6	3	13	5
Hadakewa	8	1	11	3	4	0	3	7
Lamaau	12	10	56	57	38	23	25	17
Waipukang	10	5	24	25	3	4	9	4
Lewoleba	32	23	35	38	39	27	21	9
Loang	28	23	58	63	47	41	42	33
Waiknuit	5	11	27	21	9	7	16	13
Wulandoni	3	2	44	27	33	26	55	41
Total	127	92	292	260	203	156	231	165

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah balita stunting di Kabupaten Lembata pada tahun 2021 sebanyak 1.526 bayi dengan rincian, kategori pendek sebanyak 771 bayi atau 50,52 % dan kategori sangat pendek sebanyak 755 bayi atau 49,48 %. Kondisi ini sejalan dengan data Persentase Gizi Balita Gizi Buruk.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Penerapan standar pelayanan minimal dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kabupaten Lembata telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat Peraturan yang dituangkan dalam peraturan Bupati maupun keputusan Bupati untuk masing-masing urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

fu



Tabel II. 29

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lembata Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
1	Bidang Urusan Pendidikan					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Tercapainya tingkat perkembangan anak mencakup materi dan kompetensi 2. Tercapainya standar isi yang menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan standar PAUD 3. Standar proses mencakup kriteria proses pembelajaran untuk pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan usia 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Program: Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan: 1. Pembangunan Ruang Kelas yang Layak 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain yang Layak 3. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 4. Pembangunan Alat Praktik dan Peraga yang Memadai 5. Pengadaan Meubeler Sekolah 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah 8. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 9. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 10. Penyelenggaraan hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Lembata 11. Pendampingan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	85	90	
				90	95	
				90	95	
				85	90	

h



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		5. Standar sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan PAUD secara holistik dan integrative	12. Kegiatan Akreditasi PAUD Formal dan Non Formal	75	80	
		6. Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pada lembaga PAUD	13. Kegiatan Diklat Calon Pengawas PAUD	90	95	
		7. Standar pembiayaan mencakup komponen dan besaran biaya personal serta operasional		80	85	
		8. Standar penilaian mencakup tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan usia anak		90	95	
2.	Pendidikan Dasar					
	1) Pendidikan SD/MI	1. Ketersediaan Kurikulum Nasional	Program; Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar 9 Tahun	Ada	Ada	
		2. Keteralaksanaan Kurikulum Nasional	Kegiatan;	100	100	
		3. Persentase kelulusan SD	1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan	100	100	
				85	90	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		4. Persentase Uji Sampel mutu pendidikan standar nasional (TKD dan TPM)	Asrama			
		5. Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	2. Pembangunan Ruang Kelas yang Memadai	Ada	Ada	
		6. Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	3. Pembagunan Ruang Guru/Admistrasi Sekolah yang Memadai	Ada	Ada	
		7. Persentase daya serap standar kurikulum tingkat satuan pendidikan	4. Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	85	90	
		8. Angka Partisipasi Kasar	5. Pembagunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	119	92,2	
		9. Angka Partisipasi Murni	6. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	90	76,04	
		10. Angka pendaftaran siswa 7-12 tahun	7. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	100	100	
		11. Angka Putus Sekolah	8. Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Siswa yang Memadai	0,05	0,07	
		12. Angka mengulang kelas	9. Pengadaan Meubeler Sekolah yang Memadai	3	3	
		13. Survival Rate	10. Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Asrama Siswa	Meningkat	Meningkat	
		14. Persentase kelulusan	11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	100	
		15. Kinerja Kepala Sekolah	12. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Baik	Baik	
		16. Kinerja Guru	13. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SD/MI	Baik	Baik	
			14. Seleksi Olimpiade MIPA Tingkat SD/MI			
			15. Bantuan Dana Operasional Sekolah			



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		17. Persentase guru berkualifikasi	16. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	85	90	
		18. Persentase guru berkeahlian	17. Penyediaan Biaya Operasional DAK dan Dana Bantuan Pemerintah Bidang Pendidikan	60	70	
		19. Rasio guru dan peserta didik	18. Kegiatan Diklat Pembelajaran Guru Mata Pelajaran	1:30	1:30	
		20. Tenaga Tata Usaha Sekolah	19. Kegiatan Diklat Supervisi Akademik dan Manajerial	1 Orang	1 Orang	
		21. Tenaga Perpustakaan Sekolah		1 Orang	1 Orang	
		22. Penjaga Sekolah		1 Orang	1 Orang	
		23. Lahan		95	95	
		24. Bangunan		85	90	
		25. Peralatan/Lab/Media/UKS/ Perpustakaan		Ada	Ada	
		26. Buku teks peserta didik		1:01	1:01	
		27. Sarana Olahraga		Ada	Ada	
		28. Infrastruktur		Ada	Ada	
		29. Struktur		Ada	Ada	
		30. Personalia		Ada	Ada	
		31. Uraian Tugas		Ada	Ada	
		32. Anggaran Pemerintah		Ada	Ada	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		33. Anggaran Swadaya		Ada	Ada	
		34. Pengelolaan Dana Pendidikan		Ada	Ada	
		35. Tingkat kehadiran guru		95	96	
		36. Tingkat kehadiran tenaga administrasi		95	96	
		37. Tingkat kehadiran siswa		95	96	
		38. Tertib administrasi		95	96	
		39. Kinerja sekolah (akreditasi)		Baik	Baik	
	2) Pendidikan SMP/MI	1. Ketersediaan Kurikulum Nasional	Program; Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jenjang SMP/MTs Kegiatan; 1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Asrama 2. Pembagunan Ruang Kelas 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 4. Pembangunan Gedung Perpustakaan sekolah	Ada	Ada	
		2. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional		90	90	
		3. Keterlaksanaan Kurikulum Lokal		90	90	
		4. Kriteria Kenaikan Kelas dan Ketamatan		Ada	Ada	
		5. Angka Partisipasi Kasar		87,63	149,76	
		6. Angka Partisipasi Murni		49,88	61,62	

h



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		7. Angka Mengulang 8. Kelangsungan Belajar Siswa 9. Angka Putus Sekolah 10. Persentase Kelulusan 11. Kinerja Kepala Sekolah	5. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 6. Pengadaan Alat Peraga dan Praktek Siswa 7. Pengadaan Meubeler Sekolah 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah/Ruang Administrasi Sekolah 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Menurun Meningkat 2,13 100 Baik	Menurun Meningkat 30,00 100 Baik	
		12. Persentase Guru Berkualifikasi 13. Persentase Guru Berkualitas 14. Persentase Karyawan Berkeahlian 15. Rasio Guru dengan Siswa 16. Lahan 17. Bangunan 18. Perabot 19. Peralatan Lab/Media 20. Rasio Buku Teks dengan Siswa 21. Sarana Olahraga	11. Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs 12. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang SMP/SMP ATAP 13. Pra Olimpiade MIPA Tingkat SMP/MTs 14. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah 15. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 16. Penyediaan Biaya Operasional DAK dan Dana Bantuan Pemerintah Bidang Pendidikan 17. Bantuan Operasional Sekolah	85 85 85 1:28 Cukup Lengkap Lengkap Lengkap 1:01 Lengkap	87 88 80 1:088 Cukup Lengkap Lengkap Lengkap 1:014 Lengkap	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		22. Infrastruktur		Lengkap	Lengkap	
		23. Struktur Organisasi		Ada	Ada	
		24. Personalia		Ada	Ada	
		25. Uraian Tugas		Ada	Ada	
		26. Mekanisme Kerja		Baik	Baik	
		27. Anggaran Pemerintah		Ada	Ada	
		28. Anggaran Swadaya		Ada	Ada	
		29. Komponen yang dibiayai		Seluruhnya	Seluruhnya	
		30. Pemahaman Visi dan Misi Sekolah		Baik	Baik	
		31. Tingkat Kehadiran Guru		90	95	
		32. Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi		90	95	
		33. Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan Lainnya		90	95	
		34. Tingkat Kehadiran Siswa		90	95	
		35. Tertib Administrasi		90	95	
		36. Kinerja Sekolah		Baik	Baik	

fu



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		37. Dukungan Badan Peran serta Masyarakat/Komite Sekolah		Ada	Ada	
		38. Perhatian Orang Tua		Ada	Ada	
		39. Peran serta Tokoh Masyarakat		Ada	Ada	
		40. Peran serta Dunia Usaha/Industri		Ada	Ada	
	3) Pendidikan Kesetaraan	1. Tercapainya Penduduk Usia Produktif (5-44 Tahun) bisa membaca dan menulis	Program; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	100	
		2. Tercapainya Jumlah Orang Buta Aksara dalam Kelompok Usia 15-44 Tahun Tidak Melebihi 7%	Kegiatan; 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	2	0	
		3. Jumlah Orang Buta Aksara dalam Kelompok Usia di atas 44 Tahun tidak melebihi 30 persen	2. Pelatihan bagi Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	5	0	
		4. 95% Peserta Didik yang mengikuti Ujian Akhir Program Paket A Setara	3. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	75	75	
		5. 95% Peserta Didik yang mengikuti Ujian Akhir Program Paket B Setara	4. Penetapan Angka Kredit	75	75	
		6. 80% Peserta Didik yang mengikuti Ujian Akhir Program	5. Pendidikan Pelatihan Calon Pengawas SD dan SMP	75	75	

h



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
		Paket C Setara 7. 80% Peserta Didik yang Mengikuti Secara Tuntas		75	75	
2	Bidang Urusan Kesehatan					
1.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Program; Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan; Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			
	1. Kesehatan Ibu hamil	Persentase Kunjungan Ibu hamil K4		84	71,57	
	2. Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tanaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebinanan		100	94,41	
	3. Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100	95,21	
	4. Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95	81,57	
	5. Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		98	49,81	
	6. Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar		85	68,81	
	7. Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar		75	39,89	
	8. Kesehatan Penderita	Persentase penderita hipertensi		70	64,12	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
	Hipertensi	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard				
	9. Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard		60	40,65	
	10. Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan		60	72,27	
	11. Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard		100	33,84	
	12. Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/Preventif	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard		60	58,28	
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Program; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	97,11	71,31	



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk kota yang padat dan rawan sanitasi agar mendapat layanan pengelolaan air limbah yang aman untuk terhindar dari timbulnya penyakit berbasis air limbah.	Kegiatan; 1. Pengembangan Distribusi Air Minum 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 3. Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih	Indikator ini Tidak dilaksanakan di Dinas		
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.	Penyediaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Presentase rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan relokasi program pemerintah	Program; Pengembangan Perumahan Kegiatan; 1. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	1.460	388	
2.	Pelayanan Sistem Air Limbah yang Memadai	Jumlah sarana layanan sistem air limbah	Program; Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	40,00	35,76	
3.	Pelayanan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	Program; Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	7,00	4,00	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
5	Bidang Urusan Ketenteraman, Kertertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program; Kenteraman dan Kerterban Umum Kegiatan; 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Polisi Pamong Praja 2. Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 3. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah 4. Kegiatan Penegakan Disiplin PNS 5. Operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 6. Pengamanan dan Pegawalan Pejabat 7. Patroli Kota dan Pengamanan Tempat/Kondisi Tertentu 8. Pembinaan dan Pengawasan dan Penyeluhan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 9. Penyelidikan dan Penyidikan 10. Pembinaan dan Pengawasan PPNPNS	56	56	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Program; Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan;	54	54	

h



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
			1. Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Jumlah Pembinaan Petugas Linmas			
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program; Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan; 1. Pendidikan, Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 2. Penerimaan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran 3. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 7. Peningkatan dan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 8. Monitoring dan Pengawasan Daerah Rawan Kebakaran	90	90	
6	Bidang Urusan Sosial					
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar	Presentasi Pelayanan Bantuan ke	Program;	87	85,78	



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
	Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	Penyandang Cacat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Persentase Pelayanan Bantuan kepada anak terlantar, pekerja sosial	Kegiatan; 1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal 2. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk bagi Korban Bencana Lainnya 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana dan Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 4. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar biasa 5. Fasilitasi Upaya Perlindungan, Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pemulangan Migran Bermasalah	87	82,83	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Presentase Pelayanan Bantuan kepada para Gelandangan dan Pengemis yang memiliki Kompetensi		87	0	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Pelayanan Bantuan kepada Warga Negara Korban Bencana	Program; Pelayanan Bantuan Sosial Kegiatan; 1. Pengadaan Pangan Beras 2. Pedampingan Program Keluarga harapan	87	92,30	

h



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Ket.
			3. Sosialisasi Program BPJS 4. Fasilitasi Penyaluran Rastra 5. Pendampingan Program Bantuan Pemerintah Non Tunai			

h



2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak per 100 persen jumlah anak usia 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II. 30
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini
1.	2017	5,54
2.	2018	98,82
3.	2019	46,68
4.	2020	39,87
5.	2021	21,95

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2022

b. Angka Partisipasi Sekolah

Tabel II. 31
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI/Paket A	-	-	587,67	563,22	556,48
2.	SMP/MTs/Paket B	-	-	557,04	547,77	684,21

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2021

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan di kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 32
Presentase Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Pendidikan yang di Tamatkan	1,47	3,56	1,47	1,47	2,90

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

d. Angka Partisipasi Murni

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Berikut gambaran APM Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021.

Handwritten signature



Tabel II. 33
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lembata

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	83,55	83,66	81,25	79,55	76,04
SMP/Paket B	62,68	65,40	70,37	61,62	63,62
SMA/SMK/MA/Paket C	10,12	61,55	10,12	10,88	61,83

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

e. Angka Putus Sekolah

Usia putus sekolah meningkat sesuai dengan jenjang pendidikan dikarenakan semakin tinggi tingkatan sekolah, maka biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan akan semakin banyak.

Diagram II. 1
Angka Putus Sekolah



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lembata, Tahun 2022

f. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ketersediaan sekolah dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar sebagai berikut.

Tabel II. 34
Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pendidikan dasar
1.	2017	84,98
2.	2018	86,98
3.	2019	84,98
4.	2020	86,98
5.	2021	87,46

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2022

Handwritten signature



g. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindasikan ketersediaan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai pengajaran. Rasio guru terhadap murid dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II. 35
Rasio Guru terhadap Murid

No.	Tahun	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	2017	129,060
2.	2018	129,060
3.	2019	129,060
4.	2020	129,060
5.	2021	268,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2022

h. Fasilitas Pendidikan

Gambaran fasilitas pendidikan di kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 36
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan

No	Fasilitas Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	179	159	139	158
2.	Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	85	55	52	58	58

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Dari tabel di atas diketahui fasilitas pendidikan Sekolah SD/MI di tahun 2017 terdapat 95 bangunan dalam kondisi baik dan semakin bertambahnya fasilitas pendidikan di tahun 2018 berjumlah 179 bangunan dalam kondisi baik. Kemudian fasilitas pendidikan berkurang di tahun 2019 berjumlah 159 bangunan dalam kondisi baik dan di tahun 2020 fasilitas pendidikan berkurang lagi berjumlah 139 bangunan dalam kondisi baik dan di tahun 2021 fasilitas pendidikan sekolah SD/MI bertambah menjadi 158 bangunan dalam kondisi baik.

Sedangkan fasilitas pendidikan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di tahun 2017 terdapat 85 bangunan dalam kondisi baik dan semakin berkurang fasilitas pendidikan di tahun 2018 berjumlah 55 bangunan dalam kondisi baik. Kemudian fasilitas pendidikan berkurang lagi di tahun 2019 berjumlah 52 kondisi bangunan yang baik dan di tahun 2020 fasilitas



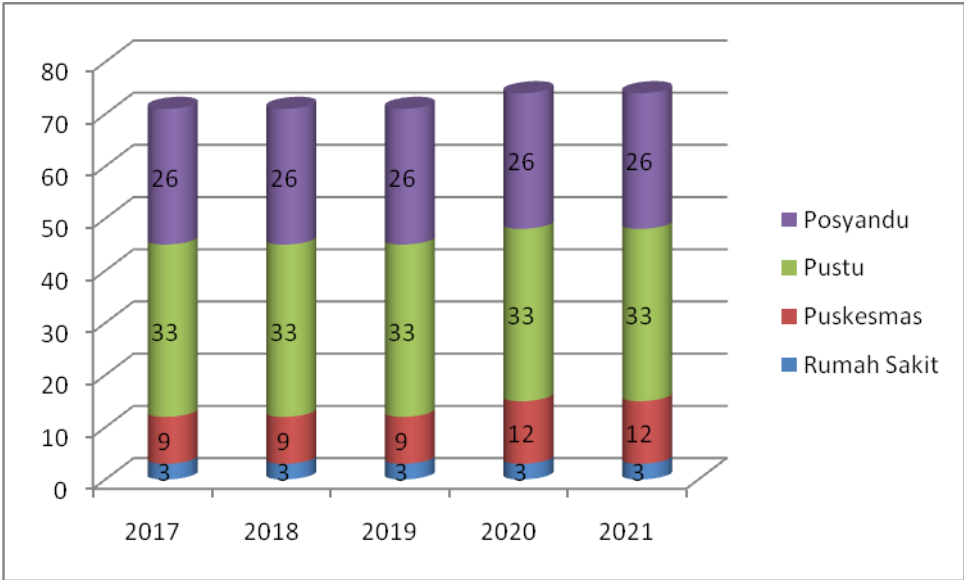
pendidikan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA bertambah menjadi 58 bangunan dalam kondisi baik dan di tahun 2021 fasilitas pendidikan tetap menjadi 58 bangunan dalam kondisi baik. Dengan semakin baik fasilitas penunjang pendidikan maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lembata.

2. Kesehatan

Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dalam usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Lembata telah memiliki puskesmas beserta tenaga medisnya untuk melayani masyarakat di masing-masing kecamatan. Terdapat 9 Puskesmas di masing-masing kecamatan, 10 apotek yang sebagian besar berada di kecamatan Nubatukan, 32 Pustu di setiap kecamatan, 1 poliklinik di kecamatan Atadei, selain itu juga terdapat 1 RSUD dan 2 rumah sakit swasta yang siap melayani kesehatan masyarakat.

Jumlah fasilitas kesehatan semakin meningkat namun jumlah tenaga medis yang tersedia masih belum mencukupi, terutama tenaga dokter. Pada tahun 2021, di Kabupaten Lembata hanya terdapat 20 orang dokter umum, 3 orang dokter spesialis, dan 1 orang dokter gigi. Sehingga seringkali pasien harus rujuk ke daerah lain karena kurangnya tenaga dokter di Kabupaten Lembata.

Diagram II. 2
Fasilitas Kesehatan



Sumber : Lembata dalam angka, Tahun 2022

fu



Tabel II. 37
Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	28,98	30,68	31,34	33,35	33,35
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	5,05	4,96	4,96	4,96	4,96
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2,61	2,19	2,19	2,19	2,19
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	19,31	23,36	27,00	25,54	26,13
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,97	1,14	1,80	1,84	1,84
Rasio pustu per satuan penduduk	5,05	4,96	4,96	4,96	4,96
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	43,50	26,90	51,90	54,00	54,00
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	85,30	84,70	90,60	97,92	97,92
Cakupan desa, kelurahan / UCI	65,56	58,30	72,19	70,90	70,90
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	68,00	100	100	100	100
Penemuan dan penanganan penderita TBC DTA	100	100	66	97,10	97,10
Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,690	2,625	227	1,116	2,139
Jumlah posyandu	315	315	315	315	315
Jumlah dokter	26	32	37	35	35
Jumlah puskesmas	9	9	9	12	12
Jumlah pustu	33	33	33	33	33
Jumlah Poskesdes	26	26	26	26	26

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lembata, Tahun 2022

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 38
Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	985.94	985.45	994,30	987	988

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2021

b. Angka harapan Hidup

Angka usia harapan hidup bayi di kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 39
Tabel Angka harapan Hidup Bayi Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka harapan Hidup Bayi	66	66,6	66	64,1	67,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Handwritten signature



c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 40

Tabel Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	% Balita Gizi Buruk	0.30	1.15	1,14	1,80	1,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2021

d. Angka Balita Pendek (Stunting)

Angka Balita Pendek (*Stunting*) berdasarkan jenis kelamin kabupaten Lembata tahun 2020 Ini disajikan pada tabel di bawah ini.

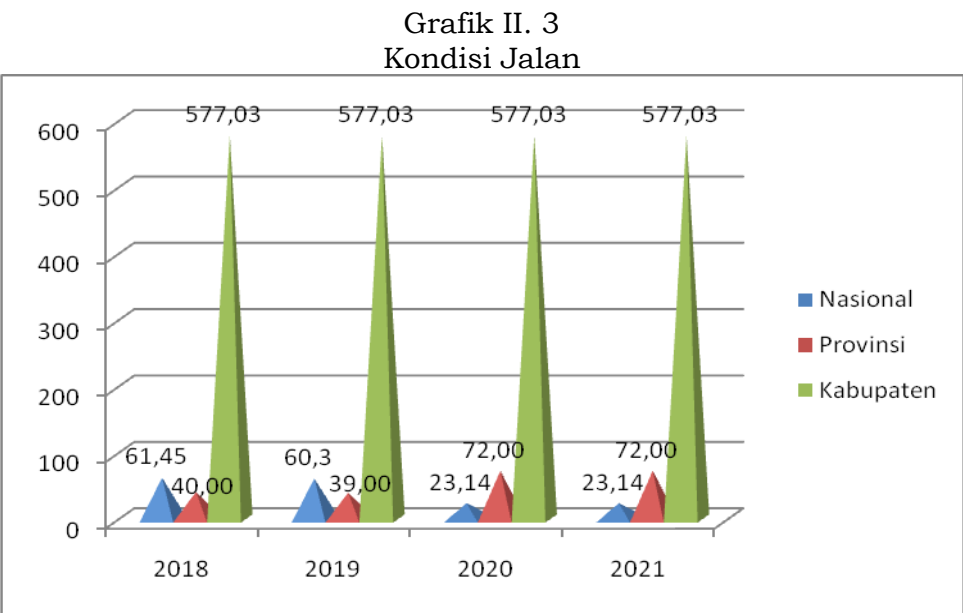
Tabel II. 41

Data Stunting Kabupaten Lembata

No.	Puskesmas	September			Oktober		
		Pendek	Sangat Pendek	Total	Pendek	Sangat Pendek	Total
1.	Waijarang	232	35	267	217	49	266
2.	Balauring	286	91	377	320	81	401
3.	Hadakewa	45	33	78	56	26	82
4.	Lamaau	21	5	26	21	3	24
5.	Waipukang	111	12	123	8	9	17
6.	Lewoleba	268	132	400	230	82	312
7.	Loang	84	14	98	81	8	89
8.	Waikenut	87	33	120	87	34	121
9.	Wilandoni	108	25	133	94	19	113

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang



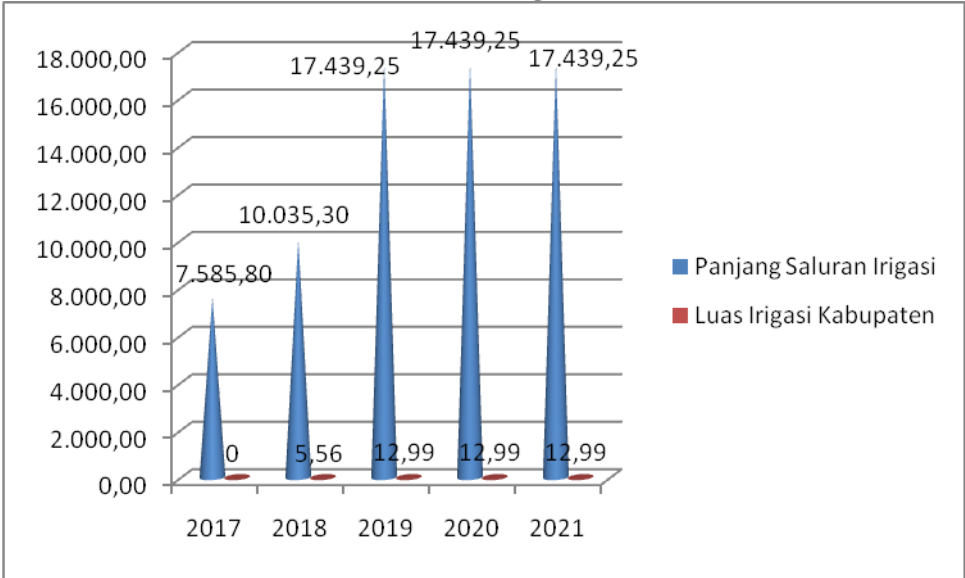
Sumber : Dinas PUPR Kab. Lembata, Tahun 2021

Handwritten signature



Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semakin baik setiap tahunnya. hal ini ditandai dengan meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik serta panjang dan luas irigasi. Namun demikian secara kualitatif masih rendah karena masih banyak jalan yang rusak ringan dan rusak berat, dari keseluruhan jalan yang ada di kabupaten lembata terdapat 39.29 % jalan nasional dalam keadaan rusak, 46,23 % jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 76,64 % jalan kabupaten dalam kondisi rusak.

Grafik II. 4
Kondisi Irigasi



Sumber : Dinas PUPR Kab. Lembata, Tahun 2022

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2021, sekitar 92 % rumah tangga di Kabupaten Lembata memiliki rumah dengan status milik sendiri. Sedangkan rumah tangga yang belum memiliki rumah dengan status milik sendiri sebesar 8% yang di antaranya adalah rumah kontrak/sewa sebesar 3,45 %, rumah bebas sewa sebesar 5,16 % dan rumah dinas sebesar 1,15 %.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan kondisi tempat tinggalnya. Pada tahun 2021, sekitar 95,72 % rumah tangga di Kabupaten Lembata menggunakan seng sebagai atap terluas pada tempat tinggalnya. Sementara itu, rumah tangga dengan tembok sebagai dinding terluas pada tempat tinggalnya sebesar 67,24 %, sisanya yang menggunakan bambu/anyaman bambu/kayu/lainnya sebesar 32,76 %. Untuk jenis lantai, rumah tangga yang jenis lantai terluas pada tempat tinggalnya masih berupa tanah sebesar 21,83 %,sedangkan yang sudah tidak berupa tanah seperti semen,keramik atau lainnya mencapai 78,17 %.

Pada tahun 2021 sekitar 93,25 % rumah tangga di Kabupaten Lembata sudah menggunakan listrik. Dimana 91,41 % diantaranya menggunakan listrik PLN dan 1,84 % sisanya menggunakan listrik non PLN. Persentase rumah tangga

Handwritten signature



yang belum teraliri listrik masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,75 %. hal tersebut disebabkan di Kabupaten Lembata masih terdapat desa-desa terpencil yang sulit dijangkau.

Untuk permasalahan air minum sebanyak 7,55 % rumah tangga menggunakan sumber air minum dari kemasan/isi ulang, sebanyak 27,91 % rumah tangga menggunakan sumber air minum dari air ledeng meteran/eceran,11,3 % rumah tangga menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung/tak terlindung, 31,79 % rumah tangga menggunakan sumber air minum dari mata air terlindung/tak terlindung, sedangkan sebanyak 21,41 % rumah tangga menggunakan sumber air minum dari air permukaann/air hujan/lainnya.

Dapat dilihat bahwa sebagian besar sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Kabupaten Lembata berasal dari mata air terlindung/tak terlindung. Sementara itu, persentase penggunaan sumber air minum dari air permukaan/air hujan oleh rumah tangga masih tinggi. hal tersebut masih harus menjadi perhatian dikarenakan sumber air minum tersebut belum tentu sepanjang waktu ada dan masih perlu dilakukan uji kesehatan dari sumber air tersebut.

Tabel II. 42
Persentase Rumah tangga menurut Fasilitas Perumahan Tahun 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja
A.	Sumber Penerangan	
1.	Listrik PLN	91,41
2.	Listrik Non PLN	1,84
3.	Bukan Listrik	6,75
B.	Sumber Air Minum	
1.	Air Kemasan / Isi Ulang	7,55
2.	Ledeng Meteran / Eceran	27,91
3.	Sumur Terlindung / Tak Terlindung	11,33
4.	Mata Air Terlindung / Tak Terlindung	31,79
5.	Air Hujan / Air Permukaan / Lainnya	21,42

Sumber: SUSENAS Maret 2021

Salah satu sanitasi yang cukup penting peranannya adalah penyediaan sarana jamban. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan tinja yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik merupakan fasilitas rumah tinggal yang berkait erat dengan hal tersebut. Sekitar 86,53 % rumah tangga di Kabupaten Lembata memiliki tempat pembuangan akhir tinja ditangka septik/IPAL sedangkan sisanya di lubang tanah atau tempat terbuka lainnya.

fu



Tabel II. 43
Kondisi Perumahan Di Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	65,38	66,69	68,51	70,93	73,00
2	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	54,38	54,69	56,51	59,93	62,12

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2022

Tabel II. 44
Persebaran Rumah Layak Huni di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Sudah Diperbaiki					JLH
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Omesuri	3.001	0	20	30	128	5	183
2	Buyasuri	1.931	0	20	0	30	25	75
3	Ile Ape	865	260	0	115	0	0	375
4	Ile Ape Timur	714	0	0	0	15	0	15
5	Lebatukan	975	0	0	10	90	0	100
6	Nubatukan	1.277	305	24	150	60	102	641
7	Atadei	1.030	0	0	0	15	49	64
8	Nagawutung	1.431	0	5	150	30	0	185
9	Wulandoni	834	0	5	18	20	0	43
Jumlah		12.058	565	74	473	388	181	1.681

Sumber: Dinas Perumahan dan Pertanahan, Tahun 2022

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel II. 45
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (%)	8,98	9,99	8,69	8,32	7,88
2	Jumlah Linmas per Jumlah10.000 Penduduk (orang)	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
3	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan (%)	1.95	1.95	2	2	2
4	Penegakan PERATURAN DAERAH (%)	100	100	83,92	100	100
5	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	108	108	162	324	324
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan %)	73	70,37	72,73	87,93	100
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	0	0	0	80	100
8	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran %)	0	0	0	0	18

fu



Sumber : SatPol PP Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Dari tabel di atas didapatkan informasi bahwa Rasio Jumlah Polisi, Pos Siskamling per Jumlah Desa/ Kelurahan masih rendah.

6. Sosial

Berkaitan dengan data sosial secara umum dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka secara rinci 26 indikator PMKS di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 46
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten
Lembata Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Jumlah		Total
		L	P	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	3	4	7
2	Anak Terlantar (AT)	10	16	26
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABDH)	2	4	6
4	Anak Jalanan (AJ)	0	0	0
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	14	9	23
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AMKTK)	0	0	0
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	15	42	57
9	Penyandang Disabilitas (PD)	0	0	0
10	Tuna Susilah (TS)	0	0	0
11	Gelandangan (G)	0	0	0
12	Pengemis (PNG)	0	0	0
13	Pemulung (PMN)	2	0	2
14	Kelompok Minoritas (KM)	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	49	0	49
16	orang dengan HIV/Aids (ODHA)	26	30	56
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)	0	0	0
18	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	0	0	0
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	0	2
20	Korban Bencana Alam (KBA)	0	0	0
21	Korban Bencana Sosial (KBS)	0	0	0

Handwritten signature



No	Jenis PMKS	Jumlah		Total
		L	P	
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	427	427
23	Fakir Miskn (FM)	0	0	18.092 KK
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	0	0	0
25	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0
26	Orang Dengan Kecacatan (ODK)	103	205	308
TOTAL				19.055

Sumber: Dinsos KB Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Dari ke 26 indikator di atas diketahui bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Lembata pada tahun 2021 sebanyak 19.055 orang dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penyandang masalah kesejahteraan social sebagaimana bagan di atas.

2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Beberapa indikator capaian kinerja pada masalah ketenagakerjaan adalah mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Angka Sengketa Pengusaha, Tenaga Kerja Ditempatkan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Beberapa gambaran kondisi ketenagakerjaan tersebut di atas dapat diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 47
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,51	68,06	67,51	72,20	52,23
2	Angka Sengketa Pengusaha	52,33	63,95	89,29	71,01	37,63



	Pekerja Pertahun					
3	Pencari Kerja Ditempatkan	8,18	0,47	41	43	96
4	Angka Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,18	5,40	2,86	2,76	8,34

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2022

Tabel II. 48
Data Partisipasi Perempuan di Kabupaten Lembata
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	7,05	7.07	7,09	9,70	8,90
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	1,7	1.8	1,9	2,80	3,70

Sumber : Dinas PPPA. Kab. Lembata 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan masih sangat rendah dari tahun 2017 sampai 2021. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan bergerak dari kisaran 7.05% di tahun 2017 hingga ke angka 8.90% pada tahun 2020. Sementara itu tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta lebih rendah dibandingkan tingkat Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan.

2. Pangan

Data tentang luas panen dan jumlah produksi tanaman pangan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 49
Kondisi Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Lembata

Jenis Tanaman Pangan	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Produksi (ton)	Tingkat Produktivitas (%)	Jumlah Produksi (ton)	Tingkat Produktivitas (%)	Jumlah Produksi (ton)	Tingkat Produktivitas (%)	Jumlah Produksi (ton)	Tingkat Produktivitas (%)	Jumlah Produksi (ton)	Tingkat Produktivitas (%)
Padi	10.365	1,60	10.560	1,65	9.175	1,81	19.449,92	2,47	17.164,40	3,20
Jagung	24.255	1,98	23.251	2,20	21.866	2,56	22.342,	1,94	20.698,	1,09

Handwritten signature



							95		60	
Ubi Kayu	39.763	14,80	22.604	15,56	59.938	15,12	6.339,67	29,60	6.295,20	29,60
Kacang Tanah	1.243	1,02	494	1,05	762	1,02	258,73	1,03	497,60	0,8
Porang	0	0	0	0	0	0	0	0	2.655	88,5
Sorgum	0	0	0	0	0	0	0	0	101,80	1,92

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2022

Produktifitas tanam padi di kabupaten lembata masih sangat terbatas. hal tersebut terjawab dalam tabel terutama padi. hal tersebut berakibat pada ketersedianya program dan kegiatan kabupaten lembata terhadap program dari luar lembata secara tinggi.

3. Pertanian

Tabel II. 50
Kinerja Pertanian Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Data Luas Tanah Milik Pemerintah Daerah (ha)	10.824.238,11	10.824.238,11	10.907.144,11	10.907.144,11	10.907.177,51
2	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah berserftikat (buah)	288.597,00	288.597,00	394.531,00	394.531,00	517.367,00
3	Jumlah Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1	1	1	1	1
4	Penyelesaian Ijin Lokasi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman, Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa data luas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lembata jumlahnya meningkat pada tahun 2021 menjadi 10.907.177,51 ha dari jumlah tahun 2020 yakni 10.907.144,11 ha. Dari luas tanah milik pemerintah tersebut, tanah yang sudah memiliki sertifikat adalah sebanyak 517.367,00 buah di tahun 2021. Sementara jumlah kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan dari tahun ke tahun tetap yakni 1 kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Penertiban pendataan luas dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah ini penting dilakukan sebagai asset tetap untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah tersebut.

4. Lingkungan Hidup

Tabel II. 51
Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021

fu



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Data kerusakan lingkungan (ha)	0	0	0	43.148	43.148
2.	Kegiatan perbaikan lingkungan (Ha)	34	34	34	25	25
3.	Jumlah Kasus Lingkungan yang ada	18	12	2	24	24
4.	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani Pemda	10	5	2	10	10
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL (%)	1,00	0,95	1,00	100	100
6.	% Pengangkutan Sampah	-	-	-	37,54	20,34
7.	% Pengurangan Sampah	-	-	-	37,54	78,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lembata 2021

Presentase penanganan sampah di Kabupaten Lembata pada tahun 2021 sebesar 37,54%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 20,34%.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel II. 52
Kondisi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Lembata Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk	75,73	86,67	91,71	93,30	0
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	56,09	60,35	64,60	83,66	0
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	46,15	45,39	60,55	85,37	0
4	Kepemilikan KTP	75,73	86,67	91,71	93,30	0
5	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	34,72	43,34	49,70	54,76	0
6	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	ada	ada	ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan untuk memperkuat otonomi desa dan memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok UEP serta Desa siaga. Semakin besar rata-rata jumlah

Handwritten signature



kelompok binaan menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 53
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	151	151	151	151	151
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
3.	Jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM-MP	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557

Sumber : PMD Tahun 2021

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Begitu pula dengan kelompok binaan LPM, PKK, jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM- tidak mengalami peningkatan jumlah selama kurun waktu 2017 – 2021. Sedangkan data kemandirian kelompok tidak ada sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemandirian kelompok.

Tabel II. 54
Data Pembangunan Keluarga Berencana Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	15.751	16.985	10.915	12.044
2	Prosentase Keluarga Sejahtera	86,57	88,32	89.01	-
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	93,05	95,81	73,0	76,3

Sumber : Dinas PPKBP3PA. Kab. Lembata, Tahun 2021

Hal ini menggambarkan tentang kesadaran masyarakat untuk melaksanakan KB masih terbatas. Kinerja pembangunan KB meningkatkan setiap tahunnya yang terdiri dari peningkatan persentase objek keluarga sejahtera.

8. Perhubungan

Kondisi Perhubungan tergambar dalam beberapa indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 55
Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	102.369	279.605	166.201	10.252	10.252

fu



No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	503	606	620	587	587
3.	Jumlah Terminal/ pelabuhan laut & udara	7	8	9	9	9
4.	Jumlah Angkutan Darat	96	93	87	74	74
5.	Jml. Barang yg Terangkut Angk. Umum (Ton)	82.938	83.276	45.913	35.264	35.264

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lembata Tahun 2021

9. Komunikasi dan Informasi

Gambaran Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lembata tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 56
Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah surat kabar nasional / lokal	5	7	8	6	4
2	Jumlah siaran radio lokal aktif	0	0	0	0	0
3	Website Milik Pemda	1	1	1	1	1
4	Jumlah Menara telepon genggam	39	10	1	-1	34
5	Jumlah Menara telepon stasioner	2	1	2	3	1
6	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon	51,75	62,67	79,71	79,74	79,77

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lembata, Tahun 2022

Koordinasi dan informasi mengalami peningkatan untuk kondisi pembangunan secara indikatornya terutama jumlah surat kabar dan persentase penduduk yang menggunakan handpone.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran cakupan kinerja pembangunan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lembata pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 57
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lembata tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi berbadan Hukum	103	96	107	111	114
2	Jumlah Koperasi Aktif berbadan Hukum	69	69	50	54	52
3	Jumlah Pra Koperasi/belum badan Hukum	36	48	23	12	14

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2022

Handwritten signature



11. Penanaman Modal

Tabel II. 58
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata
Tahun 2017-2021

Indikator		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN-PMA)	4	5	4	5	5
2	Nilai Investasi	38.812.563.161	21.357.550.000	266.809.038.100	329.004.645.900	329.004.645.900
3	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	19,55%	22,67%	63,9%	63,9%	63,9%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun, 2021

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor, Nilai investasi meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2021. Peningkatan nilai investasi ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah investor yang signifikan yang menanamkan modal di Kabupaten Lembata.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel II. 59
Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Aspek kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	-
	1. Jumlah klub olahraga	60	50	50	50	50
2.	Aspek Pelayanan Umum					
	1. Jumlah organisasi olahraga	12	12	12	12	12
	2. Jumlah gedung olahraga	0	0	1	1	1
	3. Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2
	4. Jumlah kegiatan olahraga	3	3	3	3	3
	5. Jumlah lapangan olahraga	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Sumber : Disporabud Lembata Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan kondisi pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lembata masih sama. jumlah kegiatan kepemudaan

Handwritten signature



sampai tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan, jumlah kegiatan olahraga dari tahun ke tahun tetap sama, yaitu 3 kegiatan. Sementara jumlah lapangan olahraga per 10000 penduduk, kondisi tahun 2021 adalah 0,36. Pelayanan umum pada bidang ini masih menunjukkan progress sama setiap tahun. Namun pada tahun 2021 adanya penambahan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana pendukung berupa 1 buah gedung olahraga.

13. Statistik

Kondisi indikator pada bidang statistik di Kabupaten Lembata sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas, baik buku kabupaten dalam angka maupun buku PDRB Kabupaten Lembata setiap tahun selalu tersedia. Buku-buku statistik ini sangat penting diperlukan karena memuat data yang diperlukan dalam melakukan analisis baik pada semua bidang sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang termuat pada perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

14. Kebudayaan

Kondisi urusan kebudayaan di Kabupaten Lembata, dengan beberapa indikator dan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 60
Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Budaya	2	3	5	0	0
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	10	12	2	0	0
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	14	6	1	188	188

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Lembata Tahun 2021

140 jenis cagar alam yang dilestarikan. hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Lembata sementara itu festival budaya menurun karena covid-19

15. Perpustakaan

Tabel II. 61
Kondisi Kepustakaan Daerah di Kab. Lembata
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

fu



		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun	4.439	4.761	2.121	245	2.278
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	5.345	76.608	37.440	43.044	38.230

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata, Tahun 2022

Terjadi peningkatan koleksi buku di perpustakaan daerah namun hal itu tidak diikuti oleh jumlah pengunjung.

16. Kearsipan

Pembangunan Kearsipan mencakup Pengelolaan Arsip secara Baku dan Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM. Kondisi pembangunan kearsipan Kabupaten Lembata tahun 2017-2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 62
Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengelolaan arsip secara baku	0	0	0	0,17	0,17
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	0	2	1	1

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata 2021

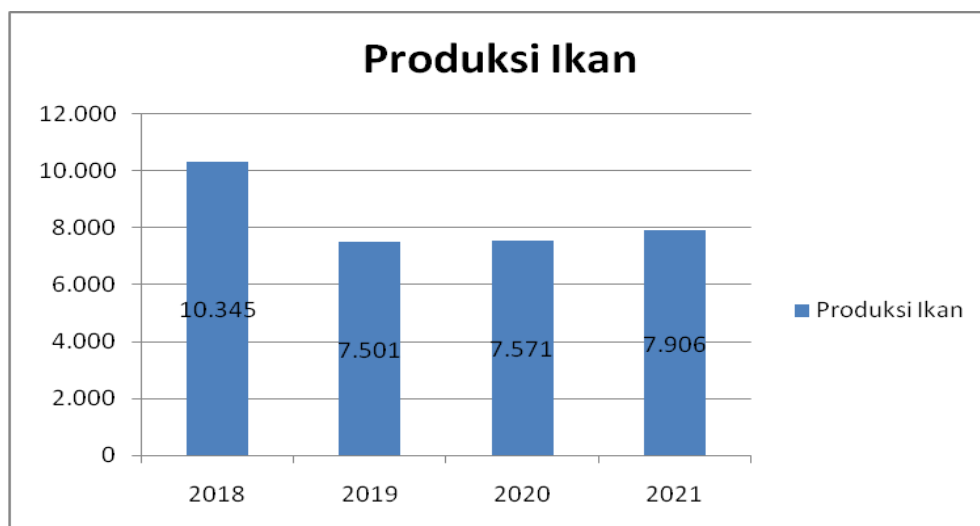
2.1.3.3. Urusan Layanan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah lautan Kabupaten Lembata mencapai 72,59% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata. Untuk dapat mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan ini, maka dapat dilihat perkembangan produksi hasil kelautan dan perikanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Diagram II. 3
Data Produksi Ikan di Kabupaten Lembata
Tahun 2018-2021

fu

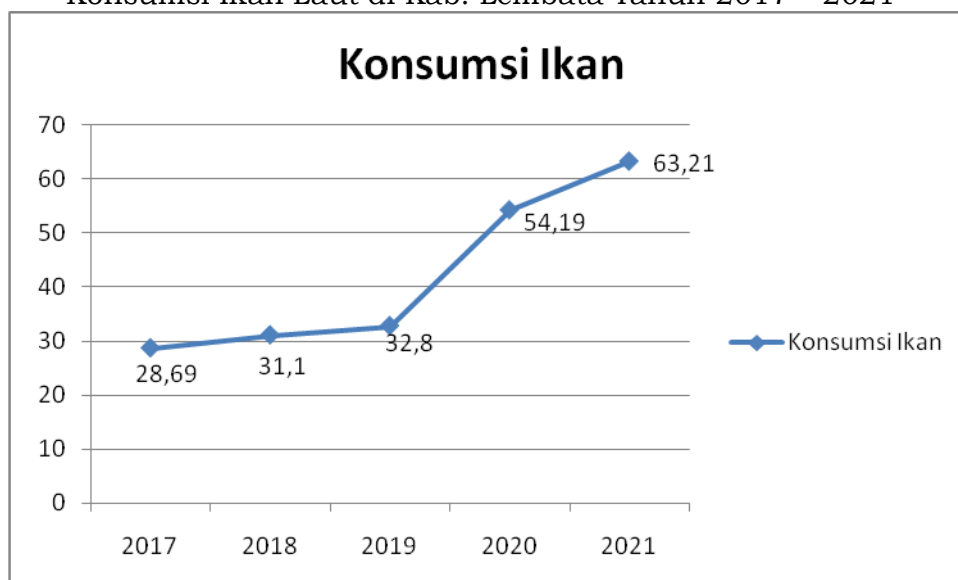


Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lembata Tahun 2022

Produksi pembebanan di kabupaten lembata didomisili perikana laut sebagaimana diagram di atas.

Selain itu, daya suka masyarakat lembata mengkonsumsi ikan setiap tahun terus mengalami peningkatan. hal ini dapat dilihat pada persentase konsumsi ikan masyarakat, sebagaimana ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik II. 5
Konsumsi Ikan Laut di Kab. Lembata Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2022

Berdasarkan grafik ini, tingkat konsumsi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahun dan sampai dengan tahun 2021, tingkat kebutuhan akan ikan sebanyak 63,21 ton/tahun. hal ini menjadi peluang bagi para nelayan untuk memnfaatkan potensi laut sebagai mata pencaharian unggulan dan terus meningkatkan produksi ikan selain pemenuhan kebutuhan masyarakat lembata, juga untuk kepentingan ekspor, sedangkan Pemeritah Daerah terus berupaya memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan nelayan.

fu



Untuk cakupan bina kelompok nelayan dan sarana prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel.

Tabel II. 63
Jumlah Nelayan dan Sarana Prasarana yang Dimiliki

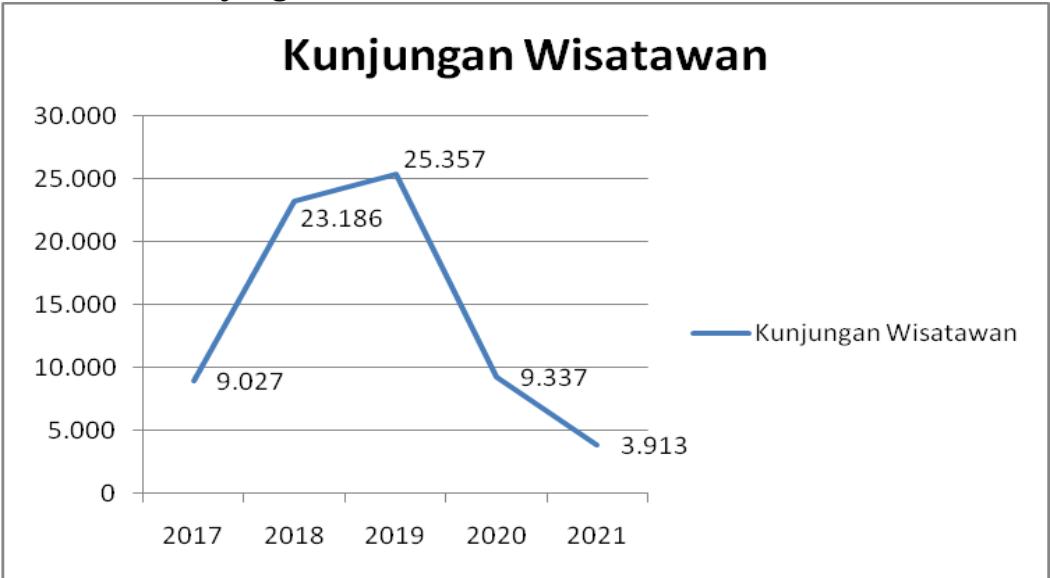
No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nelayan					
	Nelayan Penuh	994	1117	1116	1163	1163
	Nelayan Sambilan Utama	627	733	727	757	757
	Nelayan Sambilan Tambahan	865	896	909	918	918
2	Sarana/Prasarana Motor Tempel	386	355	359	367	367
	Kapal Motor < 5 GT	250	248	257	289	289
	Kapal Motor > 5 GT	56	67	68	89	89
	Perahu Tanpa Motor	986	1092	1116	1.145	1.145

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lembata Tahun 2022

2. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II. 6
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Lembata Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Tahun 2022

Dari grafik di atas diketahui jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 kunjungan wisatawan meningkat sebesar 14.159 wisatawan, sehingga menjadi 23.186 wisatawan, kemudian meningkat lagi di tahun 2019 sebesar 2.171 wisatawan, sehingga menjadi 25.357 wisatawan. Pada tahun 2020 jumlah wisata menurun sebesar 16.020 wisatawan, sehingga menjadi 9.337 wisatawan dan menurun lagi di tahun 2021 sebesar 5.424 wisatawan, sehingga menjadi 3.913

fu



wisatawan. Kondisi Covid-19 di tahun 2020 memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja pembangunan daerah. Menurunnya jumlah kunjungan wisata juga berdampak pada produktivitas UMKM, usaha jasa, perhotelan dan restoran.

Tabel II. 64
Jumlah Hotel di Kabupaten Lembata Tahun 2021

Tahun	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Non-Bintang
2016	-	-	-	-	-	6
2017	-	-	-	-	-	6
2018	-	-	-	-	-	6
2019	-	-	-	-	-	6
2020	-	-	-	-	-	7

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

3. Pertanian
a. Pertanian

Data produksi pertanian di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 65
Data Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2017-2021 (Ton)

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padi	7.844	19.402	19.365	19.449,9	19.449,9
2.	Jagung	17.942	33.724	24.255	22.348	22.348
3.	Ubi Kayu	39,763	22.294	39.763	63.396	63.396
4.	Ubi Jalar	859	856,10	974	60,29	60,29
5.	Kacang Tanah	639	1.260,39	1.243	258,73	258,73
6.	Kacang Hijau	125	17,23	149	9,25	9,25

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Tabel II. 66
Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Lembata (Ton)

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Merah	76,4	211,5	40,3	375	715
Kubis	7	-	-	-	-
Petsai/Sawi	55,8	21,1	6,3	12,4	10,7
Kacang Panjang	41	20,4	5,1	4,8	8,1
Cabe	17	16,1	31,5	15,9	6,4
Tomat	17,9	1,9	2,3	4	6,5
Terung	103,5	31,9	10,8	20	14,3
Buncis	1,8	8,8	0,8	-	0,4
Ketimun	54,4	14,1	8,2	8,9	10,7
Labu Siam	74,5	6,9	2,9	2,5	1
Kangkung	33,1	28,4	20,1	24,1	15,8
Bayam	26,6	14	9,1	11,9	9,7

Handwritten signature



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2022

Tabel II. 67
Produksi Buah-buahan (Ton)

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Alpoket	194	245,6	221	68,2	83,82
Mangga	1.269,4	1.208,4	1.259,4	77,5	243,4
Rambutan	85,9	122,2	113,4	20	170,7
Jeruk Siam/Keprook	449,8	63,1	76,8	14	32
Jambu Biji	204,7	204,7	208,7	77,5	150,2
Jambu Air	24,1	11,9	13,6	4,3	15,4
Pepaya	4.665,7	2.340,1	2.318,8	503,4	1.842,9
Pisang	4.222,2	2.603,8	1.584,9	368,7	929,3
Nenas	238,7	173,4	298,9	70	416
Salak	44,8	8,5	16,4	6,4	20,2
Nangka	699,8	884,2	1.601,1	412	435,7
Sawo	20,9	16,5	13	3,3	4,7
Belimbing	17,2	22,0	25,1	4,5	8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2022

Tabel II. 68
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Kelapa	2.538	2.569	2.571	2.582,10	2.582,50
Kopi	160,70	185,70	186,70	191,50	191,50
Cengkeh	2,00	2,00	2,30	2,50	1,20
Kakao	171,50	175,20	179,20	180,97	180,50
Jambu Mente	1.234	1.509	1.512	1.581,70	1.584,70
Pinang	78	78	84	87	77,80
Kapok	25	25	24	24	23,60

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2022

b. Peternakan

Tabel II. 69
Data Populasi Ternak di Kabupaten Lembata

NO	NAMA TERNAK	POPULASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	4.757	4.852	4.941	5.037	5.050
2	Kuda	1.437	1.463	1.488	1.513	1.502
3	Kambing	39.895	40.748	41.917	43.120	43.246
4	Domba	1.463	1.469	1.486	1.504	6.656
5	Babi	44.372	46.111	47.617	49.174	34.811
6	Unggas					
A	Ayam Kampung	130.775	132.083	133.404	134.738	134.546
B	Ayam Petelur	4.000	4.269	5.513	6.120	6.656
C	Ayam Pedaging	130.160	130.553	117.500	117.500	7.800

Handwritten signature



NO	NAMA TERNAK	POPULASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
D	Itik/Bebek	2.538	2.642	2.869	2.952	3.120

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Tabel II. 70
Data Kelompok Ternak di Kabupaten Lembata
Tahun 2017 - 2021 (Kg)

No	Kelompok Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	% Klpk Aktif
A	Jumlah Kelompok Berdasarkan Jumlah Ternak						
1	Sapi	15	23	23	25	25	17%
2	Kambing	17	17	19	19	19	12%
3	Babi	10	10	12	15	20	16%
4	Unggas	8	8	9	9	10	25%
B	1. Total	55	55	55	55	55	
	2. % Kelompok Aset						
C	Kelompok Berdasarkan Kelas Kemampuan						
	1. Pemula	50	58	63	68	74	
	2. Madya	-	-	-	-	-	-
	3. Lanjut	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2021

Tabel II. 71
Data Produksi Daging di Kabupaten Lembata (Ton)

No	Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	0,384	0,392	0,400	0,408	0,416
2	Kuda	4,94	5,11	5,20	5,29	5,25
3	Kambing	0,142	0,143	0,151	0,155	0,159
4	Babi	6,726	6,945	7,173	7,407	7,649
5	Domba	5,078	5,099	5,160	5,222	5,284
6	Ayam Buras	1,273	1,285	1,298	1,311	1,324
7	Ayam Pedaging	0,341	0,475	0,488	0,502	0,517
8	Itik	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
9	Bebek	0,086	0,091	0,096	0,102	0,108
10	Merpati	-	-	-	-	-
11	Ayam petelur	3,213	15,240	21,848	21,840	23,762

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2021

Tabel II. 72
Data Produksi Telur di Kabupaten Lembata (Ton)

NO	JENIS UNGGAS	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ayam Lokal	133,94	-	-	-	1,88
2	Ayam Petelur	3,213	15,24	21,848	21,84	0,718

Handwritten signature



3	Bebek	1,92	2,031	2,149	2,273	2,405
4	Itik	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2021

Pembagian data-data tersebut di atas, produksi pertanian mengalami flukturasi produksi setiap tahunnya. Produksi tanaman di domisili oleh padi, jagung dan ubi kayu sedangkan hortikultura di domisilo oleh manga, papaya, pisang, alvokat, mente, dan kelapa. Demikian juga dengan produksi peternakan yang di domisili oleh unggas dan babi. Produksi dan produktifitas ini antara lain di pengaruhi oleh munculnya hama dan penyakit ASF pada ternak. Disisi lainnkemudian petani dan kelompok tani tidak mengalami perubahan yang sebagaimana pada tabel.

4. Perindustrian dan Perdagangan

Tabel II. 73
Jumlah Pasar dan Kelompok Kerajinan serta UMKM di Kabupaten Lembata Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Makro	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
3.	Jumlah Pasar Tradisonal dan Senja	33	33	33	34	34
4.	Jumlah Binaan Kelompok Pengrajin	15	17	60	69	69
5.	Jumlah UMKM	90	180	90	50	50

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perindag Kab. Lembata 2021

2.1.3.4. Pendukung Urusan Pemerintahan Lainnya

Berbagai kondisi kinerja pelayanan pembentukan lainnya di jabarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 74
Nilai, Predikat dan Status AKIP

Tahun	Nilai	Predikat	Status
2015	45,25	C	Cukup
2016	45,61	C	Cukup
2017	48,46	C	Cukup
2018	48,55	C	Cukup
2019	48,63	C	Cukup

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Lembata Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instasnsi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Dari table di atas terlihat bahwa nilai AKIP Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun meningkat meskipun dengan predikat C dan status yang masih berada pada level agak kurang.

Handwritten signature



Tabel II. 75
Nilai EKPP

Tahun	Skor	Predikat
2015	2,672	Tinggi
2016	2,772	Tinggi
2017	2,768	Tinggi
2018	2,7612	Tinggi
2019	Sedang dievaluasi	Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Lembata Tahun 2021

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dari EKPPD adalah untuk menilai kinerja dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun cenderung terjadi peningkatan Nilai maupun predikat EKPPD dari Rendah ke Tinggi.

Tabel II. 76
Gambaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	TAHUN									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu
Jumlah hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata	384	101	862	218	468	129	468	129	468	129

Sumber: Inspektorat Kab. Lembata Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah hasil temuan baik administrasi maupun keuangan dari tahun 2017 sampai 2021 fluktuatif, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan kabupaten lembata dari tahun ke tahun belum mengalami perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan.

Tabel II. 77
Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Tahun
-------------------	-------

fu



	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap Pengelolaan Keu.Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : BKD Kab. Lembata Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa Opini BPK pada tahun 2017 sampai tahun 2021 terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lembata adalah WDP. Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan status WDP disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata terus melakukan pembenahan, terutama dalam penatausahaan aset dan keuangan daerah.

Tabel II. 78
Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah aparat yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	-
Jumlah ASN	3.914	3.792	3.917	3.824	3.824
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	-	-	-	-	-
1. PIM II	2	1	1	-	-
2. PIM III	14	4	3	-	-
3. PIM IV	11	-	-	-	-
Jumlah ASN yang Mengikuti Seleksi Jabatan	-	-	-	15	-
Jumlah Peserta Tubel/Ibel	69	37	7	3	-

Sumber : BKDPSDM Kab. Lembata Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah aparat yang memiliki kompetensi di kabupaten Lembata sebanyak 33 orang. Untuk jumlah ASN, jumlah terbanyak terdapat di tahun 2017, yakni 4.190 orang dan jumlah ASN pada tahun 2021 sebanyak 3.824 orang. Jumlah ASN yang mengikuti PIM, baik PIM II, PIM III dan PIM IV untuk tahun 2021 tidak ada. Untuk kegiatan dimaksud sudah dianggarkan namun tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19. Sementara jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan pada tahun 2021 sebanyak 15 orang. Jumlah peserta tugas belajar paling banyak pada tahun 2017 sebanyak 112 orang dan paling sedikit pada tahun 2021 sebanyak 3 orang. hal ini diakibatkan sebagian anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur dipindahkan untuk penanganan pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 ini, peningkatan kualitas SDM sangat minim

fu



pada semua indikator. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berupaya mengembangkan kapasitas SDM untuk menghadapi era digitalisasi birokrasi dan penerapan Human Capital Management Strategy menuju *Smart ASN 2024* yang meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa *hospitality*, berjiwa *entrepreneurship*, dan memiliki jaringan luas.

Tabel II. 79
Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kab. Lembata Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	82	87	91	105	105
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	11	11	16	16	16

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Lembata Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Lembata terhadap binaan organisasi masyarakat, LSM dan OKP setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2021. Sedangkan pembinaan politik di daerah pada tahun 2019 dan 2020 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 16 kali. Pembinaan ini penting dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kedepan yang semakin nyata pembangunan karakter, pemahaman nilai-nilai pancasila, penanaman kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh arus globalisasi, tidak kehilangan yang fundamental, menjaga semangat persatuan, toleransi, kesantunan, plurisme dan kemanusiaan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing suatu daerah dapat diukur dengan melihat beberapa aspek, diantaranya kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, fasilitas sosial, iklim investasi maupun kualitas sumber daya manusia. Gambaran daya saing Kabupaten Lembata jika ditinjau dari beberapa aspek di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan.

fu



Tabel II. 80
Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Pengeluaran
Per Kapita Sebulan Kabupaten Lembata 2021

Kelompok makanan	Rata – rata pengeluaran	Persentase rata – rata pengeluaran
Padi – padian	99.028	15,08
Umbi – umbian	2.987	0,45
Ikan, Udang, Cumi, Kerang	41.701	6,35
Daging	7.261	1,11
Telur dan Susu	19.691	3,00
Sayur – sayuran	33.643	5,12
Kacang – kacang	5.211	0,79
Buah – buahan	15.480	2,36
Minyak dan Kelapa	11.505	1,75
Bahan Minuman	19.823	3,02
Bumbu – bumbu	6.217	0,95
Konsumsi lainnya	2.919	0,44
Makanan dan minuman jadi	50.011	7,62
Rokok	37.674	5,74
Jumlah	353.148	53,79

Sumber: Lembata Dalam Angka Kabupaten Lembata, Tahun 2021

Tabel II. 81
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita
Menurut Jenis Pengeluaran Dan Golongan Pengeluaran
Sebulan Kabupaten Lembata Tahun 2021

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase Penduduk
< 150.000	0,00
150.000 - 199.999	0,79
200.000 - 299.999	7,76
300.000 - 499.999	40,16
500.000 - 749.999	30,54
750.000 - 999.999	11,47
≥ 1.000.000	9,28
Total	100,00

Sumber : Lembata Dalam Angka, 2018

b. Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2017 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2021 (2012=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

fu



Tabel II. 82
Nilai tukar Petani di Kabupaten Lembata Tahun 2021

Bulan	Nilai Tukar Petani
Agustus	101,11
September	102,03
Oktober	102,41
November	101,83
Desember	102,69

Sumber: *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTT, 2022*

c. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Jumlah bank paling banyak terdapat di Kecamatan Nubatukan yaitu sebanyak 3 buah dan masih ada beberapa kecamatan yang melakukan kegiatan perbankan pada ibu kota Kabupaten.

Tabel II. 83
Jenis Bank per Kecamatan di Kabupaten Lembata
Tahun 2020

Kecamatan		BRI	BNI	Bank NTT
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Nagawutung	-	-	-
2	Wulandoni	-	-	-
3	Atadei	-	-	-
4	Ile Ape	1	-	-
5	Ile Ape Timur	-	-	-
6	Lebatukan	-	-	1
7	Nubatukan	4	1	3
8	Omesuri	1	-	1
9	Buyasuri	1	-	1
Lembata		6	1	3

Sumber: *Lembata Dalam Angka, 2021*

Dari data jumlah bank di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Lembata, hanya terdapat 3 bank, yaitu BRI sebanyak 6 unit, Bank NTT sebanyak 3 unit dan hanya 1 unit BNI. Minimnya lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Lembata membuat pembangunan sektor keuangan, berpengaruh pada sektor ekonomi.

d. Angka Kriminalitas.

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata, terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 84
Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka kriminalitas	375	125	100	154	154

Sumber : *Badan Kesbangpol Kab. Lembata Tahun 2022*

fu



e. Lama Proses Perijinan.

Lamanya proses perijinan untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata untuk memudahkan investor menanamkan modalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 85
Lama Proses Perijinan di Kabupaten Lembata
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata lama proses perijinan (hari)	7	7	6	7	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2022

f. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.

Jumlah pajak yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Lembata cenderung stabil dari tahun 2017– 2021. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 86
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lembata
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	26	24	24	24	24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

g. Rasio Ketergantungan

Adapun rasio ketergantungan penduduk produktif menanggung penduduk non produktif dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel II. 87
Ratio Ketergantungan

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio ketergantungan	54,22	57,03	66,47	65,28	65,28

Sumber : Dinas Dukcapil 2022

Rasio ketenagakerjaan di kabupaten lembata semakin tinggi dan penduduk usia produktif terhadap yang tidak produktif.

fu



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pembahasan tentang gambaran keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan Kabupaten Lembata dimasa lalu tahun 2017-2021 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang) dan Ekuitas (Modal). Dari analisis kinerja masa lalu tersebut maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Neraca keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah melalui analisis perkembangan elemen utama aset daerah, kewajiban daerah dan ekuitas daerah. Kondisi keuangan daerah tahun 2019-2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada perhitungan rata-rata pertumbuhan keuangan daerah.

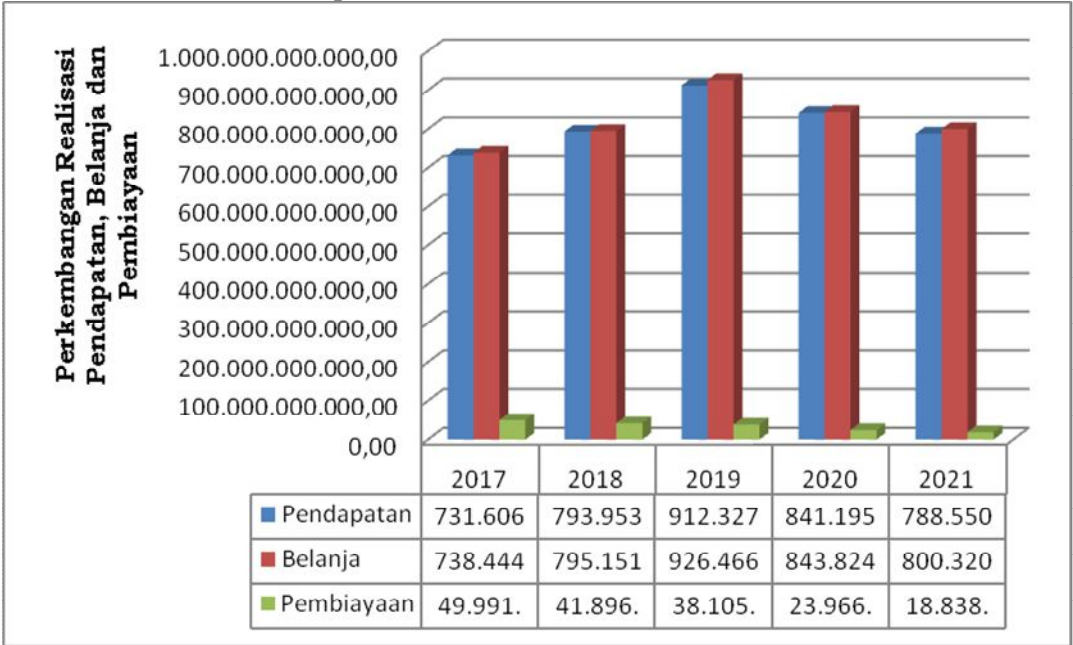
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata dapat dilihat dari pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuatif sebagaimana terlihat pada Diagram III.1 berikut.

Diagram III.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata, Tahun 2022

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi: a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021, maka dapat diketahui realisasi pendapatan serta



pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Daerah	731.606.447.232,62	793.953.759.022,73	912.327.928.832,20	841.195.830.477,96	788.550.434.946,00	1,51
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.992.916.558,69	42.882.808.397,73	51.718.451.391,20	44.244.016.164,15	40.042.487.408,00	1,06
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	7.014.880.395,00	7.709.039.865,59	9.623.473.229,70	8.784.242.700,00	10.010.621.852,00	7,37
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.862.260.792,00	13.961.101.047,00	16.561.640.585,00	18.961.481.905,00	10.010.621.852,00	0,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4.702.688.311,00	5.103.241.414,00	4.992.919.960,00	4.974.433.766,49	10.010.621.852,00	16,31
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.413.087.060,69	16.109.426.071,14	20.540.417.616,50	11.523.857.792,66	10.010.621.852,00	(9,42)
1.2	Pendapatan Transfer	689.313.530.673,93	736.854.230.625,00	841.582.081.615,00	762.825.458.318,81	731.703.335.938,00	1,20
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	674.789.469.341,00	724.067.959.958,00	825.129.726.067,00	747.803.499.973,00	718.490.891.887,00	1,26
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.524.061.332,93	12.786.270.667,00	16.452.355.548,00	15.021.958.345,81	13.212.444.051,00	(1,88)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.300.000.000,00	14.216.720.000,00	19.027.395.826,00	34.126.355.995,00	16.804.611.600,00	31,34
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.300.000.000,00	14.216.720.000,00	19.027.395.826,00	34.126.355.995,00	16.804.611.600,00	31,34

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



Berdasarkan tabel di atas maka pendapatan daerah Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,51% Per tahun. Pada Tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 731.606.447.232,62 meningkat menjadi Rp. 912.327.928.832,20 tahun 2019. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 menurun menjadi Rp. 841.195.830.477,96 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2021 sebesar Rp. 788.550.434.946,00. Penurunan ini terutama disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah Kabupaten Lembata untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang relatif stabil dari tahun 2017-2019 yaitu dari Rp. 37.992.916.558,69 tahun 2017, Rp. 42.882.808.397,73 tahun 2018 dan Rp.51.718.451.391,20 tahun 2019. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 44.244.016.164,15 tahun 2021 dan Rp. 52.645.395.532 tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 1,06%.

Realisasi dari masing-masing komponen pembentuk PAD mengalami fluktuatif, akan tetapi secara keseluruhan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti untuk peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer antar daerah sebesar -1,88%. Realisasi kedua komponen pembentuk pendapatan transfer cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, akan tetapi secara keseluruhan pendapatan transfer mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah mengalami peningkatan realisasi pertahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,34%.

Berdasarkan tabel maupun grafik juga terlihat bahwa sumber pendapatan untuk Kabupaten Lembata didominasi oleh pendapatan transfer, diikuti dengan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Besarnya pendapatan transfer menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lembata masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan realisasi PAD belum mencerminkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lembata untuk terus berusaha meningkatkan PAD.

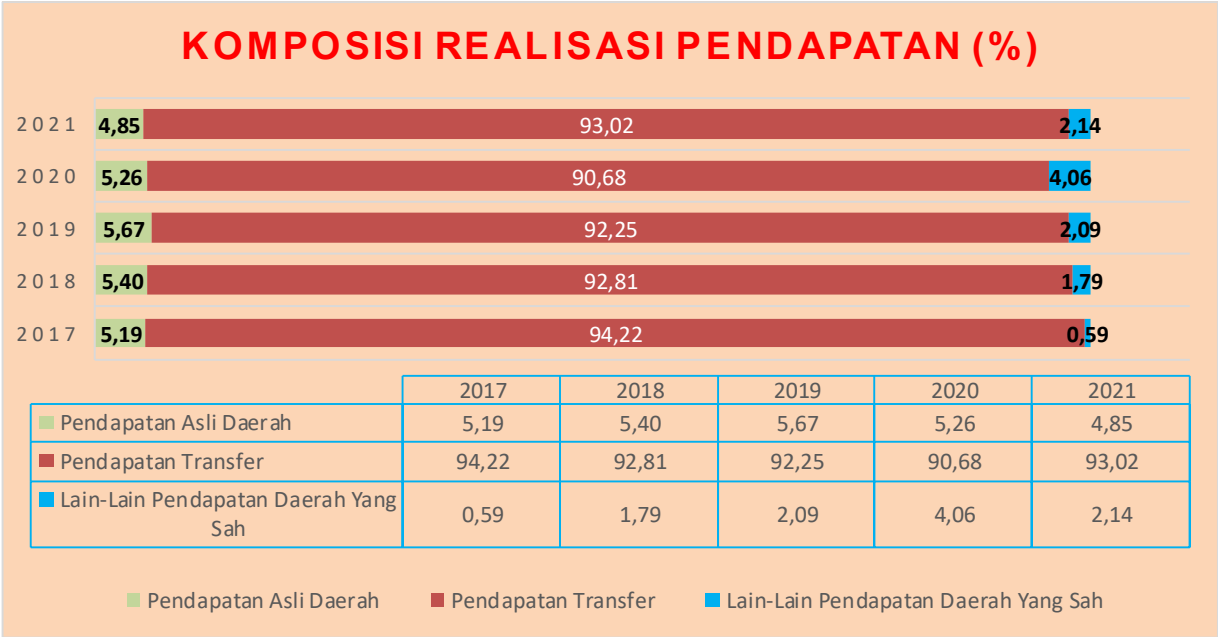
Dari gambaran struktur PAD tersebut di atas secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa pajak daerah bukan menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Oleh sebab itu, dalam empat tahun mendatang perlu dilakukan percepatan pembangunan ekonomi



untuk menumbuhkan potensi pajak, intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, perlu meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar dinas/instansi pemungut retribusi daerah. Berbagai langkah tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.

Komposisi kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik III. 1
Komposisi Kinerja Pendapatan Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi pendapatan tahun 2017-2021 dari komponen Pada grafik III. 1 komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lembata tahun 2017-2021 pendapatan transfer lebih tinggi dari pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah.

Komposisi Realisasi pendapatan transfer cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 94,22% mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 90,68% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 93,02%.

Komposisi realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan, komposisi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,59% mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar



4,06%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,14%.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, diantaranya belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja bantuan keuangan.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Tabel III. 2
Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2021

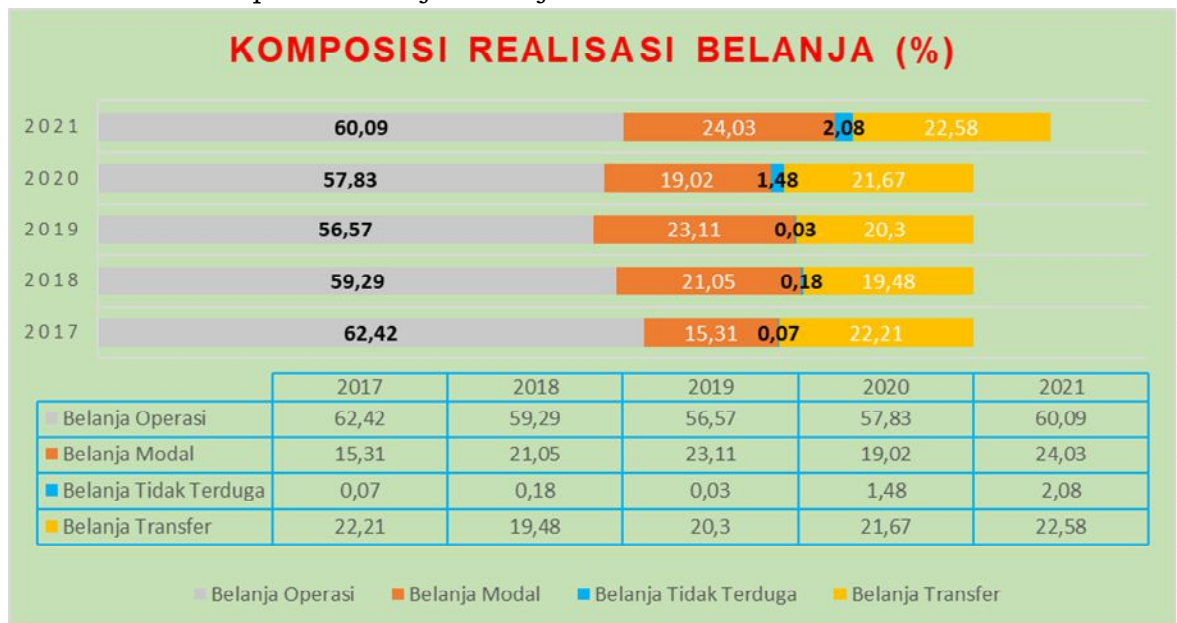
No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Belanja	738.444.560.948,40	795.151.389.483,67	926.466.269.006,46	843.824.447.890,22	800.320.564.906,03	1,62
2.1	Belanja Operasi	460.900.282.314,40	475.524.539.774,00	524.115.646.806,37	487.908.188.218,05	480.889.361.566,66	0,85
2.1.1	Belanja Pegawai	270.815.850.237,00	273.020.103.669,00	288.666.075.940,00	285.106.829.493,00	302.508.861.983,00	2,24
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173.718.018.259,40	198.312.336.105,00	232.461.730.866,37	200.497.771.545,05	166.260.128.776,14	(0,87)
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	16.098.913.818,00	3.965.600.000,00	2.113.340.000,00	1.997.212.180,00	4.521.940.207,52	(22,43)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	267.500.000,00	226.500.000,00	874.500.000,00	306.375.000,00	7.598.430.600,00	95,29
2.2	Belanja Modal	113.059.810.243,00	160.628.410.138,67	214.079.867.468,09	160.535.891.652,17	127.420.364.842,37	2,42
2.2.1	Belanja Modal Tanah	245.000.000,00		1.712.616.400,00	972.440.522,00	1.654.743.000,00	46,53
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.894.675.858,00	34.791.164.690,00	34.477.355.589,68	39.474.987.343,05	20.099.069.382,53	13,03
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.493.668.680,00	43.883.857.446,67	77.043.763.824,47	62.257.464.388,12	36.428.364.408,00	5,04
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.177.054.705,00	68.444.775.039,00	86.671.490.751,16	40.787.866.548,00	64.032.970.721,38	(2,09)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.249.411.000,00	13.508.612.963,00	14.174.640.902,78	17.043.132.851,00	5.205.217.330,46	18,27
2.3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00	11.410.303.837,00	86,92
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00	11.410.303.837,00	86,92
2.4	Belanja Transfer	163.984.468.391,00	158.889.941.783,00	188.036.593.031,00	182.869.267.016,00	180.600.534.660,00	1,95
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.105.594.843,00	1.632.261.383,00	2.137.928.456,00	2.647.596.966,00	2.774.572.460,00	(7,54)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	159.878.873.548,00	157.257.680.400,00	185.898.664.575,00	180.221.670.050,00	177.825.962.200,00	2,15

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



Komposisi kinerja belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik III. 2
Komposisi Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, secara umum kinerja belanja daerah Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,62% Per tahun. Realisasi belanja cenderung meningkat setiap tahun namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan.

Penurunan ini terutama disebabkan dampak pademi COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menanggulangi dampak pademi COVID-19, dengan rata-rata pertumbuhan untuk belanja operasi sebesar 0,85%, belanja modal sebesar 2,42%, belanja tidak terduga sebesar 86,92% dan belanja transfer sebesar 1,95%.

Dari grafik III. 2 tergambar bahwa komposisi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Lembata yang digunakan untuk investasi pembangunan daerah masih sangat kecil. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhitungkan kembali besarnya potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber seperti : potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kinerja.



3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan daerah merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal dan sekaligus menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021. Pembiayaan daerah Kabupaten Lembata terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan.

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah hanya pada penanaman modal (investasi) pemerintah daerah.

Gambaran pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan pada tabel III. 3. Dari tabel tersebut secara angka terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan dari tahun ke tahun juga cenderung fluktuatif.



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel III. 3
Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembiayaan	49.991.493.556,94	41.896.637.215,16	38.105.334.901,22	23.966.994.726,96	18.838.377.314,70	(17,73)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	52.491.493.556,94	42.396.637.215,16	40.605.334.901,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70	(16,48)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	52.491.493.556,94	42.393.320.215,16	40.594.410.751,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70	(16,48)
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	3.317.000,00	10.924.150,00	-	-	-
	Jumlah	52.491.493.556,94	42.396.637.215,16	40.605.334.901,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70	(16,48)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Inves,00tasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	49.991.493.556,94	41.896.637.215,16	38.105.334.901,22	23.966.994.726,96	18.838.377.314,70	(17,73)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



4. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya. Aset daerah merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat di masa dating sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam uang.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lembata sampai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel III. 4
Perkembangan Neraca Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	8
Aset	806.780.826.460,63	836.536.014.765,90	1.034.291.099.567,86	1.467.563.333.793,79	1.537.151.145.322,52	13,76
Aset Lancar	64.577.718.619,33	58.207.184.529,98	37.811.528.440,97	53.572.892.037,85	38.489.275.588,01	(9,83)
Investasi Jangka Panjang	41.807.038.568,00	41.700.280.031,00	43.696.165.050,00	45.363.752.662,00	46.986.122.391,00	2,36
Aset tetap	662.809.350.640,02	727.080.170.533,40	914.094.633.615,25	1.342.263.916.425,34	1.431.709.788.591,05	16,65
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	37.586.718.633,28	9.548.379.671,52	38.688.772.461,64	26.362.772.668,60	19.965.958.752,46	(11,88)
Jumlah Aset	806.780.826.460,63	836.536.014.765,90	1.034.291.099.567,86	1.467.563.333.793,79	1.537.151.145.322,52	13,76
Kewajiban	3.345.304.544,20	15.163.111.217,20	8.113.956.120,11	45.048.552.644,81	41.816.737.023,03	65,72
Ekuitas	803.435.523.933,43	821.372.905.566,70	1.026.177.145.466,75	1.422.514.781.148,98	1.504.467.394.578,49	13,37
Jumlah Kewajiban + Ekuitas	806.780.828.477,63	836.536.016.783,90	1.034.291.101.586,86	1.467.563.333.793,79	1.546.284.131.601,52	13,90

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



Perkembangan realisasi Aset Kabupaten Lembata menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,13% per tahun. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh aset tetap yaitu sebesar 19,29% dari Rp.662.809.350.640,02 tahun 2017 menjadi Rp.1.431.709.788.591,05 tahun 2021. Pertumbuhan nilai aset ini sejalan dengan perkembangan belanja modal Pemerintah Kabupaten Lembata. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya menurun sebesar -11,88%.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lembata selama periode tahun 2017 sampai 2021 cenderung fluktuatif. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat agar dapat memberikan efek pada peningkatan pendapatan.

Pertumbuhan rata-rata Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Lembata mendekati pertumbuhan rata-rata per tahun dari Aset dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,35%. Sedangkan Perkembangan Rasio keuangan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel III. 5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	
I	Ratio Likuiditas					
1	Ratio Lancar	19,30	3,84	4,66	1,19	0,92
2	Ratio Quick	24,03	3,03	3,31	0,26	0,28
II	Ratio Solvabilitas					
1	Total Hutang Terhadap Total Aset	0,00041	0,0181	0,0078	0,0307	0,0272
2	Ratio Hutang Terhadap Modal	0,0042	0,0185	0,0079	0,0317	0,0278

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ratio lancar dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya *quick ratio* dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

Ratio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

Ratio aktivitas adalah ratio yang digunakan untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Ratio yang digunakan adalah rata-rata umum piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang sehingga dapat merubah piutang menjadi kas, yang dihitung dengan membandingkan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) dengan perputaran piutang. Rata-rata persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (yang digunakan untuk pelayanan publik), dihitung dengan membandingkan jumlah hari dalam satu tahun dengan perputaran persediaan.

Hasil analisis ratio keuangan pada tabel 3.5 terlihat bahwa *ratio likuiditas* dari tahun ke tahun fluktuatif akan tetapi tetap memperlihatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk membayar utang jangka pendeknya cukup baik. Ratio Solvabilitas menunjukan angka nol ini berarti pengaruh utangnya terhadap asset sangat kecil dan berdasarkan nilai modal yang dimiliki maka Kabupaten Lembata cukup mandiri dan tidak tergantung utang, artinya pembayaran utang pemerintah masih dapat dibiayai sendiri.

Meskipun ratio aktivitas fluktuatif tetapi tetap menunjukan kemampuan pemerintah dalam memberikan input berupa persediaan untuk menghasilkan output pelayanan publik tiap tahunnya cukup baik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lembata pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan



pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang,

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Secara umum proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Lembata mencapai rata-rata sebesar 77,06% pertahun selama periode tahun 2017-2021. Jika dibandingkan proporsi realisasi antara belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja transfer yang mencapai rata-rata sebesar 97,75%, di ikuti oleh belanja operasi dengan rata-rata sebesar 87,51%, belanja modal dengan rata-rata sebesar 84,27% sedangkan yang terendah adalah belanja tidak terduga dengan realisasi rata-rata sebesar 38,71%.

Proporsi realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 6
Proporsi Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Proporsi Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja	79,49	65,16	72,62	83,91	84,10	77,06
Belanja Operasi	88,39	84,66	93,60	83,85	87,06	87,51
Belanja Pegawai	96,34	95,48	97,06	92,04	96,45	95,48
Belanja Barang dan Jasa	90,45	92,06	94,48	93,46	87,82	91,65
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	90,32	86,39	92,23	74,69	80,99	84,92
Belanja Bantuan Sosial	76,43	64,71	90,62	75,21	82,99	77,99
Belanja Modal	91,34	72,64	84,85	91,59	80,91	84,27
Belanja Modal Tanah	96,46	-	93,87	92,29	96,87	75,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,02	98,34	90,97	91,33	86,32	91,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89,97	78,58	80,63	90,19	90,00	85,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	86,16	94,13	95,90	98,26	53,28	85,55
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	96,07	92,18	62,89	85,90	78,08	83,02
Belanja Tidak Terduga	38,46	7,23	12,11	67,26	68,46	38,71
Belanja Tidak Terduga	38,46	7,23	12,11	67,26	68,46	38,71
Belanja Transfer	99,78	96,11	99,94	92,95	99,96	97,75
Belanja Bagi Hasil	100,00	96,71	99,90	85,90	100,00	96,50
Belanja Bantuan Keuangan	99,55	95,50	99,97	100,00	99,92	98,99

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022

B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III. 7
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam juta rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (dalam juta rupiah)	Prosentase
1	2	3	4	5
1	2017	270.815.850.237,00	740.944.560.948,00	36,55
2	2018	273.020.103.669,00	795.651.389.483,67	34,31
3	2019	288.666.075.940,00	928.966.269.006,46	31,07
4	2020	285.106.829.493,00	843.824.447.890,22	33,79
5	2021	302.508.861.983,00	800.320.564.906,03	37,80

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Tabel III. 8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Belanja Pendidikan (dalam juta rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (dalam juta rupiah)	Proporsi
1	2	3	4	5
1	2017	148.617.362.447,00	740.944.560.948,40	20,06
2	2018	161.262.677.481,00	795.651.389.483,67	20,27
3	2019	191.855.567.825,15	928.966.269.006,46	20,65
4	2020	181.165.230.196,05	843.824.447.890,22	21,47
5	2021	171.974.345.826,78	800.320.564.906,03	21,49

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Dari tabel III. 7 dapat dilihat bahwa total belanja untuk aparatur meningkat 3 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan persentase proporsi dari kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran cenderung menurun untuk proporsi 3 tahun terakhir yakni 36,55% di 2017 menjadi 34,31% di tahun 2018 dan 31,07% di tahun 2019, sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 33,79% dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 37,80%. Hal ini menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya menekan kebutuhan belanja aparatur untuk mengutamakan kebutuhan belanja publik. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat.

Tabel III. 8 menggambarkan proporsi belanja pendidikan terhadap total pembiayaan daerah, yang dapat dijelaskan bahwa total belanja dan proporsi kebutuhan pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena pemerintah secara serius berkomitmen mengutamakan pemenuhan kebutuhan pendidikan.



2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah.

Surplus atau defisit riil yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam periode tahun 2017-2021 sangat fluktuatif. Surplus Riil terjadi apabila Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Jika terjadi Surplus Riil berarti akan mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan semakin besar. Sebaliknya jika terjadi Defisit Riil maka akan menghasilkan SiLPA yang semakin kecil. Dengan asumsi kebijakan “Anggaran Seimbang” maka semakin kecil Surplus Riil atau semakin besar Defisit Riil berarti semakin efektif pelaksanaan Rencana Kerja yang dibuat. Sebaliknya, jika besar Surplus Riil berarti semakin kurang efektif pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun. Dalam periode waktu 2017-2021, terjadi 4 kali Defisit Riil

Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Lembata selama kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel III.9

Tabel Surplus/Defisit Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	731.606.447.232,62	793.953.759.022,73	912.327.928.832,20	841.195.830.477,96	786.645.765.608,68
2	Belanja Daerah	738.444.560.948,40	795.151.389.483,67	926.466.269.006,46	843.824.447.890,22	800.320.564.906,03
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
	Surplus/Defisit Riil	(9.338.113.715,78)	(1.697.630.460,94)	(16.638.340.174,26)	(2.628.617.412,26)	(16.174.799.297,35)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022

Pada tabel di atas, menggambarkan kondisi surplus/defisit riil Kabupaten Lembata dari Tahun 2017 sampai 2021 dengan realisasi yang fluktuatif.



Tabel III.10

Tabel Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	731.606.447.232,62	793.953.759.022,73	912.327.928.832,20	841.195.830.477,96	786.645.765.608,68
2	Belanja Daerah	738.444.560.948,40	795.151.389.483,67	926.466.269.006,46	843.824.447.890,22	800.320.564.906,03
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
A	Defisit Riil	(9.338.113.715,78)	(1.697.630.460,94)	(16.638.340.174,26)	(2.628.617.412,26)	(16.174.799.297,35)
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
4	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	52.491.493.556,94	42.393.320.215,16	40.594.410.751,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	3.317.000,00	10.924.150,00	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	52.491.493.556,94	42.396.637.215,16	40.605.334.901,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	43.153.379.841,16	40.699.006.754,22	23.966.994.726,96	21.338.377.314,70	5.163.578.017,35
------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022

Pada tabel III. 10 di atas ini terlihat bahwa dalam periode tahun 2017 sampai 2021, terjadi 4 kali Defisit Riil. Defisit Riil terjadi tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 9.338.113.715,78 sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp. 16.174.799.297,35. Defisit Riil yang terjadi ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan. Dalam periode tahun 2017 sampai 2021, Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Penggunaan SiLPA tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan Penerimaan Piutang Daerah terjadi tahun 2018 dan 2019, dengan jumlah masing-masingnya adalah Rp. 3.317.000 untuk tahun 2018 dan Rp. 10.924.150 untuk tahun 2019 dengan Jumlah SiLPA pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan.

Kondisi ini menggambarkan kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai belanja daerah. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Sehubungan dengan ini, maka SiLPA bisa bermakna positif maupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga menjadi over target. SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja program dan kegiatan pemerintah. SiLPA yang ada pada APBD Kabupaten Lembata sebagian besar berasal dari tertundanya belanja program dan kegiatan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan ke depannya agar secara efektif dapat menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA dapat diperkecil.



3.1. **Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pasal 1 Ayat 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyatakan bahwa : Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah komponen dari Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk mendukung proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis ini sangat penting dalam upaya mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang disediakan untuk periode dimaksud, serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas provinsi dan nasional.

3.1.1. Analisis Pengelolaan Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.

2. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagai berikut ;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama belfluktuasi, namun perkembangannya tidak banyak mengalami



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

perubahan. Pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan namun di tahun 2020 dan 2021 pengeluaran periodik wajib dan mengikat belanja daerah mengalami penurunan yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,80%. Perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama belanja daerah pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel III. 11 sebagai berikut.

Tabel III. 11
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja	616.818.525.115,00	643.362.857.392,00	756.366.481.319,38	729.072.627.526,17	743.111.765.120,85	3,80
Belanja Operasi	452.334.056.724,00	484.364.417.821,00	568.095.726.587,38	533.692.259.506,17	551.100.926.623,85	4,03
Belanja Pegawai	218.546.022.327,00	220.824.898.891,00	234.074.935.971,00	233.934.377.273,00	238.758.502.076,00	1,78
Belanja Gaji dan Tunjangan	215.880.312.327,00	218.146.180.087,00	231.217.095.975,00	231.171.877.277,00	236.129.542.071,00	1,81
Belanja Penerimaan Pimpinan dan ADPRD dan Operasional KDH/WKDH	2.665.710.000,00	2.678.718.804,00	2.857.839.996,00	2.762.499.996,00	2.628.960.005,00	(0,28)
Belanja Barang dan Jasa	217.421.620.579,00	259.347.418.930,00	331.032.950.616,38	297.454.295.053,17	300.222.053.740,33	6,67
Belanja Program Pendidikan	148.617.362.447,00	161.262.677.481,00	191.855.567.825,15	170.222.132.446,05	171.974.345.826,78	2,96
Belanja Program Kesehatan	57.002.774.747,00	92.556.794.163,00	125.846.814.028,23	121.307.928.167,12	121.605.686.797,55	16,36
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	925.000.000,00	308.750.000,00	52.500.000,00	45.985.000,00	-	(100)
Belanja Diklat PNS	7.695.781.925,00	1.177.793.632,00	9.786.753.798,00	2.711.884.271,00	3.435.469.400,00	(14,90)
Belanja Jasa Kantor (Tagihan listrik, telepon, air dan sejenisnya)	2.234.622.462,00	2.265.186.387,00	2.330.897.723,00	2.376.751.669,00	2.157.907.869,00	(0,70)
Belanja Sewa Gedung/Kantor	832.013.998,00	1.354.453.667,00	637.887.022,00	539.692.980,00	590.045.847,00	(6,64)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	114.065.000,00	421.763.600,00	522.530.220,00	249.920.520,00	458.598.000,00	32,09



Pemerintah Kabupaten Lembata

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	16.098.913.818,00	3.965.600.000,00	2.113.340.000,00	1.997.212.180,00	4.521.940.207,52	(22,43)
Belanja Bantuan Sosial	267.500.000,00	226.500.000,00	874.500.000,00	306.375.000,00	7.598.430.600,00	95,29
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00	11.410.303.837,00	86,92
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00	11.410.303.837,00	86,92
Belanja Transfer	163.984.468.391,00	158.889.941.783,00	188.036.593.031,00	182.869.267.016,00	180.600.534.660,00	1,95
Belanja Bagi Hasil	4.105.594.843,00	1.632.261.383,00	2.137.928.456,00	2.647.596.966,00	2.774.572.460,00	(7,54)
Belanja Bantuan Keuangan	159.878.873.548,00	157.257.80.400,00	185.898.664.575,00	180.221.670.050,00	177.825.962.200,00	2,15

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Sedangkan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama belanja daerah untuk proyeksi tahun 2023-2026 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 pengeluarannya berjumlah Rp. 505.228.372.635,00 meningkat menjadi Rp. 652.253.987.634,82 di tahun 2026. Perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama belanja daerah pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel III .12. sebagai berikut.



Tabel III. 12

Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

Uraian	APBD TA.2022	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Belanja	669.875.279.939,00	674.265.225.566,00	693.120.004.442,00	706.112.669.272,00	717.666.013.949,00
Belanja Pegawai	336.467.178.939,00	340.857.124.566,00	359.711.903.442,00	372.704.568.272,00	384.257.912.949,00
DAK	177.312.368.000,00	177.312.368.000,00	177.312.368.000,00	177.312.368.000,00	177.312.368.000,00
Belanja Dana Bos	24.665.760.000,00	24.665.760.000,00	24.665.760.000,00	24.665.760.000,00	24.665.760.000,00
Belanja JKN	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Desa	123.621.783.000,00	123.621.783.000,00	123.621.783.000,00	123.621.783.000,00	123.621.783.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	31.964.281.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	29.464.281.000,00
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	674.875.279.939,00	708.908.077.566,00	727.762.856.442,00	740.755.521.272,00	749.630.294.949,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2022



3.1.2. Proyeksi Keuangan Daerah

A. Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen dari Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan tahun 2022-2026 dilakukan dengan melihat tren realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir, memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten serta aspek-aspek lain yang berkaitan.

Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2022-2026 diperkirakan meningkat sampai dengan tahun 2026. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah; serta kenaikan dana perimbangan. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan akan meningkat.

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tetap masih tinggi. Dengan kata lain, dana perimbangan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah.



Tabel III. 13

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kabupaten Lembata Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	830.139.770.945,00	826.111.141.622,00	859.686.579.303,00	865.555.327.478,00	873.315.411.006,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54.796.736.943,00	56.918.987.368,00	60.582.625.242,00	64.595.490.694,00	71.284.583.452
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.649.993.367,00	14.612.740.106,00	17.496.425.133,00	20.888.860.294,00	24.971.946.791,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.747.785.364,00	26.770.709.050,00	29.346.749.005,00	30.937.716.955,00	33.916.861.684,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.825.000.000,00	7.507.500.000,00	8.258.250.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.898.958.212,00	9.035.538.212,00	6.914.451.104,00	5.261.413.445,00	4.137.524.977,00
1.2	Pendapatan Transfer	742.869.084.002	736.718.204.254	766.239.594.561,00	767.257.407.753,00	768.326.111.605,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.482.166.056,00	717.331.286.307,00	745.883.330.718,00	745.883.330.718,00	745.883.330.718,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.386.917.946,00	19.386.917.947,00	20.356.263.843,00	21.374.077.035,00	22.442.780.887,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.473.950.000,00	32.473.950.000,00	32.864.359.500,00	33.274.289.475,00	33.704.715.949,00
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.473.950.000,00	32.473.950.000,00	32.864.359.500,00	33.274.289.475,00	33.704.715.949,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022



B. Belanja Daerah

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk penganggaran belanja tahun anggaran 2021 tidak lagi menggunakan nomenklatur rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung, akan tetapi menggunakan nomenklatur rekening belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi belanja Daerah Tahun 2022-2026 diperkirakan sebagai berikut:



Tabel III. 14
Proyeksi Belanja Kabupaten Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja					
Belanja Operasi	546.092.960.741,00	515.040.463.099,00	549.543.178.035,00	552.100.456.074,00	561.950.730.696,00
Belanja Pegawai	336.467.178.939	340.857.124.566,00	359.711.903.442,00	372.704.568.272,00	384.257.912.949,00
Belanja Barang dan Jasa	190.591.802.881	143.421.282.605,00	144.098.521.172,00	165.317.347.646,00	165.617.347.695,00
Belanja Bunga	6.294.815.621	13.762.055.928,00	11.732.753.421,00	9.622.851.957,00	7.546.111.207,00
Belanja Hibah	2.384.163.300	15.000.000.000,00	32.000.000.000,00	2.455.688.199,00	2.529.358.845,00
Belanja Bantuan Sosial	10.355.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Modal	340.472.984.310	100.757.725.841	92.972.984.310	92.695.666.653	92.695.666.653
Belanja Modal Tanah	3.679.191.076	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.666.589.982	17.666.589.982,00	22.666.589.982,00	21.666.589.982,00	22.166.589.982,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.896.636.347	16.896.636.347,00	21.896.636.347	21.619.318.690	21.619.318.690
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.838.671.975	60.623.413.506,00	42.838.671.975,00	43.838.671.975,00	43.338.671.975,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.391.894.930	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00
Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891	5.527.209.891	10.409.489.496	11.527.209.888	10.414.699.529
Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891	5.527.209.891,00	10.409.489.496,00	11.527.209.888,00	10.414.699.529,00
Belanja Transfer	170.046.616.003,00	170.142.890.791,00	172.118.075.462,00	174.161.003.307,00	176.290.033.128,00
Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222	1.461.274.010	1.749.642.513,00	2.088.886.029,00	2.497.194.679,00
Belanja Bantuan Keuangan	168.681.616.781	168.681.616.781	170.368.432.949,00	172.072.117.278,00	173.792.838.449,00
Jumlah Belanja	1.065.139.770.945	791.468.289.622	825.043.727.303	830.484.335.922	841.351.130.006

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022



C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2022-2036 sebagai berikut:



Tabel III. 15
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kabupaten Lembata Tahun 2022-2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembiayaan					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	240.000.000.000,00	0	0	0	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	15.000.000.000,00	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	225.000.000.000,00	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	240.000.000.000,00	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	31.964.281.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	29.464.281.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	31.964.281.000,00
	Pembiayaan Netto	235.000.000.000,00	(34.642.852.000,00)	(34.642.852.000,00)	(34.642.852.000,00)	(31.964.281.000,00)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022



3.1.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Pemerintah dalam periode tahun 2023 – 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang. Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lembata dan rencana penggunaannya dapat diproyeksikan untuk lima tahun ke depan hingga kondisi akhir RPD Kabupaten Lembata disajikan sebagai berikut: :



Tabel III. 16

Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Lembata Tahun 2023-2026

Uraian	APBD TA.2022	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	830.139.770.945,00	826.111.141.622,00	859.686.579.303,00	865.127.187.922,00	873.315.411.006,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Anggaran	15.000.000.000,00	0	0	0	0
Total Penerimaan	845.139.770.945,00	826.111.141.622,00	859.686.579.303,00	865.127.187.922,00	873.315.411.006,00
Di Kurangi					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	674.875.279.939,00	708.908.077.566,00	727.762.856.442,00	740.755.521.272,00	749.630.294.949,00
Kapasitas Kemampuan Keuangan	170.264.491.006,00	117.203.064.056,00	131.923.722.861,00	124.371.666.650,00	123.685.116.057,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022

Berdasarkan proyeksi pada tabel III. 16, menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lembata pada tahun pertama 2023 sampai tahun 2026 fluktuatif dan sangat terbatas yang akan digunakan sebagai dasar dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2023-2026.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026. Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, analisis isu strategis dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dan rujukan yaitu RPJPD Kabupaten Lembata 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Lembata 2011-2031. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Lembata juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

4.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan dapat disajikan berdasarkan telaah dokumen perencanaan sebagai berikut:

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Lembata.

a. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Lembata sebagian besar merupakan perbukitan bergelombang, perbukitan terjal dan pedataran yang kering. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian desa sebagai akibat terbatasnya akses infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata yang memiliki kecenderungan meningkat dengan lahan pertanian yang relatif terbatas berdampak pada beban daerah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik. Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi, namun di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2023-2026 adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.



b. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

1. Perekonomian Daerah

Dalam dua tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan. Permasalahan yang harus diatasi dalam masa transisi (2023-2026) adalah belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19. Permasalahan yang belum mampu diatasi untuk mendorong percepatan dan perubahan ekonomi daerah adalah:

- a. Dampak dari pandemi Covid-19 terhadap hampir semua lapangan usaha dan berkurangnya pendapatan daerah;
- b. Belum optimalnya sinergi antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan dalam memulihkan kelesuan perekonomian Lembata;
- c. Belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Lembata sejak tahun 2017 - 2020 masih menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian dan perikanan, serta administrasi pemerintahan dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Lembata secara rata-rata lebih dari 63,48%. Tingginya ketergantungan pada kegiatan pertanian, perikanan dan pemerintahan membuat perekonomian Kabupaten Lembata stagnan. Permasalahan yang harus diatasi dalam masa transisi RPD Lembata Tahun 2023 - 2026 adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; serta pariwisata. Oleh karena itu pembangunan pertanian lebih diarahkan pada pembangunan teknologi sebagai upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan pertanian untuk kemandirian energy dan sumber daya petani di pedesaan.

Disamping itu dalam struktur ekonomi Lembata belum menunjukkan secara jelas kontribusi dari tenaga kerja Indonesia/buruh migran, padahal ada sebagian masyarakat Lembata yang perekonomian domestiknya bergantung dari para buruh migran atau TKI. Fakta bahwa kontribusi TKI terhadap ketahanan ekonomi (rumah tangga miskin), perbaikan fasilitas rumah, pendidikan anak cukup kuat/besar. Hal ini dikarenakan tiadanya data tentang jumlah buruh migran asal Lembata, tingkat mobilisasi TKI per tahun dan data aliran dana yang masuk ke Lembata dari para TKI.



2. Permasalahan Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata menunjukkan kemajuan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, perkembangan IPM Kabupaten Lembata menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2017, angka IPM Kabupaten Lembata sebesar 63,09 meningkat menjadi 64,91 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 1,82 poin dan pada tahun 2020, IPM Kabupaten Lembata mengalami penurunan menjadi 64,74 atau sebesar 0,17 poin. Walaupun menunjukkan tren yang fluktuatif, IPM Kabupaten Lembata belum berada pada titik yang tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT sebesar 63,73 pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 65,19. Karena itu, permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam memperkuat daerah dan masyarakat Lembata dalam persaingan secara global dari sisi SDM dan ekonomi.

3. Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Lembata sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dan pesisir dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan masih belum optimal mengurangi jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Lembata masih lebih dari 26 persen. Selain itu, indeks kedalaman dan indeks keparahan juga relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sebesar 36.260 jiwa, sampai dengan kondisi terakhir tahun 2020 sebesar 37.920,- jiwa. Sementara angka garis kemiskinan mengalami peningkatan pada 2017 adalah Rp.355.693,- per kapita per bulan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.388.577,- per kapita per bulan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lembata bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan,



rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023-2026 adalah belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dalam hal :

- a. mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan, rasa aman, dan partisipasi;
- b. mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan;
- d. belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kemudahan mendapatkan akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan.

Fakta kemiskinan juga berdampak pada cukup banyak masyarakat Lembata yang memilih untuk menjadi tenaga kerja Indonesia/TKI. Namun kualitas TKI relatif rendah dan berstatus TKI ilegal karena rendahnya akses masyarakat atas pelayanan dokumen keimigrasian dan rendahnya mutu atau keahlian TKI asal Lembata. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lembata perlu menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Lembata untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan latihan, penciptaan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

c. Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Lembata untuk jenjang pendikan SMA/SMK/MA tercatat 70,88% masih rendah jika dibandingkan dengan Pendidikan SD dan SMP. Hal ini yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. APS cukup tinggi pada penduduk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 97,75 persen, Sementara itu, penduduk kelompok umur 16-18 tahun mencapai 93,90 persen di mana umur tersebut adalah umur rata-rata untuk memasuki Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, terutama laki-laki di perdesaan sebesar 65,52 persen. Ada indikasi bahwa banyak anak mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah lagi pada kelompok umur tersebut.

Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Lembata. Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di



Kabupaten Lembata sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2020 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang semua jenjang masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah dan penyebaran guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

2. Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Akan tetapi ditinjau dari aspek ketersediaan tenaga kesehatan (paramedis dan dokter) maka terjadi kesenjangan yang cukup besar antar desa di mana desa - desa dengan kondisi aksesibilitas transportasi yang sulit, kekurangan tenaga paramedis sangat dirasakan. Terbatasnya jumlah tenaga dokter umum menyebabkan penyebarannya hanya sampai pada tingkat Puskesmas sedangkan Puskesmas Pembantu belum memiliki tenaga dokter umum. Di Kabupaten Lembata hanya terdapat beberapa orang Dokter sehingga sering kali pasien harus dirujuk ke daerah lain. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi dalam rangka menurunkan tingkat prevelensi *STUNTING*; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 - 2026 mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga tenaga medis lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

d. Permasalahan Sarana dan Prasarana Daerah

1. Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten. Transportasi di Kabupaten Lembata mencakup pengembangan transportasi darat,



laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 - 2026 mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal disbanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Di Kabupaten Lembata Proporsi jaringan jalan pada tahun 2020 dalam kondisi baik adalah 169,54 Km dari panjang jalan yang dilalui roda empat 577,03 km atau 29,38%. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, di Kabupaten Lembata jalan Negara dan jalan provinsi tidak bertambah. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Lembata sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kemajuan desa. Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Lembata terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan.

Transportasi laut di Kabupaten Lembata juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Lembata. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi laut untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta wisatawan.

2. Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Lembata. Pembangunan sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Lembata masih terbatas. Cakupan pelayanan komunikasi dan informasi belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2017 sebanyak 5 unit, meningkat menjadi 30 unit pada tahun 2020. Jumlah siaran radio aktif, jumlah website milik Pemda, jumlah menara telpon telpon genggam meningkat pada tahun 2017 sebanyak



32 unit, meningkat sampai dengan tahun 2020 sebanyak 49 unit. Sedangkan persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon seluler dari 51,75% meningkat pada tahun 2020 menjadi 83,07%. Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

3. Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Lembata menunjukkan belum adanya perbaikan nyata terhadap akses air bersih. Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari pada tahun 2017 sebesar 61,36 % meningkat pada tahun 2020 menjadi 80,48% dari total rumah tangga di Kabupaten Lembata. Dari berbagai sumber air baku yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga di Kabupaten Lembata, saat ini baru memanfaatkan air permukaan (mata air), sumur gali dan sebagian kecil sumur bor. Sedangkan potensi air baku lain yang belum dimanfaatkan adalah air sungai, embung dan air bawah tanah. Sedangkan pelayanan air minum mengalami peningkatan pada tahun 2020 telah tersambung ke pelanggan sebanyak 5.521 pelanggan yang tersebar pada Kecamatan Ile Ape sebanyak 642 pelanggan dan Kecamatan Nubatukan sebanyak 4.879 pelanggan.

Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperluas pelayanan untuk sambung jaringan air minum untuk pelanggan pada 7 (tujuh) kecamatan.

4. Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Lembata. Pada tahun 2017 penduduk di Kabupaten Lembata masih terdapat 25 Desa yang belum terlayani listrik atau 16,56% mengalami peningkatan pelayanan sampai dengan tahun 2019 menjadi 3 desa atau 1,99% dari jumlah seluruh desa/kelurahan yang belum terlayani listrik. Desa yang belum



terlayani listrik sampai dengan tahun 2019 terdapat pada Kecamatan Lebatukan sebanyak 2 desa dan Kecamatan Atadei sebanyak 1 desa.

Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2023 – 2026 mendatang adalah perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan PT. PLN untuk menyelesaikan 3 (tiga) desa yang belum terjangkau pelayanan listrik bagi masyarakat.

e. Aspek Daya Saing

1. Kemampuan ekonomi daerah yang belum mandiri diantaranya tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 4,76 pada tahun 2017 – 2020 dengan kategori masih rendah, laju pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, struktur ekonomi makro masih bertumpu pada sektor primer yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan sektor sekunder dan tersier secara signifikan;
2. Berdasarkan evaluasi pada periode 2017-2020, struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 5,38 persen pertahun. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 88,49 persen pertahun dan sumbangan lain-lain pendapatan rata-rata sebesar 6,13 persen pertahun. Struktur pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam tahun 2023-2026 mendatang adalah perlunya optimalisasi sumber-sumber PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Iklim investasi kabupaten yang belum berkembang dengan baik. Hal ini dilihat dari jumlah investor yang masih kurang. Sampai dengan tahun 2020 jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata sebanyak 5 investor dengan nilai investasi Rp.309.004.645.900,-
4. Infrastruktur wilayah yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung daya saing daerah dalam tahun 2023-2026 kedepan perlu pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan strategis dan cepat tumbuh. Karena ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang, baik antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten.



f. Pandemi Corona Virus Deseases (Covid –19)

Selain permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan urusan pemerintahan daerah, ada juga fenomena permasalahan baik langsung maupun tidak langsung memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, yaitu pandemi COVID-19.

Pandemi ini berdampak pada rumah tangga, UMKM, koperasi dan sektor keuangan, yaitu :

- 1) Ancaman gangguan kesehatan karena terinfeksi COVID-19 bahkan ancaman jiwa; puluhan ribu jiwa berpotensi tertular;
- 2) Ancaman kehilangan pendapatan;
- 3) Penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi
- 4) UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit;
- 5) Sektor koperasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan : manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi (restoran dan perhotelan);
- 6) Memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan merambat ke sektor keuangan

Dampak tersebut di atas beresiko terhadap perubahan dan pergeseran rencana serta perubahan kebijakan keuangan Negara dan Daerah yang akan berpengaruh pada perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang direncanakan dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 - 2026.

g. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam

Kejadian bencana alam seperti erupsi gunung (ile) Lewotolok, banjir bandang, perubahan iklim yang tidak menentu (kekeringan) dan beberapa bencana alam lainnya di Kabupaten Lembata dalam 2 (dua) tahun terakhir telah menimbulkan dampak kehidupan sosial-ekonomi bagi masyarakat bagi korban bencana yang membutuhkan tindakan tanggap darurat dan upaya penanganan pasca-bencana yang benar-benar terorganisir dan melakukan berbagai tindakan penanganan. Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah barang tentu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, maka perlu dilakukan 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap 1). Tahap Pra Bencana untuk pencegahan dan mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan; 2). Tahap Keadaan Darurat untuk tanggap darurat; dan 3). Tahap Pasca Bencana untuk pencegahan dan mitigasi, serta pemulihan rekonstruksi.



Pada tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk menanggulangi resiko bencana yang dilakukan dengan perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran dengan merubah paradigma, meningkatkan pengetahuan, sikap yang tangguh dan peduli terhadap lingkungan. Sedangkan pada tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana yang melibatkan masyarakat memiliki kesiapan dan selalu siaga menghadapi bencana.

Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian terjadi bencana. Kegiatan tanggap darurat secara umum berlaku untuk semua jenis bencana. Sedangkan pada Tahapan Rehabilitasi pasca-terjadinya bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, pemulihan pelayanan publik, anak-anak kembali ke sekolah, dan lain-lain, yang bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pasca-terjadinya bencana. Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang.

Permasalahan yang perlu diatasi dalam tahun 2023 – 2026 adalah Pemerintah Daerah perlu segera melakukan koordinasi yang terpadu untuk memastikan agar segera bisa menangani permukiman yang rusak, melakukan merehabilitasi sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya serta rekonstruksi lahan pertanian perlu segera dirumuskan sebagai *exit strategy* pasca-bencana. Selain itu, untuk mengantisipasi kejadian Bencana Alam selanjutnya, maka perlu dilakukan tahapan penanganan bencana yang dimulai dari pra bencana, taggap darurat dan pasca bencana. Pengelolaan Bencana diarahkan kepada upaya-upaya yang meliputi: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.



4.1.2 Permasalahan Berdasarkan Urusan

Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berkaitan pelayanan dasar dan urusan pemerintah daerah lainnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan :

- a. akses layanan Pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal;
- b. masih tingginya angka putus sekolah tingkat pendidikan SMP/MTs pada tahun 2020 sebanyak 30% dan pada tahun 2021 sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Kesehatan :

- a. Ketersediaan tenaga medis terutama dokter, sarana dan prasarana belum optimal;
- b. masih terdapat beberapa jenis penyakit menular dan tidak menular dengan kasus tinggi, terutama malaria, DBD dan Stunting;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, masih terbatas dan belum merata ke seluruh wilayah kabupaten terutama pusat-pusat pertumbuhan strategis;
- b. penataan ruang daerah juga belum optimal;

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- a. sampai dengan tahun 2021 masih 32,76% rumah tidak layak huni yang berdinding bamboo, yang berdampak langsung terhadap tingginya angka kemiskinan di daerah;
- b. perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan PSU perumahan yang belum optimal;
- c. sebanyak 21,41% rumah tangga yang masih menggunakan sumber air permukaan/air hujan atau lainnya;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:

- a. penegakan Perda, Perbup belum berjalan optimal;
- b. pencegahan dan penanggulangan bencana masih terbatas;
- c. belum adanya dukungan peralatan untuk pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran.

6. Sosial:

- a. masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lembata, sebanyak 19.055 orang pada tahun 2021;
- b. perlindungan dan jaminan sosial terutama pendataan dan pengelolaan fakir miskin daerah belum optimal;



7. Tenaga Kerja :
 - a. belum adanya dukungan BLK untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja daerah;
 - b. meningkatnya angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 2,86 % meningkat menjadi 8,34 % pada tahun 2021;
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 - a. masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta;
9. Ketahanan pangan:
 - a. masih belum optimal pengembangan keragaman pangan lokal;
10. Pertanahan:
 - a. masih banyaknya sengketa pertanahan di daerah termasuk tanah ulayat;
 - b. belum optimalnya penertiban pendataan luas dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah untuk memastikan status kepemilikan tanah.
11. Lingkungan hidup:
 - a. Kajian lingkungan hidup untuk seluruh aktivitas pembangunann masih sangat terbatas;
 - b. masih belum optimalnya penanganan persampahan di kota Lewoleba;
 - c. masih tingginya data kerusakan lingkungan sebanyak 43.148 ha;
12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
 - a. cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta *database* kependudukan belum optimal;
 - b. masih rendahnya persentase kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk, pada tahun 2021 sebanyak 54,76%.
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa:
 - a. penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dioptimalkan;
14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
 - a. optimalisasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
15. Perhubungan:
 - a. pengelolaan pelayanan perhubungan darat dan pelayaran belum optimal;
16. Komunikasi dan informatika:
 - a. Belum optimalnya pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Minimnya surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Lembata, sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 jenis;



- c. Belum adanya siaran radio local yang aktif;
- d. Masih kurangnya jumlah menara telpon stasioner.
- 17. Koperasi, usaha kecil dan menengah:
 - a. penyelenggaraan koperasi dan pengembangan UMKM belum optimal;
 - b. masih rendahnya jumlah koperasi dan pra koperasi yang berbadan hukum;
- 18. Penanaman modal:
 - a. iklim usaha dan penanaman modal masih sangat terbatas;
 - b. masih kurangnya jumlah investor yang melakukan investasi di Kabupaten Lembata;
 - c. proses perijinan yang masih tersebar pada beberapa perangkat daerah.
- 19. Kepemudaan dan olahraga:
 - a. pemberdayaan kepemudaan masih sangat terbatas;
 - b. fasilitas olahraga belum tersedia secara memadai;
- 20. Statistik:
 - a. penyelenggaraan statistik daerah belum maksimal;
- 21. Persandian:
 - a. penyelenggaraan persandian belum optimal;
- 22. Kebudayaan:
 - a. pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi belum optimal;
 - b. minimnya penyelenggaraan festival budaya.
- 23. Perpustakaan:
 - a. pengeloaan perpustakaan daerah dan desa dalam rangka mendukung program literasi belum optimal;
- 24. Kearsipan:
 - a. pengelolaan kearsipan daerah belum maksimal;
 - b. Minimnya kualitas SDM yang mengelolah arsip.
- 25. Kalautan dan perikanan:
 - a. pemberdayaan nelayan belum optimal;
 - b. kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha nelayan tangkap;
- 26. Pariwisata:
 - a. pengelolaan dan pengembangan pariwisata belum optimal;
 - b. jumlah kunjungan wisata yang terus engalami penurunan yang berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.
- 27. Pertanian:
 - a. pengembangan prasarana sarana pertanian belum optimal;
 - b. penyediaan bibit pertanian dan hewan belum berjalan;
 - c. munculnya organisme penggenggu tanaman dan beberapa penyakit yang ternak;



28. Kehutanan:
 - a. pelaksanaan pengelolaan TAHURA belum berjalan;
29. Energi dan sumber daya mineral:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi belum maksimal;
30. Perdagangan:
 - a. pengelolaan perizinan perdagangan belum optimal;
 - b. stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaannya belum maksimal;
 - c. pengelolaan pasar tradisional belum optimal;
 - d. masih kurangnya binaan kelompok pengrajin;
 - e. jumlah kelompok binaan UMKM masih sedikit.
31. Perindustrian:
 - a. orientasi pengelolaan industri daerah berbasis potensi belum optimal;
32. Transmigrasi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan transmigrasi daerah/lokal belum berjalan;

4.2 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan

4.2.1 Telaah RPJPD Kabupaten Lembata 2005 – 2025

RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023- 2026 yang merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Lembata. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun dengan Visi RPJPD Kabupaten Lembata tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing” yang diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur Daerah;
- c. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian untuk Penguatan Otonomi Daerah;

Dari sisi keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah, maka tahap ke IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan masa konsolidasi perkembangan pembangunan terencana di Lembata



melalui kebijakan dan tahapan pembangunan sebelumnya. Penekanan kebijakan pembangunan pada tahapan ini adalah pada peningkatan aspek-aspek pembangunan yang masih dibutuhkan dan mempertahankan keunggulan dan kemajuan pembangunan yang sudah tercapai agar berlanjut, dengan sektor pariwisata sebagai leading sektor. Perhatian terutama diberikan pada kebijakan untuk mempersiapkan dan memperkuat daerah dan masyarakat Lembata dalam persaingan secara regional dan global dari sisi SDM dan ekonominya sehingga terus maju kedepan sebagai daerah industri, dengan beberapa penekanan antara lain: Peningkatan ketahanan ekonomi domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdaya saing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional. Perkuatan ekonomi didapat melalui;

1. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja guna memutuskan mata rantai kemiskinan;
2. Pada aspek Kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan pada modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan pedesaan. Untuk itu, perlu diformulasikan dan diimplementasikan sistem perkreditan, kelembagaan koperasi dan bank yang memungkinkan peran perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi;
3. Pembangunan teknologi diarahkan pada upaya mekanisasi pedesaan melalui upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan bahan bakar nabati untuk kemandirian penyediaan energi pedesaan.
4. Memperkuat sendi-sendi pembangunan ekonomi dengan memperkuat peran Lembata sebagai bagian dari kekuatan regional dan nasional.

4.2.2 Telaah RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011 – 2031

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional, sebagai berikut:



1. Keterpaduan;
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasil-gunaan;
5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan; serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, ditinjau dari tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sehingga jika dilihat berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Lembata , maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lembata sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui optimasi/pengaturan ruang yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan serta pariwisata. Selanjutnya Kebijakan Penataan Ruang Daerah terdiri atas :

- a. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah untuk mendukung terlaksananya daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;



- e. pemantapan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya;
- f. pemantapan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana;
- g. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- h. pengendalian pemanfaatan kegiatan pada kawasan budidaya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, militer dan kepolisian yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- i. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Strategi Penataan Ruang

Strategi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata meliputi:

- a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
- b. mempertahankan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal; dan
- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terpadu meliputi :

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- c. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi baru, terbarukan, dan tak terbarukan secara optimal; dan
- d. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;



- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
- c. mendorong pengelolaan hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

- a. menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya baik berupa hutan lindung maupun kawasan bergambut dan resapan air;
- b. mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan;
- c. mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai;
- d. mencegah kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam pantai terutama pada kawasan gumuk pasir;
- e. mencegah kegiatan budidaya di sekitar mata air yang dapat mengganggu kelestarian dan debit air pada mata air; dan
- f. mengendalikan perkembangan fisik permukiman di kawasan Waiteba dan Bobu.

Strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya, meliputi :

- a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
- b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
- c. mencegah kegiatan budidaya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan
- d. melarang kegiatan budidaya apapun yang merusak fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana, meliputi :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;



- b. pemanfaatan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
- c. penetapan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, minimal berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :

- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi pengendalian pemanfaatan kegiatan pada kawasan budidaya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, militer dan kepolisian yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

- a. mengembangkan lahan perkebunan masyarakat sekitar permukiman dalam kawasan hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan;
- b. menetapkan lahan pertanian abadi dan melarang upaya konversi lahan pertanian untuk peruntukan lain;
- c. mengembangkan cluster-cluster kawasan perikanan dan pengembangan kawasan minapolitan daerah;
- d. mengembangkan pertambangan yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. khusus pertambangan bahan tambang mineral logam dan radioaktif ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan setempat;
- f. melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
- g. mengembangkan industri besar dalam lingkup kawasan industri yang ditetapkan;
- h. mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- i. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata;
- j. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya;



- k. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata;
- l. mengembangkan pemukiman dalam lingkup kawasan permukiman yang telah ditetapkan
- m. melarang pembentukan kawasan permukiman baru pada kawasan lindung, dan lahan pertanian abadi;
- n. menentukan trayek batas sementara dan data awal terhadap kawasan permukiman yang telah ada dalam kawasan hutan lindung untuk diusulkan sebagai enclave;
- o. mengalokasikan kawasan militer dan kepolisian dalam rangka pertahanan dan keamanan;
- p. mengembangkan wilayah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- q. mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan
- r. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran dan pemakaman.

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup, meliputi:

- a. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan strategis;
- b. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
- c. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Daerah sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

4.2.3 Telaah RPJMD Provinsi NTT 2013-2018

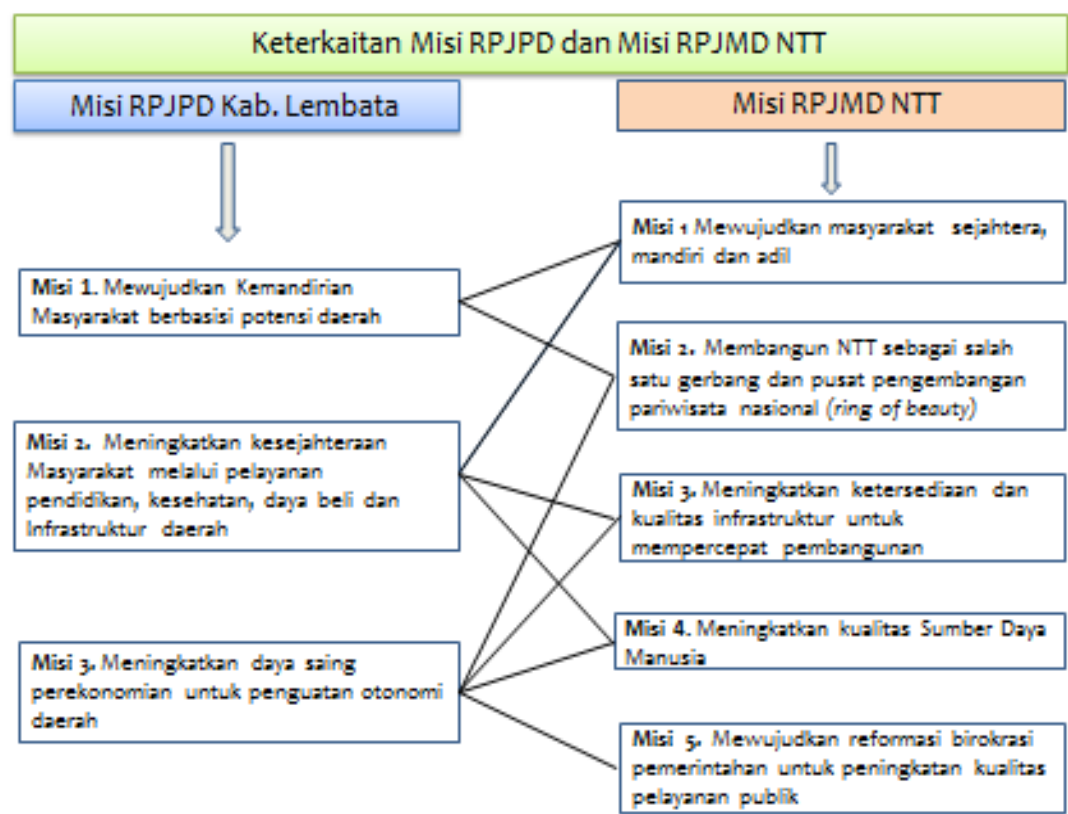
RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2023, yaitu “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

- 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;



- 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Tabel IV.1
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten dan Misi RPJMD Provinsi



Untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan Strategi Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

- 1. Strategi Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
 - a. Peningkatan kapasitas produksi;
 - b. Peningkatan kapasitas industry pengolahan;
 - c. Peningkatan pemasaran dan ekspor komoditas olahan;
 - d. Pemberian dukungan dan fasilitas;
 - e. Peningkatan belanja perkapita rumah tangga;
 - f. Perbaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan
 - g. Perluasan akses terhadap lapangan kerja;
 - h. Peningkatan produktivitas angkatan kerja;
 - i. Perlindungan terhadap pekerja;
 - j. Pemantapan sistem dan regulasi;
 - k. Pemantapan sistem pemungutan;
 - l. Investasi dan optimalisasi pemanfaatan asset;



- m. Pemantapan infrastuktur perdagangan;
 - n. Peningkatan nilai tambah (*value added*) produk;
 - o. Perbaikan sistem usaha dan investasi;
 - p. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi;
 - q. Perluasan akses rumah tangga terhadap kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan;
 - r. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan;
 - s. Peningkatan akses rumah tangga terhadap pangan;
 - t. Dukungan regulasi ketahanan pangan;
 - u. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah;
 - v. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil;
 - w. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru;
 - x. Perluasan akses bagi kelompok perempuan;
 - y. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan;
 - z. Pemantapan perlindungan terhadap anak.
2. Strategi Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
- a. Pembangunan perwilayahan destinasi;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan infrastruktur pariwisata;
 - d. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan;
 - e. Pengembangan SDM pariwisata;
 - f. Pengembangan investasi pariwisata;
 - g. Penguatan value chain kepariwistaan;
 - h. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan.
3. Strategi Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan:
- a. Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara;
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur pengairan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian;
 - d. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar;
 - e. Pengembangan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya;
 - f. Peningkatan pasokan sumberdaya kelistrikan berbasis energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ekonomi;
 - g. Peningkatan akses rumah tangga terhadap sumberdaya kelistrikan;
 - h. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;
 - i. Penegakan aturan dan regulasi lingkungan;



- j. Pengembangan gerakan mitigasi emisi gas kaca;
 - k. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
 - l. Keterpaduan pengendalian dan pemafaatan ruang sesuai ketentuan;
 - m. Mengembangkan sistem informasi resiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat;
 - n. Penguatan tatakelola resiko bencana.
4. Srtategi Misi 4: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- a. Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan yang merata;
 - b. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu;
 - c. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship;
 - d. Peningkatan profesionalisme, kualitas dan pengelolaan dan penempatan guru;
 - e. Pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan;
 - f. Fasilitasi dan jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan;
 - g. Peningkatan pemahaman dan perilaku hidup sehat;
 - h. Pencegahan stunting;
 - i. Pengembangan kepemudaan;
 - j. Pengembangan keolahragaan.
5. Strategi Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- a. Penyelenggaraan, pengendalian dan pelaporan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pemerintahan;
 - b. Reformasi regulasi;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM;

Selanjutnya untuk mengoptimalkan strategi pokok tersebut yang menjadi landasan implementasi seluruh program dan kegiatan pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- 1. Transformasi struktur dan kultur dalam pembangunan;
- 2. Pembangunan berpusat pada sumberdaya manusia;
- 3. Perubahan struktur ekonomi menuju pada industri dan jasa berbasis pertanian;
- 4. Pengembangan mata rantai nilai pariwisata;
- 5. Kemandirian lokal.

4.2.4 Telaah RPJMN Tahun 2020 – 2024

RPJMN Tahun 2020-2024, memiliki visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN



GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdayasaing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang berbasis korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam melaksanakan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia Tahun 2045, maka Presiden menetapkan 5 (lima) Arahana Utama sebagai strategi dalam pencaapaian misi, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, trampilm menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

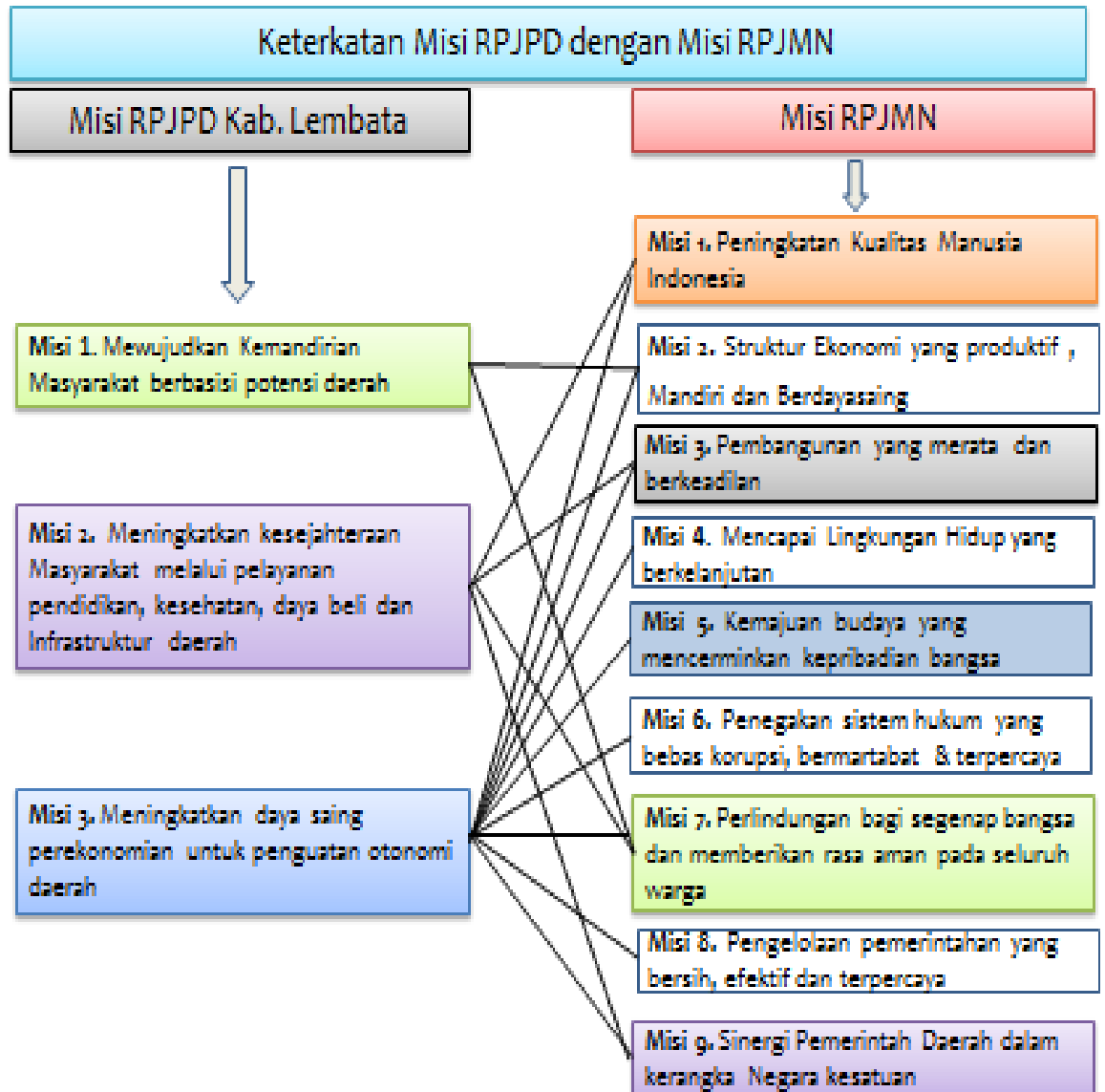
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhankan eselonisasi.

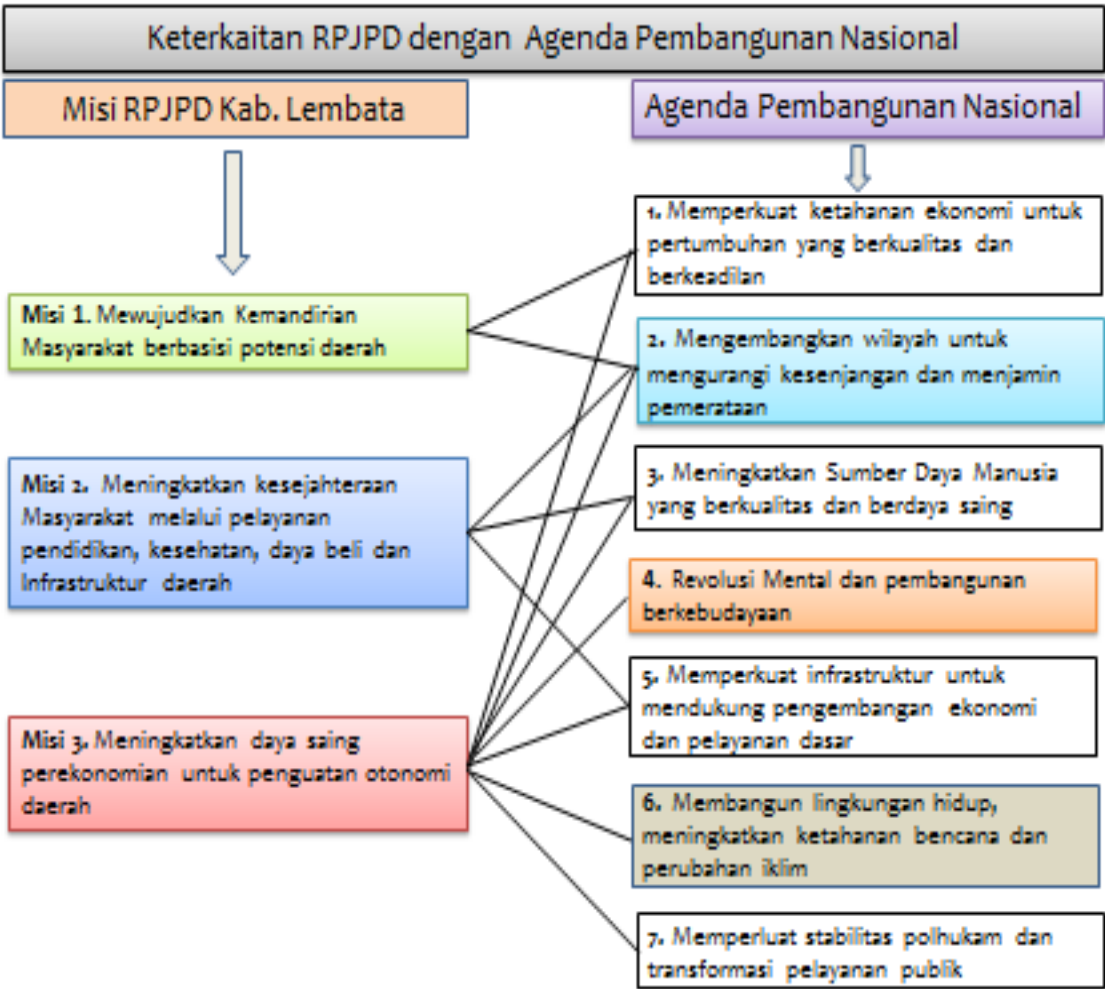
5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergatangan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dengan berlandaskan pada visi, misi dan arahan utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



4.2.5 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)

Dari perspesktif keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah maka RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 merupakan implementasi tahapan keempat dari RPJPD Kabupaten Lembata. Salah satu hal yang menjadi sasaran dalam pembangunan jangka panjang daerah tersebut adalah komitmen untuk terlibat dalam pencapaian tujuan SDG’s.



Tabel IV.2

Telaah Misi RPJPD Kabupaten Lembata terhadap SDG's

MISI RPJPD 2005 - 2025	TUJUAN SDG's
Misi 1: Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah	• Menghapus segala bentuk kemiskinan dimanapun (Tujuan 1); • Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tujuan 2); • Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Tujuan 3); • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8); • Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara (Tujuan 10); • Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (Tujuan 12); • Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (Tujuan 13); • Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 14); • Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16)
Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan	• Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan



pendidikan, kesehatan, (Tujuan 2);
daya beli dan infrastruktur
Daerah

- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Tujuan 3);
- Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Tujuan 4);
- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (Tujuan 5);
- Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 6);
- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (Tujuan 13);
- Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16)
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17);

Misi 3: Meningkatkan
Daya Saing Perekonomian
untuk Penguatan Otonomi
Daerah

- Menghapus segala bentuk kemiskinan dimanapun (Tujuan 1);
- Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tujuan 2);
- Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua



(Tujuan 4);

- Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 6);
- Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Tujuan 7);
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8);
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Tujuan 9);
- Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara (Tujuan 10)
- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11)
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (Tujuan 12);
- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (Tujuan 13);
- Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati (Tujuan 15);



- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16)
- Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17);

4.3. Isu Strategis

Analisis isu strategis Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata 2023-2026. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Lembata juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata dalam kurun waktu dimaksud.

1. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisis lingkungan internal Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2023-2026.

a. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Daerah

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Lembata, yaitu :

- 1) Kabupaten Lembata merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam maritim yang sangat besar, khususnya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Kabupaten Lembata memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri atas sektor pertanian yang mempunyai potensi lahan sebagai sumber pendapatan petani;
- 3) Kabupaten Lembata memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- 4) Kabupaten Lembata memiliki potensi wisata bahari yang cukup kaya dan beragam;



- 5) Kabupaten Lembata memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Lembata;
- 6) Kabupaten Lembata memiliki budaya lokal yang unik.
- 7) Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang memiliki sejarah hubungan panjang dengan Negara Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan (TKI).

b. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Daerah

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Lembata, yaitu:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah;
- 2) Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya kekagetan budaya (*culture shock*) dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Lembata;
- 3) Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 4) Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa;
- 5) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
- 6) Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya perikanan menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah;
- 7) Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- 8) Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
- 9) Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.



- 10) Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;
- 11) Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 12) Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata di Kabupaten Lembata akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah;
- 13) Belum berkembangnya pola dan manajemen kepemimpinan yang demokratis, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menyebabkan menguatnya kepentingan kelompok;
- 14) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan sumber daya daerah akan mengakibatkan terpinggirkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan publik;
- 15) Belum berkembangnya forum komunikasi dan konsultasi publik dalam proses pengambilan keputusan akan menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik;
- 16) Belum optimalnya layanan dan fasilitas peningkatan kapasitas/keterampilan TKI asal Lembata.
- 17) Belum berkembangnya potensi pariwisata desa dalam mendorong berkembangnya pariwisata di Lembata;
- 18) Menurunnya tingkat pendapatan dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- 19) Belum stabilnya iklim investasi di Lembata;
- 20) Proses perijinan panjang dan yang masih menyebar pada beberapa perangkat daerah menyebabkan berkurangnya minat investasi di Lembata;
- 21) Masih ditemukan persoalan sengketa atas hibah tanah antara para hak ulayat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana alam atau transmigrasi lokal;
- 22) Belum optimalnya kerjasama antar seluruh perangkat daerah dalam menurunkan prevalensi Stunting di Lembata.



2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal

Kabupaten Lembata merupakan salah satu wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus berkembang dengan berbagai peluang dan ancaman. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam tahun mendatang 2023-2026 berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kabupaten Lembata, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

a. Identifikasi dan Analisis Peluang

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Lembata, yaitu:

- 1) Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Lembata;
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Lembata;
- 3) Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Lembata;
- 4) Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Lembata;
- 5) Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Lembata; perluasan kesempatan kerja; perluasan jaringan kerjasama pasar TKI ke Negara Malaysia dan negara-negara tujuan lainnya; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat;

Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk



meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- 1) Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 2) Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;

Sejalan dengan pelaksanaan **desentralisasi dan otonomi daerah**, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Lembata akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;
- c. Pemerintah Kabupaten Lembata dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Lembata;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.

b. Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Lembata, yaitu:

- 1) Adanya pandemi Covid 19 yang terdiri dari beberapa varian yang menyerang secara global yang berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan merosotnya ekonomi yang dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Lembata;
- 2) Kejadian bencana alam yang beruntun menimpa Lembata seperti erupsi gunung (Ile) Lewotolok, gempa bumi, tanah longsor dan banjir bandang yang merusak lingkungan dan lahan



- pertanian yang dapat menelan korban jiwa, meluluhlantakkan bangunan maupun lahan pertanian;
- 3) Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Lembata akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
 - 4) Perdagangan yang terus meningkat akan mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Lembata yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Lembata;
 - 5) Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Lembata;

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Lembata, yaitu:

- 1) Praktik demokrasi secara partisipatif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lembata dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambananan dalam pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;
- 2) Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lembata;
- 3) Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lembata.



Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektivitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lembata, yaitu:

- 1) Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lembata;
- 2) Persaingan antardaerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan asset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
- 3) Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
- 4) Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Lembata dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Lembata sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

4.4 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan Analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Lembata dalam tahun 2023-2026 mendatang adalah sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya pembangunan ketenagakerjaan terutama kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas kerja.**
 - a. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam dan luar negeri serta layanan keimigrasian bagi keamanan dan kenyamanan kerja ke luar negeri;
 - b. Rendahnya mutu dan keahlian TKI asal Lembata yang bekerja di alam maupun diluar negeri;
 - c. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Lembata sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dalam dunia kerja.



2. **Belum optimalnya akses pada lembaga keuangan makro untuk penguatan modal usaha bagi pengembangan UMKM**
 - a. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
 - b. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - c. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
 - d. Belum berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kemudahan mendapatkan akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan.;
 - e. Belum berkembangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. **Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna yang mudah diaplikasikan bagi masyarakat di Pedesaan**
 - a. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. Belum adanya peningkatan produktifitas nilai tambah dari kegiatan teknologi yang dikembangkan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
 - c. Terbatasnya infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
 - d. Belum berkembangnya industri perikanan dan pengolahan sumber daya kelautan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - f. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. **Belum optimalnya pemulihan ekonomi untuk menggerakkan Pariwisata sebagai *Leading Sector* akibat Covid-19 dan Pasca Bencana Alam**
 - a. Belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan untuk menggerakkan ekonomi daerah;
 - b. Belum ada sinergi yang baik antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendorong komoditas unggulan dalam memulihkan kelesuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam;
 - c. Belum berkembangnya industri pariwisata sebagai leading sektor akibat pandemi Covid-19 dan bencana alam yang menimpa Lembata;
 - d. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata;
 - e. Perlu menyiapkan sektor-sektor yang menjadi potensi pendukung kepariwisataan secara memadai dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat;



- f. Perlu segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana alam;
 - g. Perlu segera melakukan koordinasi terpadu untuk memastikan penanganan korban pasca bencana alam di Kabupaten Lembata;
 - h. Belum berkembangnya potensi pariwisata desa dalam mendongkrak perkembangan pariwisata di Lembata;
 - i. Menurunnya tingkat pendapatan dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 sejak 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Masih ditemukan persoalan sengketa atas hibah tanah antara para hak ulayat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana alam atau transmigrasi lokal;
5. **Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia terutama kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang belum maksimal.**
- a) Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
 - b) Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c) Memudarnya penerapan nilai-nilai pendidikan dan budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
 - d) Terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - e) Belum optimalnya kerjasama antar seluruh perangkat daerah dalam menurunkan prevalensi Stunting di Lembata.
6. **Belum optimalnya pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi dan penataan kota (PSU).**
- a) Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Lembata;
 - b) Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan;
 - c) Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - d) Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
 - e) Terbatasnya transportasi laut terutama dalam menghubungkan antarpulau;
 - f) Belum adanya keterpaduan *moda* transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Lembata dan sekitarnya;



- g) Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.
7. **Belum maksimalnya pendapatan dan kerjasama daerah serta pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan belum berorientasi industri.**
- a) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian dan perkebunan;
 - b) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari perikanan;
 - c) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
 - d) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
 - e) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - f) belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam memperkuat daerah dan masyarakat Lembata dalam persaingan secara global dari sisi SDM dan ekonomi.
8. **Penyederhanaan Regulasi**
- a) Belum stabilnya iklim investasi di Lembata;
 - b) Proses perijinan panjang dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat atau investor enggan untuk mengurus perijinan usaha
 - c) Perijinan usaha masih menyebar pada beberapa perangkat daerah menyebabkan berkurangnya minat investasi di Lembata;
9. **Reformasi Birokrasi untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, produktif dan berbasis teknologi informasi.**
- a) Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
 - b) Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
 - c) Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antarperangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
 - d) Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi namun dalam implementasinya belum optimal;
 - e) Kualitas SDM ASN dalam hal efektifitas, efisiensi dan produktivitas yang berbasis IT dalam mengelola aplikasi *e-government* belum optimal.
 - f) Optimalisasi pendayagunaan ASN berbasis kinerja belum optimal;
 - g) Kapasitas SDM aparatur desa belum optimal;



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

- h) Kompleksitas persoalan pembangunan menghendaki adanya organisasi fungsional perencanaan.
- i) Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- j) Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- k) Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.
- l) Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi;



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam konteks pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksudkan adalah sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah juga dalam rangka mewujudkan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 tahap keempat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026, didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis potensi daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian untuk penguatan otonomi daerah.

Berdasarkan visi dan misi RPJPD tersebut diatas dan memperhatikan analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 tahap keempat, permasalahan pembangunan daerah, analisis isu strategis yang aktual, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 serta memperhatikan proyeksi kapasitas rill keuangan daerah Tahun 2023-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai berikut.

Tujuan I. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan

Ketahanan ekonomi diarahkan pada pengembangan ekonomi Kabupaten Lembata yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan dan dinamika kehidupan perekonomian terutama adanya pandemi Covid-19 melalui pengelolaan sumber daya ekonomi sektor basis dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



2. Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja.
4. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat berkelanjutan.

Tujuan II. Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim diarahkan pada keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada sektor primer pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu, diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial.
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tujuan III. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Sesuai arahan RPJMN, Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar. Pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka perwujudan SDM Lembata yang berkualitas maka ditetapkan beberapa sasaran selama periode RPD 2023-2026 sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Tujuan IV. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Lembata. Namun demikian, daya saing infrastruktur di Kabupaten Lembata masih perlu



terus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi.

Peningkatan kualitas infrastruktur dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pembangunan dan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur termasuk pemeliharaan rutin jalan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar maka ditetapkan beberapa sasaran selama periode RPD 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar.
2. Meningkatnya infrastruktur ekonomi.

Tujuan V. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi harus terus diupayakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga perlu untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun dunia usaha. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatnya kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi maka ditetapkan beberapa sasaran selama periode RPD 2023-2026 adalah terwujudnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Tujuan VI. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Keuangan Daerah merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan alat ukur daerah dalam menetapkan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan



daerah maka ditetapkan sasaran selama periode RPD 2023-2026 adalah meningkatnya pendapatan daerah.

Tujuan VII. Meningkatkan Daya Saing Daerah

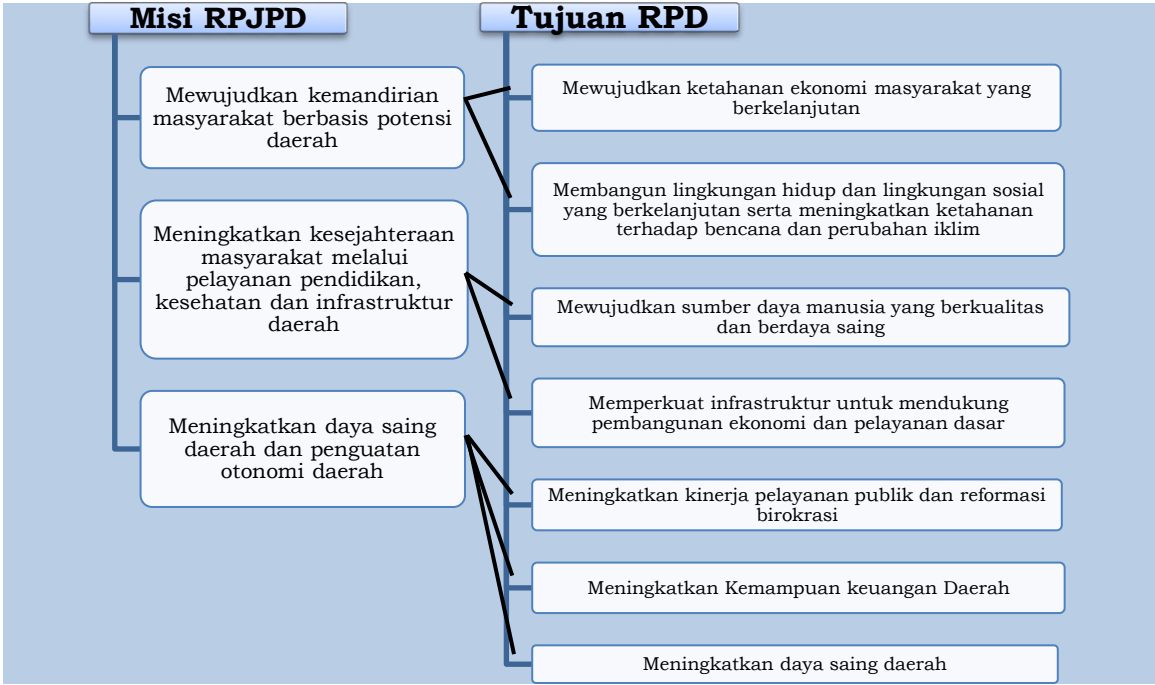
Sesuai RPJPD Kabupaten Lembata 2005-2025, Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing suatu daerah dapat diukur dengan melihat beberapa aspek, diantaranya kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, fasilitas sosial, iklim investasi maupun kualitas sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah maka ditetapkan sasaran selama periode RPD 2023-2026 sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah.
- 2. Meningkatnya iklim berinvestasi.
- 3. Tersedianya fasilitasi wilayah.

Hubungan antara misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 dengan tujuan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagaimana dapat dilihat gambar V.1 berikut:

Gambar V.1

Hubungan Misi RPJPD dengan Tujuan RPD





Tujuan, sasaran dan indicator sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1
Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Daerah Kabupaten Lembata

No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
I	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan									
	1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi sebagai Modalitas bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1,53	2,5-3	3,0-5	4-5,5	5,5-6,75	5,5-6,75
			2	Laju inflasi (%)	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02
			3	PDRB per kapita (Rp. Juta)	14,43	15,74	16,39	17,04	17,68	17,68
			4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	35,61	35,83	36,15	36,32	36,75	36,75
	2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	26,21	26,12	26,07	26,03	25,99	25,99
			2	Indeks keparahan kemiskinan (point)	1,32	1,31	1,26	1,21	1,11	1,11
			3	Indeks kedalaman kemiskinan (point)	5,64	5,21	4,7	4,01	3,6	3,6
			4	Indeks gini (point)	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
	3	Meningkatnya Nilai	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	52,23	55,69	59,37	63,30	67,50	67,50



No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
		Tambah dan Lapangan Kerja	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00
			3	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24
	4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berkelanjutan	1	Penguatan cadangan pangan (%)	60	62,0	64,5	66,5	68,0	68,0
II	Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98	75,98
			2	Persentase pengurangan sampah	78,14	79,00	79,25	79,60	79,85	79,85
			3	Angka kriminalitas tertangani (point)	8,6	10,1	11,5	12,9	14,3	14,3
	2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1	Indeks risiko bencana (point)	147	147	140	138	135	135



No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
III	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
	1	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (point)	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50	70,50
			2	Angka melek huruf (%)	100	100	100	100	100	100
			3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,01	8,21	8,30	8,38	8,46	8,46
			4	Angka usia harapan hidup (%)	67,07	67,57	68,60	70,35	72,40	72,40
			5	Prevelensi stunting (%)	23,3	20,00	17,00	15,00	12,00	12,00
	2	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk	1	Persentase penduduk yang tercakup jaminan sosial	92	100	100	100	100	100
			2	Presentase PMKS yang ditangani	70	71,5	71,75	72,20	72,85	72,85
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar									
	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	1	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1.681	125	125	125	125	2.181
			2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	62,12	65,60	67,63	70,00	74,85	74,85
	2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Ekonomi	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,46	0,47	0,49	0,52	0,55	0,55
			2	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	73,50	73,70	73,98	74,28	74,61	74,61
			3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	73,00	75,00	80,00	81,00	85,00	85,00



No.	Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
V	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi									
	1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	77,80	82,65	88,30	90,50	90,50
			3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (point)	48,91	49,21	49,36	49,52	49,67	49,67
			4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (point)	2.761	2.756,36	2.754,05	2.751,73	2.749,42	2.749,42
VI	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah									
	1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
VII	Meningkatkan Daya Saing Daerah									
	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	46,21	50,47	52,74	78,20	117,67	117,67
			2	Rasio Ketergantungan (%)	65,28	74,06	77,25	80,33	83,42	83,42
			3	Nilai Tukar Petani (point)	102,69	108,48	111,45	114,43	117,40	117,40
	2	Meningkatnya Iklim Berinvestasi	1	Jumlah nilai investasi (miliar rupiah)	329	60,5	70,5	80,5	90	90
	3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	1	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	10.252	103.052	280.732	285.777	290.386	290.386
			2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	35.264	45.937	78.231	80.276	83.472	83.472





BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lembata 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Lembata 2023-2026.

6.1 STRATEGI

Strategi pembangunan daerah 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diterjemahkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan prioritas dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional maka disusunlah strategi pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel VI. 1 berikut:

Tabel VI. 1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;	1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;	Strategi 1. Meningkatkan Produksi dan Pengolahan Komoditas pada Sektor Basis Pertanian dan Perikanan yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, Promosi dan Kepastian Pasar
		2 Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah	
		3 Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja	Strategi 2. meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; Strategi 3. Penguatan



				Kewirausahaan dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
		4	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan	Strategi 4, Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi dan keamanan pangan hasil pertanian dan perikanan
2	Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan Lingkungan Sosial	Strategi 5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
				Strategi 6. Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Lembata/Kecamatan yang harmonis
		2	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi 7. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bencana dan adaptasi perubahan iklim
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	1	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing	Strategi 8. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
				Strategi 9. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat
				Strategi 10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
				Strategi 11. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
		2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Strategi 12. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar	Strategi 13. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
				Strategi 14. Penyediaan akses air minum layak dan aman
				Strategi 15. Penyediaan akses layanan sanitasi layak dan aman
		2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Strategi 16. Penyelenggaraan sistem transportasi darat.
				Strategi 17. Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan



5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi;	1	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Strategi 18. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
				Strategi 19. Pengelolaan kelembagaan instansi pemerintah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN
6	Meningkatkan Kemampuan keuangan Daerah	1	Meningkatnya pendapatan daerah	strategi 20. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sumber Pendapatan Lainnya
7	Meningkatkan daya saing daerah	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	Strategi 21. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing Daerah
		2	meningkatnya Iklim Berinvestasi	Strategi 22. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah
		3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	Strategi 23. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Darat
				Strategi 24. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut
				Strategi 25. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar tabel VI. 2 berikut:



Tabel VI. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;	1	Strategi 1. Meningkatkan Produksi dan Pengolahan Komoditas pada Sektor Basis Pertanian dan Perikanan yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, Promosi dan Kepastian Pasar	1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian pada Sektor Basis dan Perikanan Berkelanjutan
		2		2	Peningkatan kapasitas Industri pengolahan hasil Pertanian dan Perikanan
				3	Peningkatan Promosi dan Perluasan Jaringan Pemasaran
		3	Strategi 2. meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;	1	Peningkatan Keunggulan Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif
				2	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
				3	Peningkatan SDM serta Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Strategi 3. Penguatan Kewirausahaan dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
				2	Penguatan BUMD, Bumdes dan Koperasi
		4	Strategi 4, Meningkatkan	1	Pemantapan Penyediaan Pangan Masyarakat



Pemerintah Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
			pangan masyarakat yang berkelanjutan	ketersediaan, kualitas konsumsi dan keamanan pangan hasil pertanian dan perikanan	2	Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
2	Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan Lingkungan Sosial	Strategi 5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	1	Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
					2	Melakukan perencanaan lingkungan hidup bagi seluruh aktivitas pembangunan
					3	Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan
		2	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi 6. Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Lembata/Kecamatan yang harmonis	1	Mengembangkan tata kota yang bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya
					2	Penguatan regulasi terkait penanggulangan bencana daerah
					3	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Lingkungan terhadap Adaptasi Perubahan Iklim
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	1	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing	Strategi 8. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
					2	Peningkatan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
					3	Peningkatan layanan Kependudukan dan



No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
						Pencatatan Sipil
				Strategi 9. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata
					2	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
					3	Pengembangan Literasi
					4	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Strategi 10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Percepatan penurunan stunting Terintegrasi
					2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
					3	Antisipasi dan Penanganan Pandemi Covid-19
					4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Strategi 11. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	1	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Kelembagaannya serta Keolahragaan
					2	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan dan anak
		2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Strategi 12. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	1	Pengelolaan dan perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan tepat sasaran
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar	Strategi 13. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	1	Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
	pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;			Strategi 14. Penyediaan akses air minum layak dan aman	1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) konsep sharing budget
				Strategi 15. Penyediaan akses layanan sanitasi layak dan aman	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi Layak dan Aman berbasis masyarakat
		2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Strategi 16. Penyelenggaraan sistem transportasi darat.	1	Penyediaan Sistem Jaringan Transportasi Darat
				Strategi 17. Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	1	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi;	1	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Strategi 18. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	1	Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
				Strategi 19. Pengelolaan kelembagaan instansi pemerintah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN	1	Penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah
					2	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi
					3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN
6	Meningkatkan Kemampuan keuangan Daerah	1	Meningkatnya pendapatan daerah	strategi 20. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sumber Pendapatan Lainnya	1	Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan



No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
7	Meningkatkan daya saing daerah	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	Strategi 21. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing Daerah	1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					2	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	meningkatnya Iklim Berinvestasi	Strategi 22. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah	1	Pemberian kemudahan investasi dan optimalisasi pemanfaatan asset
		3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	Strategi 23. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Darat	1	Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
				Strategi 24. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut	1	Penyediaan Sistem Jaringan Transportasi Laut kewenangan kabupaten
				Strategi 25. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi	1	Koordinasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi



Tabel VI. 3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata Berdasarkan Tahun Perencanaan

ARAH KEBIJAKAN							
Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian pada Sektor Basis dan Perikanan Berkelanjutan	1	Peningkatan kapasitas Industri pengolahan hasil Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Promosi dan Perluasan Jaringan Pemasaran	1	Pengelolaan dan perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan tepat sasaran
2	Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi	2	Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2	Peningkatan Keunggulan Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	2	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
3	Peningkatan Kapasitas SDM, Inovasi dan Teknologi Pertanian dan Perikanan serta Penataan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	3	Penguatan BUMD, Bumdes, Koperasi	3	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3	Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan
4	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4	Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	4	Peningkatan SDM serta Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	Mengembangkan tata kota yang bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya



ARAH KEBIJAKAN							
Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
5	Pemantapan Penyediaan Pangan Masyarakat	5	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	5	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) konsep sharing budget	5	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Tingkat Kecamatan dan Desa
6	Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata	6	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Kelembagaannya serta Keolahragaan	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi Layak dan Aman berbasis masyarakat		
7	Pengembangan Literasi	7	Peningkatan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Penyediaan Sistem Jaringan Transportasi Laut kewenangan kabupaten		
8	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	8	Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		
9	Percepatan penurunan stunting Terintegrasi	9	Koordinasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan	9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum		



ARAH KEBIJAKAN							
Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Komunikasi				
10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	10	Kepastian Kepemilikan Tanah Pemda	10	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi		
11	Antisipasi dan Penanganan Pandemi Covid-19	11	Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan literasi bencana bagi masyarakat	11	Pemberian kemudahan investasi dan optimalisasi pemanfaatan asset		
12	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Lingkungan terhadap Adaptasi Perubahan Iklim				
13	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN				
14	Peningkatan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	14	Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan				
15	Pengembangan rumah layak huni dan penataan						



ARAH KEBIJAKAN							
Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
	kawasan permukiman						
16	Penyediaan Sistem Jaringan Transportasi Darat						
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Ruang Kabupaten						
18	Melakukan perencanaan lingkungan hidup bagi seluruh aktivitas pembangunan						
19	Penguatan regulasi terkait penanggulangan bencana daerah						
20	Penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah						
21	Pemantapan Sistem dan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah						



6.3 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata, dirumuskan dengan merujuk pada telaah Bab II, III, IV dan V, sehingga dapat diperoleh indikator strategis program yang menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana yang telah ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja, dan data dasar. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata yang dilaksanakan pada periode RPD 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel VI. 4 Sementara itu, Tabel VI. 5 akan menjelaskan lebih rinci tentang program-program yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lembata beserta pagu indikatifnya, sebagai penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan pembangunan tersebut di atas.



Tabel VI. 4
Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;	1	Strategi Meningkatkan Produksi dan Pengolahan Komoditas pada Sektor Basis Pertanian dan Perikanan yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, Promosi dan Kepastian Pasar	1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian pada Sektor Basis dan Perikanan Berkelanjutan	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
					3	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
					4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
					5	Program Perizinan usaha pertanian
					6	Program Program Penyuluhan pertanian
					7	Program Pengelolaan perikanan tangkap
					8	Program Pengelolaan perikanan budidaya
				2. Peningkatan kapasitas Industri pengolahan hasil Pertanian dan Perikanan	9	Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
					10	Program Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan
				3. Peningkatan Promosi dan Perluasan Jaringan Pemasaran	11	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan
					12	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
					13	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting



				14	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
3	Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja	Strategi 2. meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;	1. Peningkatan Keunggulan Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	1	Program pemasaran pariwisata
			3. Peningkatan SDM serta Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
		Strategi 3. Penguatan Kewirausahaan dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
				2	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				3	Program Penempatan tenaga kerja
				4	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian
				5	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			2. Penguatan BUMD, Bumdes dan Koperasi	6	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
				7	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian
				8	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
4	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat yang	Strategi 4, Meningkatkan	1. Pemantapan Penyediaan Pangan	1	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat



			berkelanjutan	ketersediaan, kualitas konsumsi dan keamanan pangan hasil pertanian dan perikanan	Masyarakat	2	Program Penanganan kerawanan pangan
					2. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	3	Program Pengawasan keamanan pangan
2	Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan Lingkungan Sosial	Strategi 5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	1. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
						2	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
						3	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
						4	Program pengelolaan bersampahan
					2. Melakukan perencanaan lingkungan hidup bagi seluruh aktivitas pembangunan	1	Program perencanaan lingkungan hidup
					3. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan	1	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
				Strategi 6. Pengembangan Ibu	1. Mengembangkan tata kota yang bersih, sehat,	1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum



Pemerintah Kabupaten Lembata

			Kota Kabupaten Lembata/Kecamatan yang harmonis	indah, tertib, nyaman dan berbudaya	2	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas
		2	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi 7. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bencana dan adaptasi perubahan iklim	1	Program penanggulangan bencana
				2. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan literasi bencana bagi masyarakat	1	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
				3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Lingkungan terhadap Adaptasi Perubahan Iklim	1	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat
					2	Program penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat
					1	
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	1	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing	Strategi 8. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	1	Program pengendalian penduduk
				2. Peningkatan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	1	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					2	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				3. Peningkatan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Program pendaftaran penduduk
					2	Program pencatatan sipil
					3	Program pengelolaan administrasi kependudukan
			Strategi 9.	1. Peningkatan kualitas	1	Program pengelolaan pendidikan



			Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	dan layanan pendidikan yang merata	2	Program pendidik dan tenaga kependidikan
				2. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	1	Program pengembangan kebudayaan
					2	Program pengembangan kesenian
					3	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
				3. Pengembangan Literasi	1	Program pembinaan perpustakaan
				4. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
			Strategi 10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Percepatan penurunan stunting Terintegrasi	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				3. Antisipasi dan Penanganan Pandemi Covid-19	2	Program sediaan farmasi, kesehatan dan makanan minuman
				4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Strategi 11. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	1. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Kelembagaannya serta Keolahragaan	1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
					2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
				2. Meningkatkan Pemberdayaan perempuan	1	Program pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan



				dan anak	2	Program perlindungan perempuan
					3	Program pemenuhan hak anak
		2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Strategi 12. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	1	Program pemberdayaan sosial
				Pengelolaan dan perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan tepat sasaran	2	Program rehabilitasi sosial
					3	Program jaminan sosial
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar	Strategi 13. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	1	Program pengembangan perumahan
				Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman	2	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
				Strategi 14. Penyediaan akses air minum layak dan aman	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Strategi 15. Penyediaan akses layanan sanitasi layak dan aman	1	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum
					2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Strategi 16. Penyelenggaraan sistem transportasi darat.	1	Program penyelenggaraan jalan
				Strategi 17. Pengelolaan Sumber Daya Air	2	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



				Berkelanjutan			
5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi;	1	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Strategi 18. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						2	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
						3	Program pengelolaan keuangan daerah
						4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
						5	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
						6	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
						7	Program perekonomian dan pembangunan
						8	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
						9	Program administrasi pemerintahan desa
				Strategi 19. Pengelolaan kelembagaan instansi pemerintah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN	1. Penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah	1	Program administrasi umum
					2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi	2	Program aplikasi informatika
					3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN	3	Program pengembangan sumber daya manusia



6	Meningkatkan Kemampuan keuangan Daerah	1	Meningkatnya pendapatan daerah	strategi 20. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sumber Pendapatan Lainnya	1. Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan	1	Program pengelolaan pendapatan daerah
7	Meningkatkan daya saing daerah	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	Strategi 21. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing Daerah	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
						3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	meningkatnya Iklim Berinvestasi	Strategi 22. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah	Pemberian kemudahan investasi dan optimalisasi pemanfaatan asset	1	Program pelayanan penanaman modal
						2	Program pengelolaan barang milik daerah
						3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan



					4	Program Survey, Pengfukuran dan Pemetaan
	3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	Strategi 23. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Darat	Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			Strategi 24. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut	Penyediaan Sistem Jaringan Transportasi Laut kewenangan kabupaten	2	Program pengelolaan pelayaran
			Strategi 25. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi	Koordinasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi	3	Program informasi dan komunikasi publik



Tabel VI. 5
Program-Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata Beserta Pagu Indikatifnya

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 1	Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;					12.832.622.549		14.137.878.339		16.225.622.339		16.554.622.339		56.821.745.566	
Sasaran 1.1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;														
Sasaran 1.2	Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah														
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi Sektor Pertanian	75.500	Ton	76.200	2.791.858.886	77.700	2.891.858.886	79.300	3.211.858.886	80.900	3.091.858.886	80.900	11.987.435.544	DPKP
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Produksi Sektor Pertanian	75.500	Ton	76.200	859.540.931	77.700	759.540.931	79.300	1.619.540.931	80.900	1.869.540.931	80.900	5.108.163.724	DPKP
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	%	100	569.996.560	100	569.996.560	100	569.996.560	100	569.996.560	100	2.279.986.240	DPKP
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	100	%	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	1.320.000.000	DPKP



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (jumlah)	7500	Ton	8000	643.000.000	8500	643.000.000	9000	943.000.000	9500	943.000.000	9500	243.000.000	DP
	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (jumlah)	7500	Ton	8000	707.128.000	8500	957.384.000	9000	1.045.384.000	9500	1.145.384.000	9500	3.855.280.000	DP
	Program Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi Ikan	50	%	50	630.000.000	50	730.000.000	50	1.030.000.000	50	1.030.000.000	50	3.420.000.000	DP
	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Tersedianya dokumen perizinan dan pendaftaran perusahaan	1	Laporan	1	260.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	4	280.000.000	4	1.100.000.000	DISKOPE RINDAG
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	80	%	80	300.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	80	1.200.000.000	DISKOPE RINDAG
	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan bina kelompok pedagang	100	%	100	275.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	100	1.250.000.000	DISKOPE RINDAG
	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan bina kelompok pedagang	100	%	100	225.000.000	100	255.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	1.330.000.000	DISKOPE RINDAG



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 1.3.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja														
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	3.913	Orang	4000	452.523.510	4500	627.523.510	6000	627.523.510	7000	627.523.510	21500	2.335.094.040	DISPAREK RAF
	Program pemasaran pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	3	Hari	3	483.679.300	3	658.679.300	4	658.679.300	4	658.679.300	4	2.459.717.200	DISPAREK RAF
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Lama Kunjungan Wisata	3	Hari	3	550.147.680	3	700.147.470	4	700.147.470	4	700.147.470	4	2.650.590.090	DISPAREK RAF
	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	82,22	%	86,67	600.000.000	88,89	650.000.000	95,56	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	2.550.000.000	DISKOPE RINDAG
	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	%	100	397.841.170	100	599.841.170	100	581.585.170	100	630.585.170	100	2.209.852.680	DISNAKE RTRANS
	Program Penempatan tenaga kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	43	%	43,5	366.041.140	44	469.041.140	44,5	562.041.140	45	562.041.140	45	1.959.164.560	DISNAKE RTRANS
	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	45,61	%	70,18	600.000.000	78,95	600.000.000	87,72	600.000.000	92,11	600.000.000	92,11	2.400.000.000	DISKOPE RINDAG
	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif	45,61	%	70,18	510.000.000	78,95	510.000.000	87,72	510.000.000	92,11	510.000.000	92,11	2.040.000.000	DISKOPE RINDAG



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 1.4.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan														
	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	90	%	90	698.095.102	90	698.095.102	90	698.095.102	90	698.095.102	90	2.792.380.408	DPKP
	Program Penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan Pangan	60	%	60	276.652.020	60	276.652.020	60	276.652.020	60	276.652.020	60	1.106.608.080	DPKP
	Program Pengawasan keamanan pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90	%	90	306.118.250	90	306.118.250	90	306.118.250	90	306.118.250	90	1.224.473.000	DPKP
Tujuan 2	Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;					4.355.225.510		4.795.225.510		5.395.398.630		5.844.398.630		20.390.248.280	
Sasaran 2.1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan Lingkungan Sosial														
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Persentase kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan		%	25	553.500.000	25	553.500.000	25	553.500.000	25	553.500.000	25	2.214.000.000	DLH
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)		%	25	260.000.000	25	260.000.000	25	260.000.000	25	260.000.000	25	1.040.000.000	DLH



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		Dokumen	1	360.603.000	1	360.603.000	1	460.603.000	1	460.603.000	1	1.642.412.000	DLH
	Program pengelolaan bersampahan	Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan		%	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	1.580.000.000	DLH
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan		Dokumen	1	510.000.000	1	510.000.000	1	710.000.000	1	810.000.000	1	2.540.000.000	DLH
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)		%	25	584.920.650	25	674.920.650	25	674.920.650	25	674.920.650	25	2.609.682.600	SATPOLPP



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 2.2.	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim														
	Program penanggulangan bencana	Cakupan Bencana yang tertangani, Logistik dan jDesa/Kota tangguh bencana yang dibentuk		%	100	970.063.700	100	1.170.063.700	100	1.270.063.700	100	1.270.063.700	100	4.680.254.800	BPBD
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		%	25	250.000.000	25	400.000.000	25	600.173.120	25	849.173.120	25	2.099.346.240	SATPOLPP
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat	Meningkatnya Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Dokumen	1	351.138.160	1	351.138.160	1	351.138.160	1	451.138.160	1	1.504.552.640	DLH
	Program penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat Peduli Lingkungan		Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	480.000.000	DLH



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 3	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;				119.518.140.485		126.857.362.529		130.106.880.783		130.393.500.951		521.425.884.748		
Sasaran 3.1.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing														
	Program pengendalian penduduk	Cakupan Rata-rata jumlah anak per keluarga		%	25	309.619.910	25	389.619.910	25	389.619.910	25	489.619.910	25	1.578.479.640	DinSosP2 KB
	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Rasio akseptor KB dan peserta KB aktif		%	25	4.299.818.600	25	4.319.735.890	25	4.319.735.890	25	4.319.735.890	25	17.259.026.270	DinSosP2 KB
	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bertambahnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		%	25	697.960.000	25	697.960.000	25	697.960.000	25	697.960.000	25	2.791.840.000	DinSosP2 KB
	Program pendaftaran penduduk	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan		Dokumen	1	392.333.870	1	502.332.500	1	502.332.500	1	662.332.500	1	2.059.331.370	DISDUKC APIL
	Program pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil		Dokumen	1	452.621.890	1	452.621.890	1	452.621.890	1	452.621.890	1	1.810.487.560	DISDUKC APIL
	Program pengelolaan administrasi kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan		%	25	404.300.700	25	430.430.070	25	530.430.070	25	530.430.070	25	1.895.590.910	DISDUKC APIL
	Program pengelolaan pendidikan	Angka melek huruf		%	100	41.803.190.906	100	41.803.190.906	100	43.502.709.160	100	44.502.709.160	100	171.611.800.132	DISDIK



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		%	25	570.115.100	25	754.101.914	25	754.101.914	25	754.101.914	25	2.832.420.842	DISDIK
	Program pengembangan kebudayaan	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada event daerah dan Nasional		Even	4	708.366.780	4	788.366.780	4	788.366.780	4	788.366.780	4	3.073.467.120	DKOK
	Program pengembangan kesenian	Meningkatkan Kesenian Tradisional daerah untuk diperkenalkan dalam berbagai event kebudayaan daerah dan Nasional		Kesenian	4	459.284.210	4	309.284.210	4	609.284.210	4	792.842.100	4	2.170.694.730	DKOK
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Meningkatnya pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Even	1	257.057.300	1	277.057.300	1	277.057.300	1	277.057.300	1	1.088.229.200	DKOK
	Program pembinaan perpustakaan	Meningkatkan Pengelolaan perpustakaan Daerah		%	25	632.538.150	25	932.538.150	25	932.538.150	25	932.538.150	25	3.430.152.600	DKP



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		%	25	302.166.440	25	602.166.440	25	352.166.440	25	395.228.718	25	1.651.728.038	KESBANG POL
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara		Unit	20	60.354.019.700	20	64.854.019.700	20	66.354.019.700	20	65.354.019.700	20	271.466.078.800	DinKes & RSUD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk		%	5	588.664.540	5	588.664.540	25	588.664.540	25	588.664.540	25	2.354.658.160	DinKes & RSUD
	Program sediaan farmasi, kesehatan dan makanan minuman	Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin Usaha		dokumen	10	1.487.990.190	10	2.487.990.190	10	2.487.990.190	10	2.487.990.190	10	8.951.960.760	DinKes & RSUD
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		%	25	885.793.550	25	985.793.550	25	985.793.550	25	985.793.550	25	3.843.174.200	DinKes & RSUD
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda		Kelompok	3	592.349.669	3	592.349.669	3	592.349.669	3	592.349.669	3	2.369.398.676	DKOK
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkedcamatan dan antar Kabupaten/Kota		Laporan	4	434.842.400	4	584.842.400	4	584.842.400	4	584.842.400	4	2.189.369.600	DKOK



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta, jumlah tenaga kerja dibawah umur, dan Partisipasi angkatan kerja perempuan		%	25	582.868.630	25	682.868.630	25	782.868.630	25	582.868.630	25	2.631.474.520	DP3A
	Program perlindungan perempuan	Menurunnya Rasio KDRT dan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan		%	25	473.458.850	25	473.458.850	25	473.458.850	25	473.458.850	25	1.893.835.400	DP3A
	Program pemenuhan hak anak	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak		%	25	648.111.100	25	848.111.100	25	648.111.100	25	648.111.100	25	2.792.444.400	DP3A



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 3.2.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk														
	Program pemberdayaan sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		%	0	430.000.000	25	630.000.000	25	630.000.000	25	630.000.000	25	2.320.000.000	DinSosP2 KB
	Program rehabilitasi sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		%	25	804.731.660	25	923.921.600	25	923.921.600	25	923.921.600	25	3.576.496.460	DinSosP2 KB
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya Penanganan Terhadap Anak-Anak Terlantar		Anak	9513	945.936.340	10000	945.936.340	10500	945.936.340	11000	945.936.340	11000	3.783.745.360	DinSosP2 KB
Tujuan 4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;					58.007.826.486		62.362.965.696		64.757.826.446		68.857.826.446		253.986.445.074	
Sasaran 4.1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar														
	Program pengembangan perumahan	Jumlah Rumah Lauak Huni yang dibangun		Unit	125	385.000.040	125	385.000.000	125	685.000.000	125	385.000.000	2.181	1.840.000.040	DISPERKI MTAN



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Menurunnya Persentase kawasan kumuh perkotaan Khususnya Kota Lewoleba		%	15	3.845.617.020	20	3.845.617.020	30	3.845.617.020	30	3.845.617.020	95	15.382.468.080	DISPERKI MTAN
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum		%	75	7.518.005.811	80	8.768.005.811	81	7.768.005.811	85	7.268.005.811	85	31.322.023.244	DPUPR
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		%	15	1.500.000.000	20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	20	1.500.000.000	75	6.200.000.000	DISPERKI MTAN
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi		%	65,60	3.195.852.195	67,63	6.245.852.195	70	4.745.852.195	74,85	3.745.852.195	74,85	17.933.408.780	DPUPR
Sasaran 4.2.	Meningkatnya infrastruktur ekonomi														
	Program penyelenggaraan jalan	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)		%	45	40.763.351.420	47	40.618.490.670	50	45.213.351.420	55	51.163.351.420	55	177.758.544.930	DPUPR
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Persentase air baku		%	16	800.000.000	16	900.000.000	16	900.000.000	16	950.000.000	16	3.550.000.000	DPUPR



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 5	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi;				215.686.057.398		225.942.010.891		208.732.109.427		207.305.368.677		829.103.262.121		
Sasaran 5.1.	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif														
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Persentase Audit Kinerja dan Keuangan		%	25	1.874.399.980	25	2.074.399.980	25	1.874.399.980	25	1.874.399.980	25	7.697.599.920	INSPEKTORAT
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat		Dokumen	0	300.000.000	0	300.000.000	0	500.000.000	1	500.000.000	1	1.600.000.000	INSPEKTORAT
	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.		%	25	200.162.013.006	25	209.342.966.499	25	190.233.065.035	100	188.156.324.285	100	787.894.368.825	BKAD
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Dok	7	1.661.245.780	8	2.111.245.780	9	2.111.245.780	40	2.411.245.780	40	8.294.983.120	BAPPELIBANGDA
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan		%	25	883.742.830	25	833.742.830	25	833.742.830	100	1.033.742.830	100	3.584.971.320	BAPPELIBANGDA



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
			Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		%	25	1.191.361.734	25	1.191.361.734	25	1.191.361.734	25	1.191.361.734	25	4.765.446.936	Setda
	Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi perekonomian		%	25	472.823.000	25	472.823.000	25	472.823.000	25	472.823.000	25	1.891.292.000	Setda
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi		%	25	765.000.000	151	865.000.000	151	965.000.000	151	1.015.000.000	100	3.610.000.000	Kecamatan
	Program administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Desa	9	Desa	kec	765.000.000	151	865.000.000	151	965.000.000	151	1.015.000.000	151	3.610.000.000	DPMD
	Program administrasi umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		%	100	765.000.000	151	865.000.000	151	965.000.000	151	1.015.000.000	100	3.610.000.000	Setda dan Set.DPRD
	Program aplikasi informatika	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika		Aplikasi	1	529.900.000	1	604.900.000	1	704.900.000	1	704.900.000	1	2.544.600.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN		%	25	5.915.571.068	25	5.915.571.068	25	6.915.571.068	25	6.915.571.068			



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
					Target	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengembangan sumber daya manusia	Jumlah Asn yang mengikuti bimtek		org	12	400.000.000	18	500.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000			
Tujuan 6	Meningkatkan Kemampuan keuangan Daerah					1.240.357.410		1.240.357.410		1.240.357.410		1.240.357.410		4.961.429.640	
Sasaran 6.1.	Meningkatnya pendapatan daerah														
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah		%	25	1.240.357.410	25	1.240.357.410	25	1.240.357.410	100	1.240.357.410	100	4.961.429.640	BPD
Tujuan 7	Meningkatkan Daya saing Daerah					5.205.522.572		6.089.924.835		6.214.388.666		7.175.924.834		24.685.760.907	
Sasaran 7.1.	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah														
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosoal dan budaya		%	25	450.961.650	25	450.961.650	25	450.961.650	25	450.961.650	25	1.803.846.600	KESBANG POL



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		%	25	419.401.109	25	693.399.936	25	817.863.767	25	1.093.399.935	25	3.024.064.747	KESBANG POL
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		%	25	155.100.000	25	355.100.000	25	155.100.000	25	255.100.000	25	920.400.000	KESBANG POL
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		%	25	487.472.690	25	647.877.313		647.877.313	100	647.877.313	100	2.431.104.629	BAPPELIT BANGDA
Sasaran 7.2.	Meningkatnya Iklim Berinvestasi														
	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Investor	5	599.226.997	5	649.225.810	5	649.225.810	5	749.225.810	5	2.646.904.427	DPMPSTP
	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.		%	25	1.169.427.334	25	1.169.427.334	25	1.169.427.334	100	1.169.427.334	100	4.677.709.336	BKAD



Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD Penanggungjawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pebangunan oleh pemerintah kabupaten		Jumlah	15	872.808.610	15	872.808.610	25	872.808.610	25	1.358.808.610	80	3.977.234.440	DISPERKIMTAN
	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Jumlah tanah pemerintah daerah bersertifikat		Dokumen	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	557	1.200.000.000	DISPERKIMTAN
Sasaran 7.3.	Tersedianya Fasilitas Wilayah														
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Dokumen	1	339.053.430	1	539.053.430	1	739.053.430	1	739.053.430	1	2.356.213.720	DISHUB
	Program pengelolaan pelayaran	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran		Dokumen	1	130.460.752	1	130.460.752	1	130.460.752	1	130.460.752	1	521.843.008	DISHUB
	Program informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Dokumen	1	281.610.000	1	281.610.000	1	281.610.000	1	281.610.000	1	1.126.440.000	DISKOMINFO



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan rumusan kebutuhan pendanaan untuk penyusunan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel VII.1
Kerangka pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	826.111.141.622	859.686.579.303	865.127.187.922	873.315.411.006
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56.918.987.368	60.582.625.242	64.595.490.694	71.284.583.452
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.612.740.106,00	17.496.425.133,00	20.888.860.294,00	24.971.946.791,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.770.709.050,00	29.346.749.005,00	30.937.716.955,00	33.916.861.684,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	6.500.000.000	6.825.000.000	7.507.500.000	8.258.250.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.035.538.212	6.914.451.104,00	5.261.413.445,00	4.137.524.977,00
1.2	Pendapatan Transfer	736.718.204.254	766.239.594.561	767.257.407.753	768.326.111.605
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	717.331.286.307	745.883.330.718,00	745.883.330.718,00	745.883.330.718,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.386.917.947	20.356.263.843,00	21.374.077.035,00	22.442.780.887,00



Pemerintah Kabupaten Lembata

1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.473.950.000	32.864.359.500	33.274.289.475	33.704.715.949
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.473.950.000	32.864.359.500	33.274.289.475	33.704.715.949,00
2	Belanja	791.468.289.622,00	825.043.727.303,00	830.484.335.922,00	841.351.130.006,00
2.1	Belanja Operasi	515.040.463.099,00	549.543.178.035,00	552.100.456.074,00	561.950.730.696,00
2.1.1	Belanja Pegawai	340.857.124.566,00	359.711.903.442,00	372.704.568.272,00	384.257.912.949,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.421.282.605,00	144.098.521.172,00	165.317.347.646,00	165.617.347.695,00
2.1.3	Belanja Bunga	13.762.055.928,00	11.732.753.421,00	9.622.851.957,00	7.546.111.207,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.000.000.000,00	32.000.000.000,00	2.455.688.199,00	2.529.358.845,00
2.2	Belanja Modal	100.757.725.841,00	92.972.984.310,00	92.695.666.653,00	92.695.666.653,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00	1.179.191.076,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.666.589.982,00	22.666.589.982,00	21.666.589.982,00	22.166.589.982,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.896.636.347,00	21.896.636.347,00	21.619.318.690,00	21.619.318.690,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	60.623.413.506,00	42.838.671.975,00	43.838.671.975,00	43.338.671.975,00



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00	4.391.894.930,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.527.209.891,00	10.409.489.496,00	11.527.209.888,00	10.414.699.529,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.527.209.891,00	10.409.489.496,00	11.527.209.888,00	10.414.699.529,00
2.4	Belanja Transfer	170.142.890.791,00	172.118.075.462,00	174.161.003.307,00	176.290.033.128,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.461.274.010,00	1.749.642.513,00	2.088.886.029,00	2.497.194.679,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	168.681.616.781,00	170.368.432.949,00	172.072.117.278,00	173.792.838.449,00
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	32.142.852.000,00	29.464.281.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	34.642.852.000,00	31.964.281.000,00
	Pembiayaan Netto	(34.642.852.000,00)	(34.642.852.000,00)	(34.642.852.000,00)	(31.964.281.000,00)

Sumber : Badan Keuanga dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022



7.2 Program Pembangunan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan program perangkat daerah yang dirumuskan dalam Renstra (Renstra PD) beserta indikator dan target kinerja, Pagu indikatif perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan urusan.

Penetapan jumlah program dan perkiraan pendanaan berdasarkan bidang urusan sebagaimana terlihat pada 7.2 program pembangunan daerah disertai pagu indikatif Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel VII.2
PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			161,457,626,599		163,926,787,057		165,533,187,236		166,574,997,174		657,492,598,066	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	118,945,252,300	100	121,211,186,100	100	121,228,186,100	100	121,318,186,100	100	482,702,810,600	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melek huruf	%	100	41,942,259,199	100	41,961,499,043	100	43,550,899,222	100	44,502,709,160	100	171,957,366,624	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	25	570,115,100	25	754,101,914	25	754,101,914	25	754,101,914	25	2,832,420,842	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				120,485,283,290		126,533,474,920		128,526,871,340		128,177,752,670		503,723,382,220	DinKes & RSUD
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	57,168,815,310	100	57,617,006,940	100	58,110,403,360	100	58,761,284,690	100	231,657,510,300	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Unit	20	60,354,019,700	20	64,854,019,700	20	66,354,019,700	20	65,354,019,700	20	256,916,078,800	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	%	5	588,664,540	5	588,664,540	25	588,664,540	25	588,664,540	25	2,354,658,160	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin Usaha	dokumen	10	1,487,990,190	10	2,487,990,190	10	2,487,990,190	10	2,487,990,190	10	8,951,960,760	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	25	885,793,550	25	985,793,550	25	985,793,550	25	985,793,550	25	3,843,174,200	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				59,463,932,586		64,245,160,876		71,066,262,876		75,788,735,157		270,564,091,494	DPUPR
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	6,574,909,490	100	6,700,998,520	100	6,877,239,770	100	7,099,712,051	100	27,252,859,830	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Persentase air baku	%	16	800,000,000	16	900,000,000	16	900,000,000	16	950,000,000	16	3,550,000,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%	75	7,518,005,811	80	8,768,005,811	81	7,768,005,811	85	7,268,005,811	85	31,322,023,244	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan yang memiliki sarana pengolahan sampah	%	0	-	1	50,000,000	1	800,000,000	1	1,050,000,000	1	1,900,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	65,60	3,195,852,195	67,63	6,245,852,195	70	4,745,852,195	74,85	3,745,852,195	74,85	17,933,408,780	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bertambahnya Panjang tanggul dan atau kanal pengendali banjir yang dibangun	%	0	-	0	-	0	500,000,000	1	500,000,000	1	1,000,000,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bertambahnya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif	Unit	0	-	4	300,000,000	1	3,050,000,000	1	3,050,000,000	6	6,400,000,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	0	-	2	50,000,000	2	550,000,000	2	50,000,000	2	650,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)	%	45	40,763,351,420	47	40,618,490,670	50	45,213,351,420	55	51,163,351,420	55	177,758,544,930	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	15	200,000,000	15	200,000,000	20	250,000,000	30	300,000,000	80	950,000,000	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah	Dokumen	1	411,813,670	1	411,813,680	1	411,813,680	1	611,813,680	1	1,847,254,710	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9,288,057,696		9,447,870,176		9,826,178,006		9,579,018,532		38,141,124,410	DISPERKIMTAN
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,057,440,636	100	3,117,253,156	100	3,195,560,986	100	3,348,401,512	100	12,718,656,290	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Lauak Huni yang dibangun	Unit	125	385,000,040	125	385,000,000	125	685,000,000	125	385,000,000	2,181	1,840,000,040	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase permukiman yang tertata	%	20	500,000,000	20	500,000,000	25	500,000,000	25	500,000,000	90	2,000,000,000	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya Persentase kawasan kumuh perkotaan Khususnya Kota Lewoleba	%	15	3,845,617,020	20	3,845,617,020	30	3,845,617,020	30	3,845,617,020	95	15,382,468,080	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	15	1,500,000,000	20	1,600,000,000	20	1,600,000,000	20	1,500,000,000	75	6,200,000,000	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				799,808,610		1,012,808,610		1,412,808,610		1,699,808,610		4,925,234,440	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pebangunan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah	15	472,808,610	15	672,808,610	25	1,072,808,610	25	1,358,808,610	80	3,577,234,440	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah koordinasi penetapan tanah ulayat	Kali	1	5,000,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	21,500,000	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah koordinasi pengelolaan tanah kosong	Kali	1	10,000,000	1	12,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	45,000,000	
2	10	13			PROGRAM SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Jumlah tanah pemerintah daerah bersertifikat	Dokumen	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	557	1,200,000,000	
2	10	16			PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Tersedianya sistem informasi pertanahan	Unit	1	7,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	39,000,000	
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGEKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Terselesaikannya jumlah kasus sengketa, konfli dan perkara pertanahan	Jumlah	1	5,000,000	1	12,500,000	1	12,500,000	1	12,500,000	1	42,500,000	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLUNDUNGAN MASYARAKAT				5,465,799,110		5,875,999,676		6,165,128,377		6,461,199,337		23,968,126,500	SATPOLPP
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	4,730,878,460	100	4,801,079,026	100	4,890,034,607	100	5,053,789,077	100	19,475,781,169	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrman, keindahan)	%	25	484,920,650	25	674,920,650	25	674,920,650	25	674,920,650	25	2,509,682,600	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	25	250,000,000	25	400,000,000	25	600,173,120	25	732,489,611	25	1,982,662,731	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLUNDUNGAN MASYARAKAT				3,410,541,700		3,656,160,860		3,819,920,500		3,957,849,131		14,844,472,191	BPBD
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,440,478,000	100	2,486,097,160	100	2,549,856,800	100	2,687,785,431	100	10,164,217,391	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Bencana yang tertangani, Logistik dan jDesa/Kota tangguh bencana yang dibentuk	%	100	970,063,700	100	1,170,063,700	100	1,270,063,700	100	1,270,063,700	100	4,680,254,800	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,947,773,040		4,098,471,508		4,242,437,440		4,485,702,520		16,774,384,507	DPMD
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	25	2,628,015,890	25	2,678,714,358	25	2,722,680,290		2,865,945,370	25	10,895,355,907	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa yang Ditata sesuai standar	Desa	42	100,000,000	45	100,000,000	50	100,000,000		100,000,000	55	400,000,000	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Desa	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000		50,000,000	25	350,000,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	%	25	765,000,000	151	865,000,000	151	965,000,000	151	1,015,000,000	25	3,610,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	25	354,757,150	25	354,757,150	25	354,757,150		454,757,150	25	1,519,028,600	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,917,276,410		4,258,745,910		4,188,252,150		4,121,821,046		16,486,095,516	DP3A
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	25	2,096,766,900	25	2,138,236,400	25	2,167,742,640		2,301,311,536	25	8,704,057,476	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender pada APBD	%	25	582,868,630	25	682,868,630	25	782,868,630	25	582,868,630	25	2,631,474,520	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio terhadap Kekerasan Perempuan termasuk Korban TPPO (Per 100.000 Penduduk)	%	25	473,458,850	25	473,458,850	25	473,458,850	25	473,458,850	25	1,893,835,400	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		200,000,000	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memanfaatkan Ssitem Data berbasis Gender dalam Perencanaan Daerah	%	25	16,070,930	25	16,070,930	25	16,070,930		16,070,930	25	64,283,720	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak	%	25	648,111,100	25	848,111,100	25	648,111,100	25	648,111,100	25	2,792,444,400	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	%	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000		50,000,000	25	200,000,000	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,454,243,970		5,989,975,220		6,050,180,060		6,410,090,021		23,904,489,272	DinSosP2KB
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	25	3,063,758,760	25	3,330,300,070	25	3,390,504,910		3,550,414,871	25	13,334,978,612	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	%	25	430,000,000	25	630,000,000	25	630,000,000	25	630,000,000	25	2,320,000,000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke Daerah	%	25	100,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000		50,000,000	25	250,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	804,731,660	25	923,921,600	25	923,921,600	25	923,921,600	25	3,576,496,460	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	%	25	945,936,340	10000	945,936,340	10500	945,936,340	11000	945,936,340	25	3,783,745,360	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	25	109,817,210	25	109,817,210	25	109,817,210		309,817,210	25	639,268,840	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5,307,398,510		5,407,315,800		5,407,315,800		5,507,315,800		21,629,345,910	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	25	309,619,910	25	389,619,910	25	389,619,910	25	489,619,910	25	1,578,479,640	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	%	25	4,299,818,600	25	4,319,735,890	25	4,319,735,890	25	4,319,735,890	25	17,259,026,270	
						Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi	%	25		25		25				25		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57	697,960,000	25	697,960,000	25	697,960,000	25	697,960,000	57	2,791,840,000	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5,716,340,452		5,977,784,081		7,612,167,168		7,779,240,927		27,085,532,629	DLH
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	25	2,481,501,562	25	2,809,122,341	25	3,376,926,008	25	3,518,999,767	25	12,186,549,679	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Persentase Kualitas Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan sarana dan fasilitas	Dokumen	1	354,597,730	1	288,420,580	1	505,000,000	1	330,000,000	1	1,478,018,310	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Persentase kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	%	25	553,500,000	25	553,500,000	25	553,500,000	25	553,500,000	25	2,214,000,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dokumen	1	300,000,000	1	300,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	2,300,000,000	
2	11	04			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	%	25	260,000,000	25	260,000,000	25	260,000,000	25	260,000,000	25	1,040,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan	Dokumen	1	360,603,000	1	360,603,000	1	460,603,000	1	460,603,000	1	1,642,412,000	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dokumen	1	510,000,000	1	510,000,000	1	710,000,000	1	810,000,000	1	2,540,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dokumen	1	351,138,160	1	351,138,160	1	351,138,160	1	451,138,160	1	1,504,552,640	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta masyarakat Peduli Lingkungan	Dokumen	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	480,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	%	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000	100	1,580,000,000	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,688,923,870		4,896,133,553		5,055,992,443		5,380,672,805		20,021,722,671	DISDUKCAPIL
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,407,977,250	100	3,479,059,093	100	3,538,917,983	100	3,703,598,345	100	14,129,552,671	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	392,333,870	1	502,332,500	1	502,332,500	1	662,332,500	1	2,059,331,370	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	452,621,890	1	452,621,890	1	452,621,890	1	452,621,890	1	1,810,487,560	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	25	404,300,700	25	430,430,070	25	530,430,070	25	530,430,070	25	1,895,590,910	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Penyediaan Data Kependudukan	Dokumen	1	31,690,160	1	31,690,000	1	31,690,000	1	31,690,000	1	126,760,160	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4,065,080,637		4,332,375,434		4,588,352,601		4,749,054,196		17,734,862,868	DisHub
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,595,566,455	100	3,662,861,252	100	3,718,838,419	100	3,879,540,014	100	14,856,806,140	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	1	339,053,430	1	539,053,430	1	739,053,430	1	739,053,430	1	2,356,213,720	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Dokumen	1	130,460,752	1	130,460,752	1	130,460,752	1	130,460,752	1	521,843,008	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3,267,094,029		3,386,972,209		3,519,972,344		3,607,122,483		13,781,161,066	DisKomInfo
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,455,584,029	100	2,500,462,209	100	2,533,462,344	100	2,620,612,483	100	10,110,121,066	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dokumen	1	281,610,000	1	281,610,000	1	281,610,000	1	281,610,000	1	1,126,440,000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Aplikasi	1	529,900,000	1	604,900,000	1	704,900,000	1	704,900,000	1	2,544,600,000	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				59,087,090		59,087,090		59,087,090		59,087,090		236,348,360	DisKomInfo
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Dokumen	1	59,087,090	1	59,087,090	1	59,087,090	1	59,087,090	1	236,348,360	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				38,793,000		88,793,000		88,793,000		88,793,000		305,172,000	DisKomInfo
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dokumen	1	38,793,000	1	88,793,000	1	88,793,000	1	88,793,000	1	305,172,000	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5,848,976,632		6,032,862,554		6,135,845,624		6,313,978,271		24,331,663,081	DisKOPERINDAG
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	4,038,976,632	100	4,122,862,554	100	4,225,845,624	100	4,403,978,271	100	16,791,663,081	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	70.18	10,000,000	78.95	10,000,000	87.72	10,000,000	92.11	10,000,000	92.11	40,000,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	%	70.18	600,000,000	78.95	600,000,000	87.72	600,000,000	92.11	600,000,000	92.11	2,400,000,000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	70.18	510,000,000	78.95	510,000,000	87.72	510,000,000	92.11	510,000,000	92.11	2,040,000,000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	86.67	600,000,000	88.89	650,000,000	95.56	650,000,000	100.00	650,000,000	100.00	2,550,000,000	
2	17	07			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	86.67	90,000,000	88.89	140,000,000	95.56	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	510,000,000	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,060,000,000		1,160,000,000		1,305,000,000		1,355,000,000		4,880,000,000	DisKOPERINDAG
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tersedianya dokumen perizinan dan pendaftaran perusahaan	Laporan	1	260,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	4	280,000,000	4	1,100,000,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan	%	80	300,000,000	80	300,000,000	80	300,000,000	80	300,000,000	80	1,200,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang	%	100	275,000,000	100	325,000,000	100	325,000,000	100	325,000,000	100	1,250,000,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan bina kelompok pedagang	%	100	225,000,000	100	255,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	1,330,000,000	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggungjawab
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		%		55,000,000		155,000,000		155,000,000		155,000,000		520,000,000	DisKOPERINDAG
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok industri kecil/pengrajin	%	2.36	45,000,000	2.95	145,000,000	3.35	145,000,000	3.94	145,000,000	3.94	480,000,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan bina kelompok industri kecil/pengrajin	%	2.36	10,000,000	2.95	10,000,000	3.35	10,000,000	3.94	10,000,000	3.94	40,000,000	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		%		2,460,810,587		2,694,959,516		2,746,963,384		2,872,842,350		10,775,575,837	DPMPTSP
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	1,896,209,350	100	1,905,359,466	100	1,957,363,334	100	2,083,242,300	100	7,842,174,450	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5	17,050,000	5	92,050,000	5	92,050,000	5	92,050,000	5	293,200,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5	199,226,997	5	349,225,810	5	349,225,810	5	349,225,810	5	1,246,904,427	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5	321,057,510	5	321,057,510	5	321,057,510	5	321,057,510	5	1,284,230,040	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Lamanya Perijinan	Hari	1	27,266,730	1	27,266,730	1	27,266,730	3	27,266,730	3	109,066,920	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3,502,427,871		3,699,292,032		3,734,327,798		3,823,564,457		14,759,612,158	DKOK
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,475,235,802	100	2,522,099,963	100	2,557,135,729	100	2,646,372,388	100	10,200,843,882	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	Kelompok	3	592,349,669	3	592,349,669	3	592,349,669	3	592,349,669	3	2,369,398,676	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Laporan	4	434,842,400	4	584,842,400	4	584,842,400	4	584,842,400	4	2,189,369,600	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,424,708,290		1,374,708,290		1,674,708,290		1,858,266,180		6,332,391,050	DKOK
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Even	4	708,366,780	4	788,366,780	4	788,366,780	4	788,366,780	4	3,073,467,120	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatkan Kesenian Tradisional daerah untuk diperkenalkan dalam berbagai ivent kebudayaan daerah dan Nasional	Kesenian	4	459,284,210	4	309,284,210	4	609,284,210	4	792,842,100	4	2,170,694,730	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Even	1	257,057,300	1	277,057,300	1	277,057,300	1	277,057,300	1	1,088,229,200	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4,694,394,628		5,249,872,866		5,323,738,275		5,572,025,319		20,840,031,087	DisParEKraf
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,208,044,138	100	3,263,522,586	100	3,337,387,995	100	3,585,675,039	100	13,394,629,757	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4000	452,523,510	4500	627,523,510	6000	627,523,510	7000	627,523,510	21500	2,335,094,040	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	483,679,300	3	658,679,300	4	658,679,300	4	658,679,300	4	2,459,717,200	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	550,147,680	3	700,147,470	4	700,147,470	4	700,147,470	4	2,650,590,090	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				653,038,150		956,288,150		960,163,150		967,020,650		3,536,510,100	DKP
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatkan Pengelolaan perpustakaan Daerah	%	25	632,538,150	25	932,538,150	25	932,538,150	25	932,538,150	100	3,430,152,600	
2	23	02			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi naskah nasional dan naskah kuno	%	25	20,500,000	25	23,750,000	25	27,625,000	25	34,482,500	100	106,357,500	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3,233,165,098		3,270,031,166		3,369,114,051		3,729,490,927		13,601,801,242	DKP
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,021,938,986	100	3,058,805,054	100	3,157,887,939	100	3,318,264,815	100	12,556,896,794	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	%	25	104,824,310	20	104,824,310	20	104,824,310	20	304,824,310	20	619,297,240	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	25	106,401,802		106,401,802		106,401,802		106,401,802		425,607,208	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,143,602,644		5,601,203,083		6,349,981,133		6,600,228,634		23,695,015,494	DP
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,123,474,644	100	3,230,819,083	100	3,291,597,133	100	3,441,844,634	100	13,087,735,494	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (jumlah)	Ton	8000	643,000,000	8500	643,000,000	9000	943,000,000	9500	943,000,000	9500	3,172,000,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (jumlah)	Ton	8000	707,128,000	8500	957,384,000	9000	1,045,384,000	9500	1,145,384,000	9500	3,855,280,000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Point	5/10	40,000,000	5/10	40,000,000	5/10	40,000,000	5/10	40,000,000	5/10	160,000,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio Konsumsi Ikan	Ton	4000	630,000,000	4250	730,000,000	4500	1,030,000,000	4750	1,030,000,000	4750	3,420,000,000	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,280,865,372		1,280,865,372		1,280,865,372		1,280,865,372		5,123,461,488	DPKP
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	%	90	698,095,102	90	698,095,102	90	698,095,102	90	698,095,102	90	2,792,380,408	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan Pangan	%	60	276,652,020	60	276,652,020	60	276,652,020	60	276,652,020	60	1,106,608,080	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	306,118,250	90	306,118,250	90	306,118,250	90	306,118,250	90	1,224,473,000	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18,264,435,966		18,558,829,660		20,087,583,196		20,516,880,571		77,427,729,393	DPKP
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	13,277,471,799	100	13,571,865,493	100	13,920,619,029	100	14,219,916,404	100	54,989,872,725	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	Ton	76,200	2,791,858,886	77,700	2,891,858,886	79,300	3,211,858,886	80,900	3,091,858,886	80,900	11,987,435,544	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	Ton	76,200	859,540,931	77,700	759,540,931	79,300	1,619,540,931	80,900	1,869,540,931	80,900	5,108,163,724	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	100	569,996,560	100	569,996,560	100	569,996,560	100	569,996,560	100	2,279,986,240	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	%	100	330,000,000	100	330,000,000	100	330,000,000	100	330,000,000	100	1,320,000,000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Izin Usaha Pertanian/Peternakan	Dokumen	2	95,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000	2	380,000,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	90	340,567,790	90	340,567,790	100	340,567,790	100	340,567,790	100	1,362,271,160	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2,737,018,024		3,072,513,186		3,188,158,127		3,365,719,191		12,363,408,528	DisNaKerTrans
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	1,894,617,104	100	1,915,368,266	100	1,962,013,207	100	2,089,574,271	100	7,861,572,848	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	55.69	16,257,730	59.37	21,001,730	63.30	16,257,730	67.50	16,257,730	67.50	69,774,920	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	397,841,170	100	599,841,170	100	581,585,170	100	630,585,170	100	2,209,852,680	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	43.5	366,041,140	44	469,041,140	44.5	562,041,140	45	562,041,140	45	1,959,164,560	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun	Point	53.2	62,260,880	42.5	67,260,880	42.5	66,260,880	37.2	67,260,880	37.2	263,043,520	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				14,418,360		14,418,360		14,418,360		14,418,360		57,673,440	DisNaKerTrans
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran swakarsa	%	10	14,418,360	10	14,418,360	10	14,418,360	10	14,418,360	10	57,673,440	
4	01				URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				20,352,960,654		20,605,970,073		22,680,304,727		22,036,122,747		85,675,358,201	Setda
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	18,688,775,920	100	18,941,785,339	100	21,016,119,993	100	20,371,938,013	100	79,018,619,265	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	25	1,191,361,734	25	1,191,361,734	25	1,191,361,734	25	1,191,361,734	25	4,765,446,936	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi perekonomian	%	25	472,823,000	25	472,823,000	25	472,823,000	25	472,823,000	25	1,891,292,000	
4	02				URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				23,779,271,345		23,838,207,422		24,125,625,754		24,287,545,470		96,030,649,992	Set. DPRD
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	17,141,460,485	100	17,200,396,562	100	17,487,814,894	100	17,649,734,610	25	69,479,406,552	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	25	6,637,810,860	25	6,637,810,860	25	6,637,810,860	25	6,637,810,860	25	26,551,243,440	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6,630,781,944		7,312,235,719		7,402,061,101		8,266,707,116		29,611,785,880	Bappelitbangda
5	01				URUSAN PERENCANAAN				6,143,309,254		6,664,358,406		6,754,183,788		7,618,829,803		27,180,681,251	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi PD	%	100	3,598,320,644	100	3,719,369,796	100	3,809,195,178	100	4,173,841,193	100	15,300,726,811	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dok	7	1,661,245,780	8	2,111,245,780	9	2,111,245,780	40	2,411,245,780	40	8,294,983,120	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	%	25	883,742,830	25	833,742,830	25	833,742,830	100	1,033,742,830	100	3,584,971,320	
5	05				URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				487,472,690		647,877,313		647,877,313		647,877,313		2,431,104,629	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	25	487,472,690	25	647,877,313		647,877,313	100	647,877,313	100	2,431,104,629	
5	02				URUSAN KEUANGAN				231,354,118,358		242,410,835,727		226,185,592,236		224,618,950,908		924,569,497,229	BKAD
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung <u>Tupoksi Perangkat Daerah</u>	%	100	30,022,678,018	100	31,898,441,894	100	34,783,099,867	100	35,293,199,289	100	131,997,419,068	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	%	25	200,162,013,006	25	209,342,966,499	25	190,233,065,035	100	188,156,324,285	100	787,894,368,825	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	%	25	1,169,427,334	25	1,169,427,334	25	1,169,427,334	100	1,169,427,334	100	4,677,709,336	
5	02				URUSAN KEUANGAN				5,395,023,376		5,484,150,164		5,562,505,122		5,726,143,954		22,167,822,616	BPD
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	%	100	4,154,665,966	100	4,243,792,754	100	4,322,147,712	100	4,485,786,544	100	17,206,392,976	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	%	25	1,240,357,410	25	1,240,357,410	25	1,240,357,410	100	1,240,357,410	100	4,961,429,640	
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN				9,999,101,824		10,170,615,107		11,730,916,223		11,946,049,866		40,946,683,021	BPDPsDM
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	3,683,530,756	100	3,755,044,039	100	3,815,345,155	100	4,030,478,798	25	15,284,398,749	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	%	25	5,915,571,068	25	5,915,571,068	25	6,915,571,068	25	6,915,571,068	25	25,662,284,272	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Asn yang mengikuti bimtek	org	12	400,000,000	18	500,000,000	30	1,000,000,000	30	1,000,000,000	30	2,900,000,000	
6	01				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7,089,512,174		7,395,829,524		7,491,804,807		7,693,504,473		29,670,650,978	Inspektorat
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	25	4,915,112,194	25	5,021,429,544	25	5,117,404,827	25	5,319,104,493	25	20,373,051,058	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Persentase Audit Kinerja dan Keuangan	%	25	1,874,399,980	25	2,074,399,980	25	1,874,399,980	25	1,874,399,980	25	7,697,599,920	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat	Dokumen	0	300,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000	1	500,000,000	1	1,600,000,000	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN			35,206,533,071		36,182,449,103		36,775,763,036		38,320,834,816		146,485,580,026		
					KECAMATAN NUBATUKAN			12,306,899,755		12,485,876,924		12,656,328,523		12,889,366,411		50,338,471,613	Kec-Nuba	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	8,429,384,215	100	8,560,204,344	100	8,680,882,102	100	8,872,122,992	100	34,542,593,653	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	349,420,050	25	369,752,370	25	373,850,196	100	384,008,266	100	1,477,030,882	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	3,173,440,390	25	3,184,437,350	25	3,216,717,933	100	3,254,277,354	100	12,828,873,027	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	10,335,050	25	10,667,370	25	11,734,107	100	12,846,500	100	45,583,027	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	91,162,550	25	91,661,030	25	95,900,786	100	101,421,326	100	380,145,692	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	253,157,500	25	269,154,460	25	277,243,399	100	264,689,973	100	1,064,245,332	
					KECAMATAN LEBATUKAN			2,758,788,563		2,858,287,585		2,896,024,082		3,068,028,992		11,581,129,222	Kec-Leba	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,398,232,377	100	2,474,202,504	100	2,493,530,493	100	2,645,286,044	100	10,011,251,418	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	95,491,653	25	106,040,818	25	116,644,900	100	128,309,390	100	446,486,761	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	30,147,300	25	33,262,030	25	36,588,233	100	40,247,056	100	140,244,619	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	3,520,000	25	5,674,000	25	6,241,400	100	6,865,540	100	22,300,940	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	5,150,000	25	8,507,000	25	9,357,700	100	10,293,470	100	33,308,170	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	226,247,233	25	230,601,233	25	233,661,356	100	237,027,492	100	927,537,314	
					KECAMATAN OMESURI			2,838,155,351		2,934,147,339		2,968,289,126		3,121,609,458		11,862,201,274	Kec-Ome	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,384,902,371	100	2,480,394,359	100	2,509,522,146	100	2,649,356,478	100	10,024,175,354	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	115,761,510	25	115,761,510	25	116,275,510	100	119,261,510	100	467,060,040	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	44,991,470	25	44,991,470	25	44,991,470	100	44,991,470	100	179,965,880	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	8,500,000	25	9,000,000	25	10,500,000	100	12,000,000	100	40,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	38,000,000	25	38,000,000	25	41,000,000	100	50,000,000	100	167,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	246,000,000	25	246,000,000	25	246,000,000	100	246,000,000	100	984,000,000	
					KECAMATAN BUYASURI			3,170,611,223		3,276,566,961		3,350,921,593		3,529,710,090		13,327,809,867	Kec-Buya	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,761,221,433	100	2,881,704,624	100	2,913,216,932	100	3,062,121,272	100	11,618,264,261	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	121,384,040	25	94,394,529	25	108,439,453	100	119,743,945	100	443,961,967	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	22,020,700	25	30,202,070	25	47,020,207	100	53,102,021	100	152,344,998	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	8,335,050	25	9,833,505	25	15,957,822	100	19,745,782	100	53,872,159	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	15,000,000	25	18,500,000	25	19,650,000	100	21,745,000	100	74,895,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	242,650,000	25	241,932,233	25	246,637,179	100	253,252,070	100	984,471,482	
					KECAMATAN ATADEI				2,843,448,901		2,942,550,746		3,009,880,137		3,131,467,763		11,927,347,547	Kec-Atadei
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,506,346,618	100	2,584,838,235	100	2,636,396,375	100	2,740,569,624	100	10,468,150,852	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	30,000,000	25	41,000,000	25	45,100,000	100	49,610,000	100	165,710,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	30,000,000	25	30,000,000	25	33,000,000	100	36,300,000	100	129,300,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	10,335,050	25	11,368,555	25	12,505,411	100	13,755,952	100	47,964,968	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	20,000,000	25	20,000,000	25	22,000,000	100	24,200,000	100	86,200,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	246,767,233	25	255,343,956	25	260,878,352	100	267,032,187	100	1,030,021,728	
					KECAMATAN NAGAWUTUNG				3,231,247,410		3,339,814,646		3,386,846,063		3,568,378,265		13,526,286,384	Kec-Naga
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,792,847,410	100	2,889,494,646	100	2,924,010,063	100	3,092,400,465	100	11,698,752,584	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	66,400,000	25	69,720,000	25	73,206,000	100	76,866,300	100	286,192,300	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	78,000,000	25	81,900,000	25	85,995,000	100	90,294,750	100	336,189,750	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	20,000,000	25	21,000,000	25	22,050,000	100	23,152,500	100	86,202,500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	20,000,000	25	21,000,000	25	22,050,000	100	23,152,500	100	86,202,500	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	254,000,000	25	256,700,000	25	259,535,000	100	262,511,750	100	1,032,746,750	
					KECAMATAN ILE APE				2,477,558,159		2,568,931,897		2,628,339,979		2,791,808,263		10,466,638,299	Kec-Ile Ape
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,104,436,749	100	2,145,810,487	100	2,205,218,569	100	2,368,686,853	100	8,824,152,659	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	56,486,837	25	62,135,520	25	62,135,520	100	62,135,520	100	242,893,397	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan	%	25	22,520,014	25	24,772,016	25	24,772,016	100	24,772,016	100	96,836,062	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggungjawab
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	17,946,676	25	19,741,344	25	19,741,344	100	19,741,344	100	77,170,708	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	48,573,338	25	53,430,672	25	53,430,672	100	53,430,672	100	208,865,354	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	227,594,545	25	263,041,858	25	263,041,858	100	263,041,858	100	1,016,720,119	
					KECAMATAN WULANDONI				3,186,108,342		3,294,198,572		3,340,741,059		3,521,772,107		13,342,820,080	Kec-Wulandoni
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,780,448,559	100	2,895,538,789	100	2,933,077,126	100	3,054,812,324	100	11,663,876,798	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	46,000,000	25	44,000,000	25	46,000,000	100	53,000,000	100	189,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	65,000,000	25	60,000,000	25	65,000,000	100	78,000,000	100	268,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	9,335,050	25	9,335,050	25	11,339,200	100	15,335,050	100	45,344,350	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	16,000,000	25	16,000,000	25	16,000,000	100	20,000,000	100	68,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	269,324,733	25	269,324,733	25	269,324,733	100	300,624,733	100	1,108,598,932	
					KECAMATAN ILE APE TIMUR				2,393,715,367		2,482,074,432		2,538,392,474		2,698,693,467		10,112,875,740	Kec-Ile Ape Timur
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	1,958,715,367	100	2,035,044,432	100	2,078,702,974	100	2,225,680,692	100	8,298,143,465	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	25	66,400,000	25	69,720,000	25	73,206,000	100	76,866,300	100	286,192,300	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	25	78,000,000	25	81,900,000	25	85,995,000	100	90,294,750	100	336,189,750	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25	20,000,000	25	21,000,000	25	22,050,000	100	23,152,500	100	86,202,500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	25	20,000,000	25	21,000,000	25	22,050,000	100	23,152,500	100	86,202,500	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	%	25	250,600,000	25	253,410,000	25	256,388,500	100	259,546,725	100	1,019,945,225	
8	01				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4,455,064,655		5,328,674,249		5,040,989,116		5,601,709,874		20,426,437,894	KesBangPol
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	2,534,415,236	100	2,584,026,003	100	2,621,877,039	100	2,763,999,351	100	10,504,317,629	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	25	302,166,440	25	602,166,440	25	352,166,440	25	395,228,718	25	1,651,728,038	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	25	593,020,220	25	643,020,220	25	643,020,220	25	643,020,220	25	2,522,080,880	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	25	155,100,000	25	355,100,000	25	155,100,000	25	255,100,000	25	920,400,000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosoal dan budaya	%	25	450,961,650	25	450,961,650	25	450,961,650	25	450,961,650	25	1,803,846,600	

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1 (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode		OPD Penanggungjawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	25	419,401,109	25	693,399,936	25	817,863,767	25	1,093,399,935	25	3,024,064,747	
					Total Pagu Non Urusan				358,438,407,815		366,434,597,442		375,057,765,652		381,297,568,404		1,481,228,339,313	
					Total Pagu Urusan Wajib				433,029,881,807		458,609,129,861		455,426,570,271		460,053,561,602		1,807,119,143,541	
					Total pagu belanja				791,468,289,622		825,043,727,304		830,484,335,922		841,351,130,006		3,288,347,482,854	

10,460,678,786

11,397,291,020

3,534,852,299

7,347,862,554

5,409,036,088

4,226,319,316

19,545,301,338

200,000,000

#####



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAEARAH

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indicator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada sebagai berikut:

Tabel VIII.1
Indikator Makro Kabupaten Lembata

No.	Indikator Makro	Base Line Data	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	1,53	2,5-3	3,0-5	4-5,5	5,5-6,75
2.	Laju inflasi (%)	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02
3.	PDRB per kapita (Rp. juta)	14,43	15,74	16,39	17,04	17,68
4.	Indeks Gini (point)	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40
5.	Indeks Pembangunan Manusia (point)	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50
6.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	26,21	26,12	26,07	26,03	25,99
7.	Prevelensi stunting (%)	23,3	20,00	17,00	15,00	12,00
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00
9.	Rasio PAD (%)	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98



11.	Kebutuhan investasi (miliaran rupiah)	329	60,5	70,5	80,5	90
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	77,80	82,65	88,30	90,50



Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

Indikator		Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
			2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7
TUJUAN PERTAMA : Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;							
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	1,53	2,5-3	3,0-5	4-5,5	5,5-6,75	5,5-6,75
2.	Laju inflasi (%)	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02
3.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	26,21	26,12	26,07	26,03	25,99	25,99
4.	PDRB per kapita (Rp. juta)	14,43	15,74	16,39	17,04	17,68	17,68
5.	Indeks Gini (point)	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00
7.	Indeks keparahan kemiskinan (point)	1,32	1,31	1,26	1,21	1,11	1,11
8.	Indeks kedalaman kemiskinan (point)	5,64	5,21	4,7	4,01	3,6	3,6
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	52,23	55,69	59,37	63,30	67,50	67,50
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00
11.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24
12.	Penguatan cadangan pangan (%)	60	62,0	64,5	66,5	68,0	68,0



Pemerintah Kabupaten Lembata

Indikator		Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
			2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7
TUJUAN KEDUA : Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98	75,98
2.	Indeks risiko bencana (point)	147	147	140	138	135	135
3.	Persentase pengurangan sampah	78,14	79,00	79,25	79,60	79,85	79,85
4.	Angka kriminalitas tertangani (point)	8,6	10,1	11,5	12,9	14,3	14,3
TUJUAN KETIGA : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;							
1.	Angka melek huruf (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,01	8,21	8,30	8,38	8,46	8,46
4.	Prevelensi stunting (%)	23,3	20,00	17,00	15,00	12,00	12,00
5.	Angka usia harapan hidup (tahun)	67,07	67,57	68,60	70,35	72,40	72,40
6.	Indeks Pembangunan Manusia (point)	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50	70,50
7.	Persentase penduduk yang tercakup jaminan sosial	92	100	100	100	100	100
8.	Presentase PMKS yang ditangani	70	71,5	71,75	72,20	72,85	72,85
TUJUAN KEEMPAT : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;							
1.	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1.681	125	125	125	125	2.181
2.	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	73,50	73,70	73,98	74,28	74,61	74,61
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,46	0,47	0,49	0,52	0,55	0,55



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Indikator		Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
			2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7
	(point)						
4.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	73,00	75,00	80,00	81,00	85,00	85,00
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	62,12	65,60	67,63	70,00	74,85	74,85
TUJUAN KELIMA : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;							
1.	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	77,80	82,65	88,30	90,50	90,50
3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (point)	48,91	49,21	49,36	49,52	49,67	49,67
4.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (point)	2.761	2.756,36	2.754,05	2.751,73	2.749,42	2.749,42
TUJUAN KEENAM : Meningkatkan Kemampuan keuangan Daerah;							
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
TUJUAN KETUJUH : Meningkatkan Daya Saing Daerah							
1.	Nilai Tukar Petani (point)	102,69	108,48	111,45	114,43	117,40	117,40
2.	Rasio ketergantungan (point)	65,28	74,06	77,25	80,33	83,42	83,42
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	46,21	50,47	52,74	78,20	117,67	117,67
4.	Jumlah nilai investasi (miliar rupiah)	329	60,5	70,5	80,5	90	90
5.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	10.252	103.052	280.732	285.777	290.386	290.386
6.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	35.264	45.937	78.231	80.276	83.472	83.472



Tabel VIII.3

Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan PDRB	%	1,53	2,5-3	3,0-5	4-5,5	5,5-6,75	5,5-6,75
2.	Laju inflasi	%	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02
3.	PDRB per kapita	Rp. juta	14,43	15,74	16,39	17,04	17,68	17,68
4.	Indeks Gini	point	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan	point	1,32	1,31	1,26	1,21	1,11	1,11
6.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	point	5,64	5,21	4,7	4,01	3,6	3,6
7.	Indeks Pembangunan Manusia	point	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50	70,50
8.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,01	8,21	8,30	8,38	8,46	8,46
9.	Angka melek huruf	%	100	100	100	100	100	100
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00
11.	Persentase Pendapatan Asli Daerah	%	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
12.	Angka usia harapan hidup	tahun	67,07	67,57	68,60	70,35	72,40	72,40
13.	Tingkat Partisipasi	%	52,23	55,69	59,37	63,30	67,50	67,50



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angkatan Kerja							
14.	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Skor pola pangan harapan	skor	82,40	82,75	82,95	83,15	83,30	83,30
16.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	26,21	26,12	26,07	26,03	25,99	25,99
17.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	35,61	35,83	36,15	36,32	36,75	36,75
18.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24
ASPEK PELAYANAN UMUM								
A. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
A.1 Pendidikan								
1.	Pendidikan Dasar							
	1. Angka Partisipasi Sekolah	point	760,2	796,8	815,8	835,2	855,1	855,1
	2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	87,46	88,76	91,86	93,02	93,22	93,22
	3. Rasio Guru/Murid	%	268,63	268,98	269,10	269,33	269,89	269,89
	4. Rasio Guru/Murid per	%	29,03	29,15	29,29	29,38	29,46	29,46



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelas Rata-Rata							
	5. Angka Partisipasi Kasar							
	a. SD/MI/Paket A	%	92,20	94,04	94,98	95,92	96,88	96,88
	b. SMP/MTs/Paket B	%	80,92	84,34	86,11	87,91	89,75	89,75
	6. Angka Partisipasi Murni							
	a. SD/MI/Paket A	%	76,04	77,56	78,88	79,24	82,64	82,64
	b. SMP/MTs/Paket B	%	63,62	64,50	64,94	65,39	65,84	65,84
	7. Angka Putus Sekolah							
	a. SD/MI/Paket A	%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	b. SMP/MTs/Paket B	%	10,00	9,25	9,00	8,55	8,05	8,05
	8. Angka Kelulusan Sekolah							
	a. SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100
	b. SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	100
	c. SMP/MTs yang Melanjutkan ke SMA/MA	%	86,73	88,90	93,45	97,00	100	100
	9. Fasilitas Sekolah							
	a. Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	158	165	173	177	179	179
	b. Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	%	58	65	73	77	79	79



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kondisi Bangunan Baik							
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	90	90,50	91	91,50	92	92
A.2 Kesehatan								
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		988	988	990	990	990	990
2.	Prevelensi stunting	%	23,3	20,00	17,00	15,00	12,00	12,00
3.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	1,30	1,35	1,22	1,12	1,02	1,30
A.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	0,46	0,47	0,49	0,52	0,55	0,55
2.	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	%	73,50	73,70	73,98	74,28	74,61	74,61
3.	Persentase penduduk berakses air minum	%	73,00	75,00	80,00	81,00	85,00	85,00
A.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1.	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun	Unit	1.681	125	125	125	125	2.181



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	62,12	65,60	67,63	70,00	74,85	74,85
3.	Jumlah sarana layanan sistem air limbah	%	35,76	35,95	36,21	36,86	37,18	37,18
4.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	%	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
A.5 Kenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	%	7,88	8,35	8,70	8,95	9,15	9,15
2.	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	%	2	2,12	2,22	2,50	2,75	2,75
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
5.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran)	%	18	35,5	49	58,5	73,2	73,2



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.6 Sosial								
1.	Persentase Pelayanan Bantuan ke Penyandang Cacat	%	85,78	86,75	87,15	87,99	88,50	88,50
2.	Persentase penduduk yang tercakup jaminan sosial	%	92	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Bantuan kepada anak terlantar dan pekerja social	%	82,83	82,99	83,16	83,25	83,40	83,40
3.	Persentase Pelayanan Bantuan kepada Warga Negara Korban Bencana	%	92,30	92,35	92,40	92,45	92,50	92,50
4.	Persentase PMKS Tertangani	%	70	71,5	71,75	72,20	72,85	72,85
B. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
B.1 Tenaga Kerja								
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	52,23	55,69	59,37	63,30	67,50	67,50
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	43	43,5	44	44,5	45	45



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,90	8,95	9,00	9,10	9,15	9,15
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	3,70	3,95	4,25	4,90	5,15	5,15
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan	%	79,56	80,10	80,25	80,70	80,85	80,85
4.	Rasio KDRT	%	75,34	72,15	71,75	71,10	68,50	68,50
B.3 Pangan								
1.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	82,40	82,75	82,95	83,15	83,30	83,30
2.	Ketersediaan energi	2.200kka 1/kap/hari	174,5	175,0	175,5	176,0	176,5	176,5
3.	Ketersediaan protein	(57 gram/kap/hari)	185,5	190,0	190,5	191,0	191,5	191,5
4.	Penguatan cadangan pangan	%	60	62,0	64,5	66,5	68,0	68,0
5.	Luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian	ha	300	500	700	900	1.100	1.100



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	berkelanjutan							
B.4 Pertanian								
1.	Luas Tanah Milik Pemerintah Daerah	Ha	10.907.177,5	10.907.177,5	10.907.177,5	10.907.177,5	10.907.177,5	10.907.177,5
2.	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah berserftikat	Dokumen	517.367	10	10	10	10	517.407
B.5 Lingkungan Hidup								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98	75,98
2.	Penyediaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Point	5,00	5,25	5,35	5,40	5,55	5,55
3.	Pengurangan Sampah	%	78,14	79,00	79,25	79,60	79,85	79,85
B.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	93,30	95,00	96,00	98,00	100	100
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	83,66	95,00	96,00	97,00	100	100
3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	85,37	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00
4.	Kepemilikan KTP	%	93,30	95,00	96,00	98,00	100	100
5.	Kepemilikan akta kelahiran	%	54,76	88,00	89,00	91,00	92,00	92,00



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	per 1000 penduduk							
B.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1.	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.	Posyandu aktif	%	90	90	100	100	100	100
3.	Bumdes Aktif	%	10	10	20	28	40	40
B.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1.	Cakupan Peserta KB Aktif	%	76,30	77,80	78,25	79,00	79,95	79,95
2.	Akseptor KB	Jumlah	12.044	13.500	14.250	15.550	16.700	16.700
3.	Presentase Keluarga Sejahtera	%	89,01	92,20	94,15	95,25	95,98	95,98
B.9 Perhubungan								
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		166.201	166,116	199,34	239,208	287,05	287,05
2.	Jumlah Pelayanan Angkutan Darat		91	102	123	136	147	147
3.	Jml. Barang yg Terangkut Angk. Umum (Ton)		72,23	72,31	72,39	72,42	72,45	72,45
B.10 Komunikasi dan Informatika								
1.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	100	100	100	100	100	100



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Website yang Aktif	%	7,69	8,20	8,35	8,45	8,50	8,50
3.	Cakupan Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
B.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1.	Persentase koperasi aktif	%	45,61	70,18	78,95	87,72	92,11	92,11
2.	Persentase usaha mikro dan kecil	%	82,22	86,67	88,89	95,56	100	100
B.12 Penanaman Modal								
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN-PMA)	investor	5	5	5	5	5	5
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. miliar	32,9	60,5	70,5	80,5	90	90
3.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	0	83,89	16,53	14,18	11,80	11,80
B.13 Kepemudaan dan Olahraga								
1.	Organisasi kepemudaan	Jumlah	12	13	13	14	15	15
2.	Fasilitasi cabang olahraga	Jumlah	330	331	331	332	333	333



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.14 Statistik								
1.	Tersedianya data statistik yang terintegrasi	Buku	1	1	1	1	1	1
B.15 Kebudayaan								
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	188	188	188	188	188	188
2.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya/ Lembata Festival	Jumlah	1	1	1	1	1	1
B.16 Perpustakaan								
1.	Pengunjung Perpustakaan Tahun	Jumlah	2.278	2.600	2.850	3.100	3.650	3.650
2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	38.230	39.330	41.155	42.320	43.225	43.225
B.17 Kearsipan								
1.	Pengelolaan arsip secara baku	%	0,17	0,50	0,75	0,95	1,20	1,20
C. Layanan Urusan Pilihan								
C.1 Pariwisata								
1.	Kunjungan wisata	%	32,61	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kunjungan	orang	3.913	4.000	4.500	6.000	7.000	7.000



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wisatawan							
3.	Lama kunjungan wisata	hari	3	3	3	4	4	4
C.2 Pertanian								
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	5,00	5,25	5,50	5,75	5,90	5,90
2.	Cakupan bina kelompok petani	%	50,76	50,85	50,90	50,95	60,00	60,00
C.3 Perdagangan								
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas harga berlaku	%	130,23	130,23	131,53	132,85	134,18	134,18
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	100
C.4 Perindustrian								
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	1,77	2,36	2,95	3,35	3,94	3,94
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	3,80	3,80	3,84	3,88	3,92	3,92



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.5 Kelautan dan Perikanan								
1.	Produksi perikanan	ton	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
2.	Konsumsi ikan	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	jumlah	43	43	43	43	43	43
4.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	jumlah	5	5	5	5	5	5
D. Penunjang Urusan								
D.1 Pengawasan								
1.	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	point	2.761	2.756,36	2.754,05	2.751,73	2.749,42	2.749,42
3.	Akuntabilitas kinerja pemerintah (point)	point	48,91	49,21	49,36	49,52	49,67	49,67
D.2 Perencanaan								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERDA/PERKADA							
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100
D.3 Keuangan								
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
2.	Penetapan APBD (sebelum 31 Desember tahun sebelumnya)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
D.4 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
1.	Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3	3
2.	Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM							
	a. PIM II	%	9,68	9,68	10,71	12,00	13,64	13,64
	b. PIM III	%	5,30	5,30	5,60	5,93	6,31	6,31



Pemerintah Kabupaten Lembata

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. PIM IV	%	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
3.	ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional/tahun	Jumlah	25	25	25	25	25	25
D.5 Sekretariat Dewan								
1.	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	36	36	33,74	31,62	29,64	29,64
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pad Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Lembata Tahun 2021	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran SETWAN DPRD							
E. Aspek Daya Saing Daerah								
1.	Nilai Tukar Petani	point	102,69	108,48	111,45	114,43	117,40	117,40
2.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	46,21	50,47	52,74	78,20	117,67	117,67
3.	Rasio ketergantungan	%	65,28	74,06	77,25	80,33	83,42	83,42
4.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. miliar	329	60,5	70,5	80,5	90	90
5.	Angka kriminalitas tertangani	point	8,6	10,1	11,5	12,9	14,3	14,3
6.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum		10.252	103.052	280.732	285.777	290.386	290.386
7.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	35.264	45.937	78.231	80.276	83.472	83.472



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dan arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata agar terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pembangunan nasional selama masa transisi atau sebelum di tetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sangat ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lembata; kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Provinsi dan Kabupaten lainnya; komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Lembata; kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya; serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Lembata. Untuk itu menjadi penting di pahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi ini agar benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappelitbangda.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan daerah pada periode akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga di maksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya agar tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Lembata, maka pedoman transisi di tetapkan sebagai berikut:

RPD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati hingga di tetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya;

- 1) RPD menjadi pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah – masalah pembangunan yang akan di hadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya;



- 2) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPD dan menjadi bagian takterpisakan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPD kabupaten Lembata Tahun 2023-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintahan Lembata agar melaksanakan program-program dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
4. RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Lewoleba, 2022

BUPATI LEMBATA

THOMAS OLA